

RENSTRA



RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan prioritas, serta indikator kinerja utama dan kunci yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama periode lima tahun mendatang. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi Bali ke depan, Pemerintah Provinsi Bali menekankan arah pembangunan melalui konsep Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali bertumpu pada enam sektor unggulan sebagai pilar utama perekonomian daerah, yaitu:

1. Sektor Pertanian dalam arti luas (termasuk peternakan dan perkebunan),
2. Sektor Kelautan dan Perikanan,
3. Sektor Industri,
4. Sektor IKM, UMKM, dan Koperasi,
5. Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, serta
6. Sektor Pariwisata.

Sektor Kelautan dan Perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produksi dan pendapatan nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha pengolahan ikan, tetapi juga turut memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi ikan, mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, menciptakan lapangan kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menjaga kelestarian ekosistem

laut dan sumber daya ikan. Oleh karena itu, dalam periode Renstra 2025–2029, arah pembangunan kelautan dan perikanan akan difokuskan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya, peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan, serta penguatan industri kelautan dan perikanan berbasis masyarakat secara terpadu.

Dokumen Renstra ini telah disusun melalui berbagai tahapan yang mencakup analisis permasalahan, identifikasi isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (THIS). Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor guna memastikan bahwa rencana pembangunan yang dirancang bersifat inklusif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah dalam Bali Era Baru.

Bali, 22 September 2025
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**

IPUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR.....	i
---------------------	---

DAFTAR TABEL	v
--------------------	---

DAFTAR GAMBAR	vii
---------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

1.1 Latar Belakang.....	2
-------------------------	---

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
---------------------------------	---

1.3 Maksud dan Tujuan	7
-----------------------------	---

1.4 Sistematika Penulisan.....	8
--------------------------------	---

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
----------------------------------	----

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
---	----

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
--	----

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
--	----

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
--	----

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	39
--	----

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	40
--	----

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
--	----

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	42
---	----

2.2.2 Isu Strategis	45
---------------------------	----

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	50
---	----

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	51
--	----

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	53
---	----

3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA		
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
4.1	Uraian Program.....	61
4.2	Uraian Kegiatan	62
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	62
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	65
4.5	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	66
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)	68
BAB V PENUTUP		70
LAMPIRAN.....		73

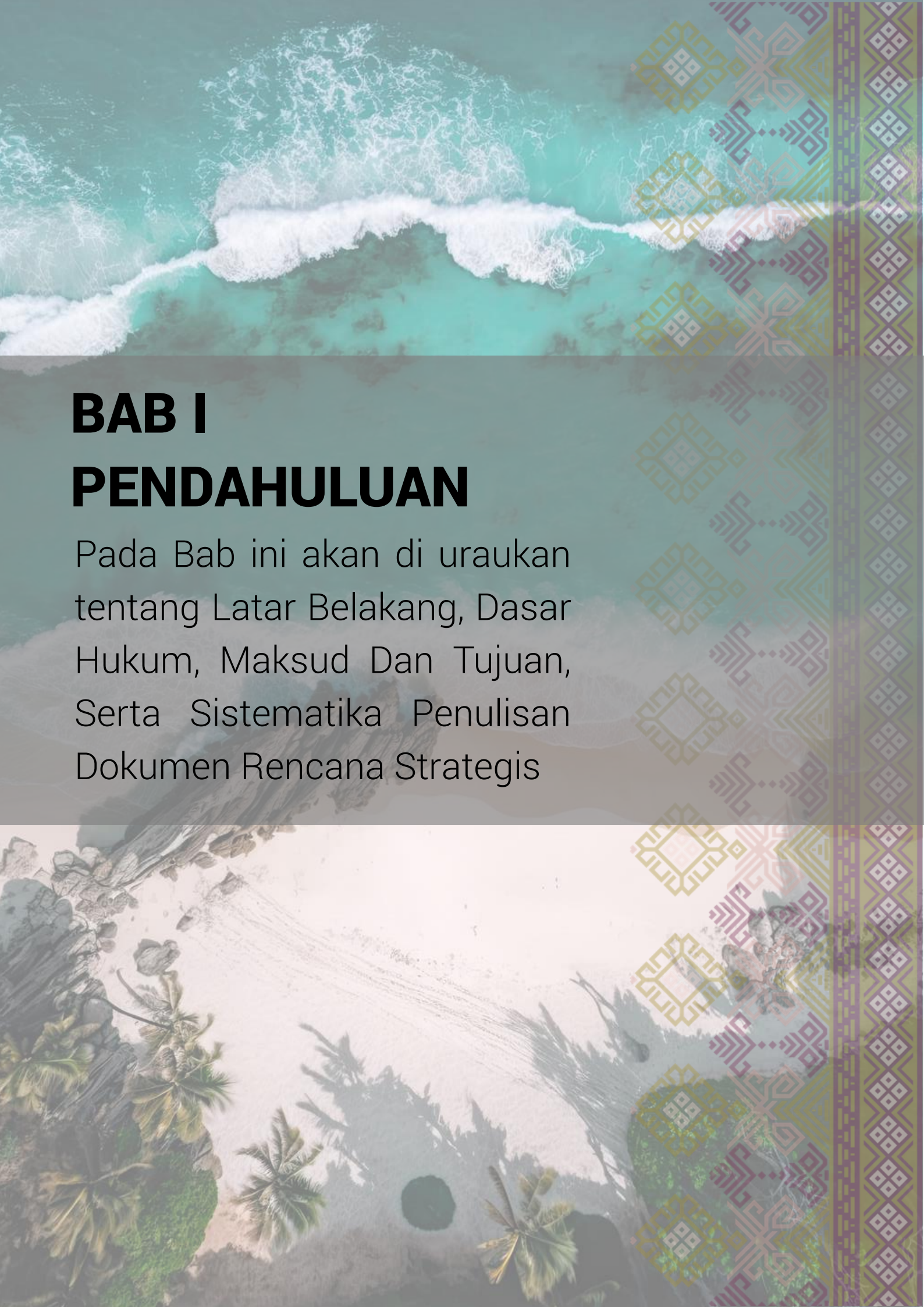
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Kertas Kerja Pemetaan Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	18
Tabel 2. 2	Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	23
Tabel 2. 3	Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan.....	23
Tabel 2. 4	Kategori Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Klasifikasi	24
Tabel 2. 5	Kategori Aset Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan	25
Tabel 2. 6	Kertas Kerja Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan (IKU) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024	27
Tabel 2. 7	Kertas Kerja Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 2. 8	Kertas Kerja Hasil Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024.....	29
Tabel 2. 9	Kertas Kerja Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020 - 2024.....	31
Tabel 2. 10	Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	43
Tabel 2. 11	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Pd	46
Tabel 3. 1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	51

Tabel 3. 2	Startegi dalam Mencapai Tujuan dan SasaranRenstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	53
Tabel 3. 3	Penahapan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	54
Tabel 3. 4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	56
Tabel 3. 5	Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	58
Tabel 4. 1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	62
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	63
Tabel 4. 3	Daftar Program Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	63
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	65
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	67
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci (IKD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Struktur Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	13
Gambar 2. 2	Struktur UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	14
Gambar 2. 3	Struktur UPTD Produksi Perikanan Budidaya.....	15
Gambar 2. 4	Struktur Kawasan Konservasi Provinsi Bali.....	16
Gambar 2. 5	Struktur UPTD Pelabuhan Perikanan	17
Gambar 2. 6	Produksi Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020-2024	32
Gambar 2. 7	Angka Konsumsi Ikan Provinsi Bali.....	33
Gambar 2. 8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	34
Gambar 2. 9	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	34
Gambar 2. 10	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	35
Gambar 2. 11	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial.....	36
Gambar 2. 12	Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Bali.....	37
Gambar 2. 13	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bali.....	38
Gambar 4. 1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan di uraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan, Serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai dokumen arah kebijakan, strategi, dan prioritas program perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra ini menjadi acuan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada mandat Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD, serta mengacu pada Rencana Strategis Nasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks Provinsi Bali, sektor kelautan dan perikanan memegang peranan sangat penting karena karakteristik wilayahnya yang kepulauan dan memiliki garis pantai sepanjang ±633 km. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Bali sangat besar, baik dari sisi perikanan tangkap, budidaya, konservasi laut, hingga wisata bahari. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025–2029, Bali memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 147.278,75 ton per tahun, yang terdiri dari ikan pelagis sebesar 123.906 ton dan ikan demersal sebesar 23.372,75 ton, dengan sebaran wilayah tangkapan utama di Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan Laut Bali

Sumber daya perikanan yang menjadi andalan Bali antara lain ikan pelagis kecil seperti lemuru (dengan produksi rata-rata 28.126 ton/tahun), layang, tembang, teri, dan makarel; serta komoditas unggulan lainnya seperti tuna, tongkol, cakalang, cumi-cumi, lobster, dan rumput laut. Selain

perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya dan kawasan konservasi perairan juga terus dikembangkan di berbagai wilayah pesisir provinsi, termasuk di Kabupaten Jembrana, Karangasem, dan Nusa Penida.

Namun demikian, pengelolaan sektor ini dihadapkan pada berbagai tantangan strategis seperti degradasi ekosistem pesisir, penurunan stok ikan, dampak perubahan iklim, konflik pemanfaatan ruang laut, dan lemahnya sistem pengawasan. Kondisi ini menuntut adanya penguatan tata kelola yang lebih integratif, berkelanjutan, serta berbasis pada data dan ilmu pengetahuan, sejalan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (THIS) sebagaimana diamanatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2045. Renstra ini menjadi dokumen penting dalam menetapkan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan secara terukur, terencana, dan terintegrasi dengan visi pembangunan jangka panjang daerah: **“Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”**.

Secara khusus, Renstra ini menjadi instrumen strategis untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025–2029, yaitu:

Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Yang bermakna; “Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana,

Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden RI, sektor kelautan dan perikanan di Bali diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi biru (*blue economy*), peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengembangan masyarakat pesisir yang mandiri dan tangguh. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan wajib dan pilihan di bidang kelautan dan perikanan, berkewajiban mewujudkan pembangunan sektor ini dengan pendekatan integratif, spasial, serta holistik-tematik sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana.

Melalui dokumen Rencana Strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan akan menetapkan target kinerja, prioritas program, serta langkah-langkah operasional untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan Tujuan **“Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”** dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengelolaan sumber daya kelautan yang lestari, serta peran strategis Bali sebagai *blue economy* hub berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan terwujud sinkronisasi antara perencanaan sektoral dan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu pola dan tata kelola Bali Era Baru.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun dasar hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7).
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang sistematis, terukur, dan terintegrasi. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan visi,

misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang menjamin keterpaduan antara perencanaan sektoral dan kebijakan pembangunan daerah, sekaligus menjadi landasan dalam penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan secara terarah dan operasional;
2. Menyediakan kerangka perencanaan strategis bagi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali;
3. Menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional;
4. Mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal;
5. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahun selama periode 2025–2029;
6. Mendukung terwujudnya sinkronisasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam kerangka Bali Era Baru.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah kebijakan dan

strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun ke depan. Adapun sistematika penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis.

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian mengenai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, sumber daya, capaian kinerja pelayanan lima tahun terakhir, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang relevan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

BAB III – TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

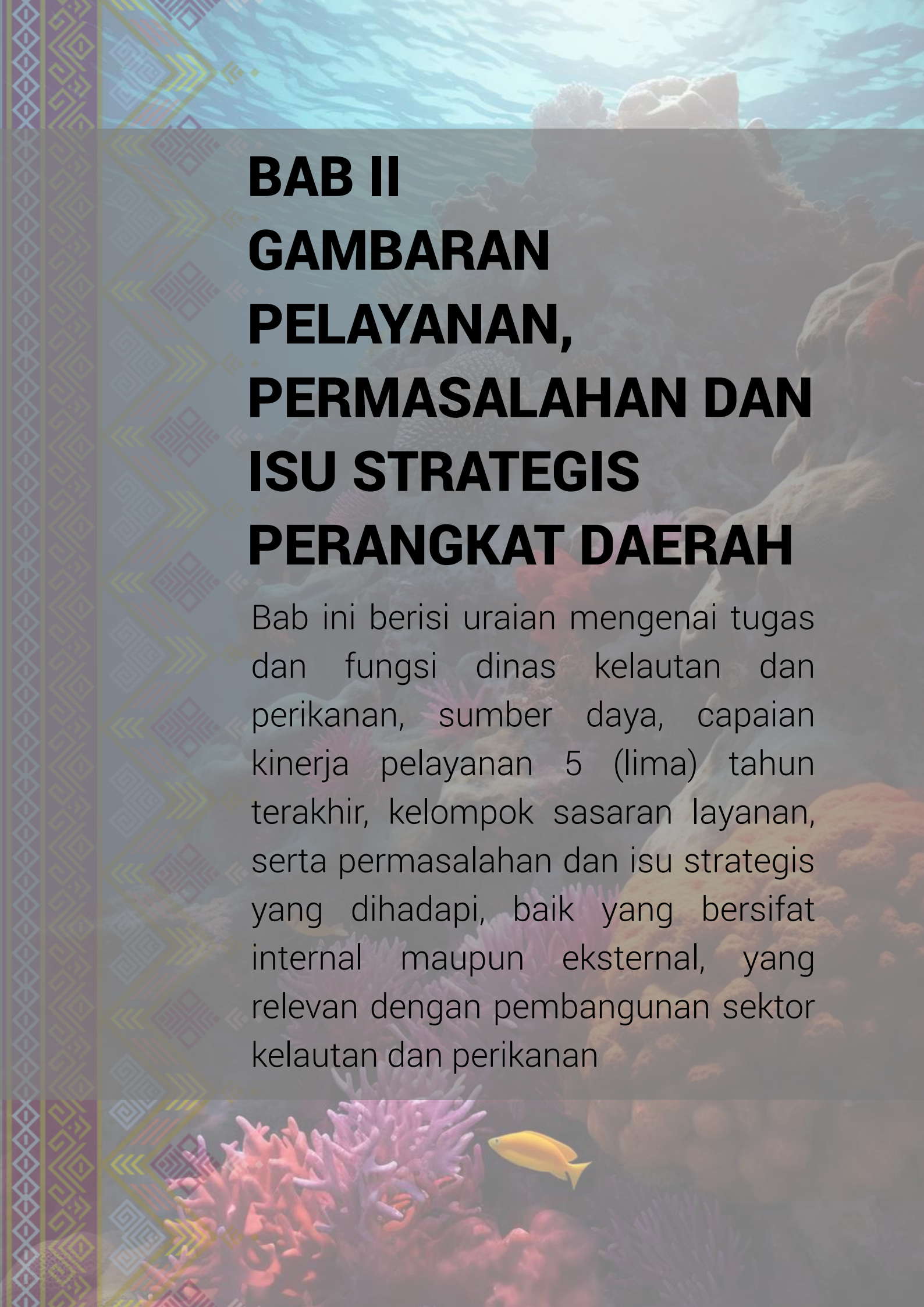
Menguraikan tujuan dan sasaran strategis Renstra berdasarkan visi dan misi daerah, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 2025–2029.

BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Memuat penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, termasuk indikator kinerja, target capaian, dan estimasi pagu indikatif tahunan. Disertai dengan daftar program/kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB V – PENUTUP

Berisi simpulan atas keseluruhan isi Renstra serta harapan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat pesisir dan kelestarian sumber daya kelautan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian mengenai tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan, sumber daya, capaian kinerja pelayanan 5 (lima) tahun terakhir, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang relevan dengan pembangunan sektor kelautan dan perikanan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara umum, dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yaitu:

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

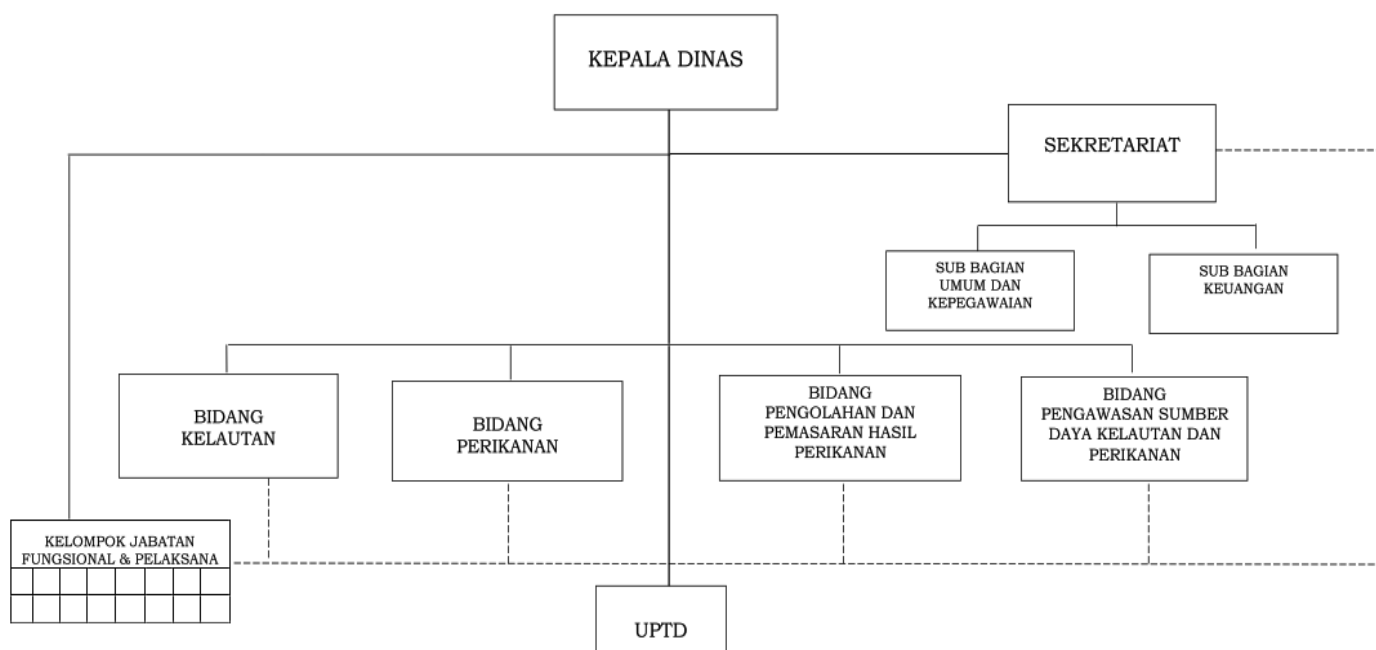
Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 mempunyai fungsi yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
3. Kepala Bidang Kelautan;
 - a. Unit Substansi Tata Ruang Laut;
 - b. Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut.
4. Kepala Bidang Perikanan;
 - a. Unit Substansi Perikanan Tangkap;
 - b. Unit Substansi Perikanan Budidaya;
 - c. Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - a. Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. Unit Substansi Usaha dan Investasi.
6. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - a. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - b. Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - c. Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Gambar 2. 1
Struktur Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas yaitu “Melaksanakan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan”.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, memiliki fungsi meliputi:

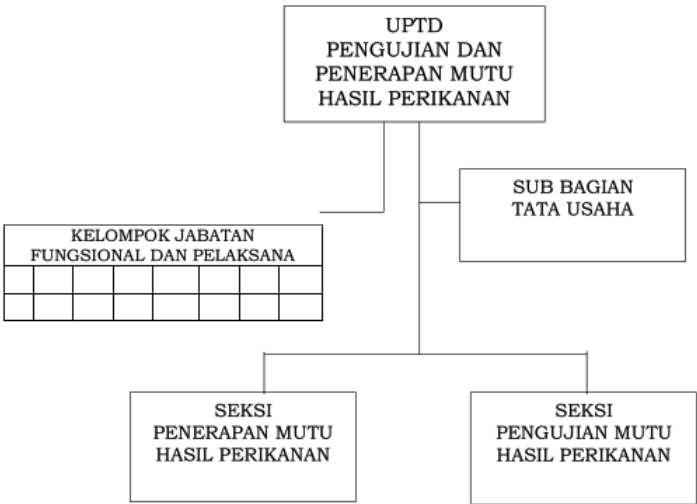
- Melaksanakan kegiatan pengujian bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, dan produk akhir hasil perikanan;
- Melaksanakan monitoring mutu hasil perikanan yang beredar di Provinsi;
- Melaksanakan bimbingan teknis pada unit pengolahan ikan dalam rangka peningkatan daya saing hasil perikanan;

- d. Melaksanakan sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia pada hasil perikanan; dan
- e. Melaksanakan uji terap dan diversifikasi teknik pengolahan produk hasil perikanan.

Struktur organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- 4. Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Gambar 2. 2
Struktur UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, UPTD Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas yaitu “Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan

yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka produksi perikanan budidaya air payau/laut”.

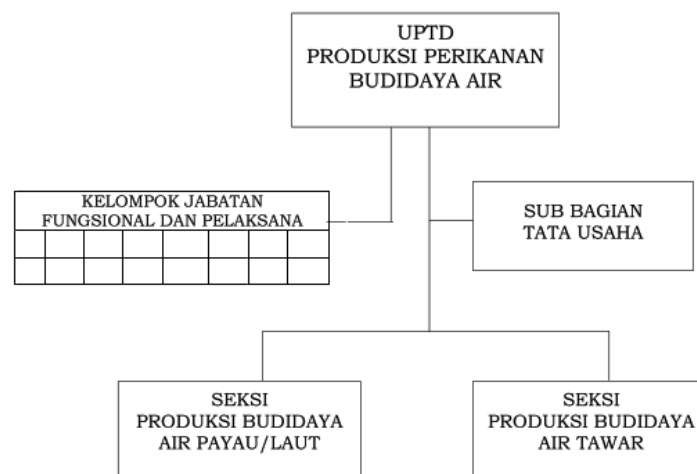
UPTD Produksi Perikanan Budidaya, memiliki fungsi meliputi:

- a. Meningkatkan produksi perikanan air payau/laut;
- b. Melestarikan plasma nutfah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pembudidaya.

Struktur organisasi UPTD Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
4. Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Gambar 2. 3
Struktur UPTD Produksi Perikanan Budidaya



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kawasan Konservasi Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

mempunyai tugas yaitu “Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan di wilayah Provinsi”.

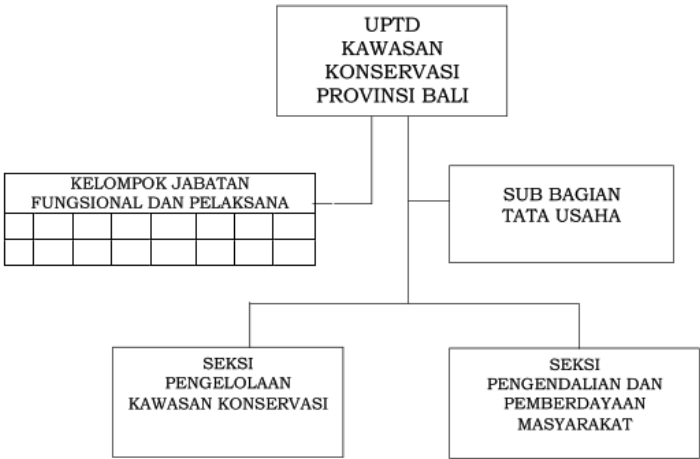
UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali, memiliki fungsi meliputi:

- a. Melaksanakan identifikasi potensi kawasan konservasi perairan;
- b. Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi kawasan yang mengalami kerusakan; dan
- c. Melaksanakan pengawasan dan monitoring sumberdaya pada kawasan konservasi perairan.

Struktur organisasi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 terdiri dari :

- 1. Kepala UPTD;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Gambar 2. 4
Struktur Kawasan Konservasi Provinsi Bali



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun

2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas yaitu “Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan di Provinsi”.

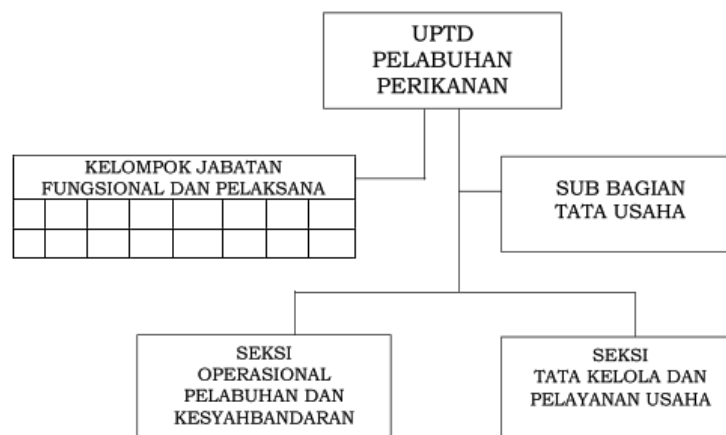
UPTD Pelabuhan Perikanan, memiliki fungsi meliputi:

- a. Perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan serta koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan;
- b. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
- c. Pelaksanaan, pengawasan penangkapan ikan;
- d. Pengkoordinasian pelaksana urusan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan, serta koordinasi pengawasan mutu hasil perikanan; dan
- e. Pengembangan fasilitas pemberdayaan masyarakat.

Struktur organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 terdiri dari :

1. Kepala UPTD;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
4. Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana.

Gambar 2. 5
Struktur UPTD Pelabuhan Perikanan



Sumber: Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas: Sumber daya manusia (SDM): Pegawai ASN dan non-ASN yang bertugas di bidang teknis, pengawasan, perencanaan, dan administrasi; dan Aset Daerah : Sarana prasarana, Kantor pelayanan, laboratorium, kendaraan operasional, serta sarana pengawasan dan pemantauan wilayah pesisir dan laut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025 Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali termasuk pegawai UPTD sebanyak 176 orang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 94 Orang
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 44 Orang
- c. Tenaga Kontrak : 38 Orang

Komposisi kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kertas Kerja Pemetaan Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P		L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pimpinan Tinggi Madya																0%
2	Pimpinan Tinggi Pratama		1	✓				1	✓				1				100%
3	Administrator		9	✓				9	✓	✓			7	2			100%
4	SubKoordinator		14		✓			13	✓	✓			4	9			93%
5	Jabatan Fungsional																0%
	Teknis																0%
	1	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	5	✓				3	✓	✓			1	2			60%
	2	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	9		✓			1		✓			1				11%
	3	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	1		✓			0									0%

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P		L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya	6	✓				3	✓					3			50%
	5	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	10		✓			1		✓				1			10%
	6	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	3		✓			0									0%
	7	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia	5		✓			0									0%
	8	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir	6			✓		0									0%
	10	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya	2	✓				0									0%
	11	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	5		✓			1		✓			1				20%
	12	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	7		✓			0									0%
	13	Analisis Akuakultur Ahli Madya	2	✓				0	✓								0%
	14	Analisis Akuakultur Ahli Muda	5		✓			0									0%
	15	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	6		✓			0									0%
	16	Teknisi Akuakultur Penyelia	1		✓			0									0%
	17	Teknisi Akuakultur Mahir	2			✓		0									0%
	18	Teknisi Akuakultur Terampil	2			✓		0									0%
	19	Teknisi Akuakultur Pemula	3				✓	0									0%
	20	Pengelola Produksi	2	✓				0									0%

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P		L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Perikanan Tangkap Ahli Madya															
	21	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	4		✓			2		✓				2			50%
	22	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	7		✓			0									0%
	23	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia	4		✓			0									0%
	24	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir	6			✓		0									0%
	25	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	8			✓		0									0%
	26	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	9				✓	0									0%
	27	Pengawas Perikanan Ahli Madya	2	✓				0	✓								0%
	28	Pengawas Perikanan Ahli Muda	5		✓			0		✓							0%
	29	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	9		✓			0		✓							0%
	30	Pengawas Kelautan Ahli Madya	2	✓				0	✓								0%
	31	Pengawas Kelautan Ahli Muda	4		✓			0		✓							0%
	32	Pengawas Kelautan Ahli Pertama	5		✓			0		✓							0%
	33	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya	1	✓				1	✓					1			100%

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA				L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	34	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	1		✓			0									0%
	35	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	2		✓			0									0%
	Pendukung																0%
	1	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah															0%
	2	Analisis Kepegawaian															0%
	3	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1		✓			0									0%
	4	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1		✓			1		✓				1			100%
	5	Arsiparis															0%
	6	Arsiparis Ahli Madya	1	✓				1	✓				1				100%
	7	Arsiparis Ahli Muda	1		✓			0									0%
	8	Arsiparis Penyelia	1		✓			1		✓			1				100%
	9	Arsiparis Terampil	1			✓		1			✓			1			100%
	10	Pranata Komputer															0%
	11	Pranata Komputer Ahli Muda	1		✓			0									0%
	12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		✓			1		✓			1				100%
	13	Pranata Humas															0%
	14	Perencana															0%
	15	Perencana Ahli Muda	1		✓			1		✓			1				100%
	16	Analisis Hukum Ahli Pertama	1		✓			0									0%
	17	Analisis Kebijakan															0%
	18	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa															0%
	19	Perancang PUU															0%
6	Jabatan Pelaksana																0%
	Klasifikasi Klerek																0%
	1	Pengelola Keprotokolan	0					0									0%

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P		L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	Penelaah Teknis Kebijakan	32		✓			14		✓							44%
	3	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	28		✓			18		✓							64%
	4	Pengolah data dan informasi	40			✓		14				✓					35%
	5	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	13			✓		6				✓					46%
	6	Pengadministrasi Perkantoran	38					0									0%
	7	Penata Layanan Operasional (PPPK)	13		✓			13		✓			8	5			100%
	8	Pengelola Layanan Operasional	2			✓		1		✓							50%
	9	Pengelola Umum Oprasional	4			✓		0									0%
	10	Penata sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	1				✓	0									0%
	Klasifikasi Operator																0%
	1	Operator Layanan Operasional	38					2				✓	1	1			5%
	2	Pengelola Pencarian dan Pertolongan															0%
	3	Fasilitator Bahasa Isyarat															0%
7	PNS Non Jabatan Fungsional / Jabatan Pelaksana																0%
8	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja																0%
	Fungsional		23														0%
	1	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	5		✓			5		✓			1	4			100%
	2	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	10		✓			10		✓			5	5			100%
		Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	6			✓		6			✓		2	4			100%
	4	Arsiparis Penyelia	1					0									0%

No	Jabatan		Kebutuhan Formasi				Ketersediaan				Jenis Kelamin		Disabilitas (jika ada)		Rasio		
			Jmlh	Kualifikasi				Jmlh	Kualifikasi								
				S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	L	P		L	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	Arsiparis Terampil	1					0									0%
	Penata Layanan Operasional (PPPK)		13		✓			13		✓			8	5			100%
	Pengelola Layanan Operasional		10			✓		1			✓		1				10%
	Pengelola Umum Oprasional		4					2				✓	2				50%
	Pengadministrasi Perkantoran		5				✓	5					4	1			100%
9	Tenaga Non ASN		39				✓	39		✓		✓	33	6			100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali Tahun 2025

Tabel 2. 2
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Sekolah Dasar	4
2	SLTP	1
3	SLTA	46
4	Sarjana Muda/D.III/D.II	12
5	Sarjana (S1)/D.IV	85
6	Pasca Sarjana (S2)	28
7	Doktoral (S3)	0
	Jumlah	176

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali Tahun 2025

Tabel 2. 3
Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Golongan IV	19
2	Golongan III	65
3	Golongan II	10

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
4	Golongan I	0
5	Golongan XI (PPPK)	1
6	Golongan IX (PPPK)	28
7	Golongan VII (PPPK)	8
8	Golongan V (PPPK)	5
9	Golongan I (PPPK)	2
	Jumlah	138

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025

2. Aset Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Selain sumber daya manusia, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali juga didukung oleh berbagai aset daerah berupa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas teknis, pelayanan publik, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Aset tersebut tersebar di Kantor Pusat Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta sejumlah lokasi pesisir strategis.

Sarana dan prasarana yang dimiliki dapat di kategorikan sesuai dengan klasifikasinya meliputi antara lain:

Tabel 2. 4
Kategori Barang Milik Daerah (BMD) Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Klasifikasi

NO	BARANG MILIK DAERAH (BMD)	JUMLAH	NILAI (Rp.)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Komputer	115 Unit	1.161.648.863
2	Alat Angkutan	22 Unit	2.530.076.996
3	Alat Pertanian	2 Unit	13.980.000
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	342 Unit	1.609.785.234
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	33 Unit	248.171.071
6	Alat Laboratorium	14 Unit	148.775.380
7	Alat Persenjataan	3 Unit	11.500.000
	Total	531Unit	5.723.937.544
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA			
1	Komputer	13 Unit	103.923.200
2	Peralatan Proses/Produksi	4 Unit	47.849.999

NO	BARANG MILIK DAERAH (BMD)	JUMLAH	NILAI (Rp.)
3	Alat Angkutan	5 Unit	543.585.000
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6 Unit	107.572.800
5	Alat Pertanian	5 Unit	19.700.000
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	62 Unit	261.045.450
7	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	6 Unit	12.225.300
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	4 Unit	20.900.000
9	Alat Laboratorium	20 Unit	105.416.000
Total		125 Unit	1.222.217.749
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN			
1	Komputer	32 Unit	286.596.130
2	Alat Angkutan	4 Unit	344.316.000
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2 Unit	20.625.000
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	131 Unit	506.349.060
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17 Unit	55.249.550
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	3 Unit	7.400.000
7	Alat Laboratorium	41 Unit	6.942.541.388
Total		230 Unit	8.163.077.128
UPTD PELABUHAN PERIKANAN			
1	Komputer	4 Unit	60.030.000
2	Alat Angkutan	2 Unit	239.750.000
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	26 Unit	137.612.125
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	68 Unit	3.644.187.250
5	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1 Unit	12.650.000
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1 Unit	1.540.000
7	Alat Laboratorium	1 Unit	1.760.000
Total		103 Unit	4.097.529.375
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI			
1	Komputer	7 Unit	94.150.000
2	Alat Bantu Eksplorasi	3 Unit	32.700.000
3	Alat Keselamatan Kerja	18 Unit	313.579.640
4	Alat Angkutan	6 Unit	1.265.661.750
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	275 Unit	1.006.703.873
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24 Unit	304.255.720
7	Alat Persenjataan	10 Unit	125.912.000
Total		343	3.142.962.983
TOTAL KESELURUHAN		1.332 Unit	22.349.724.779

Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

Tabel 2. 5
Kategori Aset Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	ASET DAERAH	LUAS (M ²)	LOKASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	Jl A Yani Singaraja
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.039	Jl Patimura 77 Denpasar
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500	Jl. By Pass I B. Mantra, Lebih, Sukawati, Gianyar
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.900	Jl. Ds. duda, Duda, Selat/Karangasem

NO	ASET DAERAH	LUAS (M ²)	LOKASI
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	Jl. Menuju Pantai Tumbu, Tumbu/Karangasem
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	650	Jl. Ngurah Rai, Dauh Waru, Negara
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	500	Jl. Raya Pel. Gilimanuk, Jineng Agung, Gilimanuk, Melaya, Negara
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	420	Kutapang Kangin, Batununggul/Nusa Penida
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.080	Pesinggahan, Dawan, Klungkung
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	400	PPI Desa Sangsit, Kabupaten Buleleng
11	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	26.400	Desa Kumbanding, Negara
12	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	85	Desa Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, Kab. Karangasem
13	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	100	Senganan Kanginan/Penebel/Tabanan
14	Tanah Tegalan	305	Klungkung\Nusa Penida\Ds. Sakti
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.600	Sangeh/Abiansemal/Badung
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	6.900	Desa Sangeh, Abiansemal, Badung
3	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	13.330	Sangeh/Abiansemal/Badung
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.100	Jalan Kapten Tantular No 11 Niti Mandala Renon
UPTD PELABUHAN PERIKANAN			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.335	UPTD PPI Sangsit Buleleng
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	900	UPTD. KKP Bali Nusa Penida Klungkung

Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

Pemanfaatan aset ini bertujuan mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas perangkat daerah, termasuk pengawasan pemanfaatan ruang laut, pembinaan usaha perikanan, serta pelayanan publik terkait perizinan dan pengembangan kapasitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2020–2024, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan sejumlah program prioritas yang berfokus pada peningkatan produktivitas perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi pesisir

dan laut, pengawasan sumber daya kelautan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan. Capaian indikator kinerja utama dan kinerja kunci perangkat daerah di antaranya:

- a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan (IKU) Pemerintah Provinsi Bali

Tabel 2. 6
KERTAS KERJA HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TUJUAN (IKU) PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja										Keterangan
		Target					Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	5,75 (5,25-6,25)	- 12,21	- 2,47	4,84	5,71	5,48	Indikator Sasaran Pemerintah Provinsi Bali
Angka Inflasi	Angka	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1	2,01	3	4,63	2,77	2,34	Indikator Sasaran Pemerintah Provinsi Bali
Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	23,58: 25,46	N/A	N/A	N/A	N/A	23,58	Indikator Baru Perencanaan Tahun 2025-2029

Sumber : Diskelkan Bali Tahun 2025

Pada level Indikator Kinerja Utama Tujuan (IKU Tujuan) Pemerintah Provinsi Bali, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar -12,21 persen akibat pandemi COVID-19. Namun, kondisi tersebut berangsur pulih pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 5,48 persen pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 5,71 persen. Sementara itu, angka inflasi relatif terkendali sesuai target 3±1 persen, dengan capaian terbaik pada tahun 2020 sebesar 2,01 persen dan capaian tahun 2024 sebesar 2,34 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat dapat terjaga dengan baik. Pada tahun 2024 juga mulai diperkenalkan Indeks Ekonomi Biru (IBEI) dengan capaian awal 23,58, yang menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan sektor kelautan pada periode 2025–2029.

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 7
KERTAS KERJA HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
TAHUN 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
		Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	4,92	5,12	5,34	5,56	5,79	4,20	5,00	4,74	4,42	4,27
Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	6	6	6	6	6	0	1,34	7	17	28,49
Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,18	100,19	100,20	100,21	100,22	99,27	100,20	100,45	100,53	91,65
Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2	2	2	2	2	0,0021	0,023	0	0,0085	0,0031
Penunjang Kesekretariatan											
Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	77	78	79	80	81	77	78	78	78	81

Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB daerah masih belum menunjukkan peningkatan signifikan, dengan capaian 4,27 persen pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan target 5,79 persen. Sebaliknya, pemanfaatan ruang laut meningkat tajam, melampaui target 6 persen dan mencapai 28,49 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan efektivitas penataan ruang laut di Provinsi Bali. Nilai Tukar Nelayan (NTN) relatif stabil pada periode 2020–2023, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 91,65, yang menandakan meningkatnya beban biaya produksi dibandingkan dengan pendapatan nelayan. Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan masih sangat rendah, jauh dari target 2 persen setiap tahunnya. Meski demikian, pengelolaan internal melalui nilai evaluasi manajemen kinerja menunjukkan perbaikan konsisten, mencapai 81 pada tahun 2024 sesuai target yang ditetapkan.

c. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2. 8
KERTAS KERJA HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2020 -
2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja										Keterangan
		Target					Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	1,75	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.229,54	18.601,58	18.981,20	19.360,82	N/A	31.862,23	27.362,47	32.060,08	35.517,02	N/A	Periode 2018-2023
Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air payau/laut	Komoditas	3	3	3	3	N/A	3	3	3	3	N/A	Periode 2018-2023
Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2,22	Periode Transisi 2024-2026
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn	32,2	32,38	33,52	34,86	49,29	38,83	44,81	46,63	47,09	51,13	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah produk perikanan bersertifikat	SKP	140	145	149	151	N/A	302	309	282	189	N/A	Periode 2018-2023
Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah Hasil Uji yang dikeluarkan	Sample	4800	4900	4950	5000	N/A	5119	5224	2955	2680	N/A	Periode 2018-2023
Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	44	N/A	N/A	N/A	N/A	44	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	Kawasan	0	2	4	5	N/A	0	2	2	4	N/A	Periode 2018-2023
Persentase Efektivitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	71	N/A	N/A	N/A	N/A	76,49	Periode Transisi 2024-2026
Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	1	1	1	1	N/A	1	1	1	2	N/A	Periode 2018-2023
Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	3,03	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	101.001,92	103.063,18	105.166,51	107.269,84	N/A	95.973,24	113.041,96	124.010,15	120.816,25	N/A	Periode 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja										Keterangan
		Target					Realisasi					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Pelabuhan	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	N/A	Periode 2018-2023
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persen	2	2	2	2	2	0,0021	0,023	0	0,0085	0,0031	Periode Transisi 2024-2026
Jumlah pelaku usaha taat Hukum	Pelaku Usaha	0	0	18	23	N/A	0	0	0	23	N/A	Periode 2018-2023
Penunjang Kesekretariatan												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	78	79	80	81	77	78	78	78	81	

Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

Selanjutnya, pada Indikator Kinerja Kunci (IKK), kinerja produksi perikanan budidaya menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana capaian produksi mencapai lebih dari 35 ribu ton pada tahun 2023, jauh melebihi target tahunan yang hanya sekitar 19 ribu ton. Tingkat konsumsi ikan masyarakat juga terus meningkat hingga 51,13 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 49,29 kilogram. Namun demikian, jumlah produk perikanan bersertifikat justru mengalami penurunan dari 302 produk pada tahun 2020 menjadi hanya 189 produk pada tahun 2023, yang menunjukkan masih adanya kendala pada aspek sertifikasi produk. Produksi perikanan tangkap berfluktuasi dengan capaian tertinggi 124 ribu ton pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 120 ribu ton pada tahun 2023. Sementara itu, pengelolaan kawasan konservasi perairan terus menunjukkan perbaikan, dengan peningkatan jumlah kawasan dan efektivitasnya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 76,49 persen, melampaui target 71 persen.

d. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Tabel 2. 9
KERTAS KERJA HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
(IKD) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN
2020 - 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja									
		Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Produksi Perikanan	Ton	119.231,46	121.664,76	124.147,71	126.630,66	136.341,20	127.835,47	140.404,43	156.070,23	156.333,27	152.546,46
Konsumsi Ikan	Kg/Kpt/Thn	32,2	32,38	33,52	34,86	49,29	38,83	44,81	46,63	47,09	51,13
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	70	80	90	100	100	100	100	Tidak ada Pembinaan	Tidak ada Pembinaan	29,19
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	70	80	97	100	82	118	78	79	75	81
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Persen	101.082,77	103.104,42	105.166,51	107.269,84	104.897,51	95.973,24	99.902,39	100.801,60	107.375,08	105.406,88
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	2,32	2,32	2,32	4,9	4,9	2,32	2,32	2,32	4,9	4,9
Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,18	100,19	100,20	100,21	100,22	99,27	100,20	100,45	100,53	91,65
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Persen	101,20	102,21	103,23	104,27	105,31	102,37	100,61	100,68	105,19	107,72

Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2020–2024, dilakukan analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.9. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat direalisasikan secara optimal, serta mengungkap tren, keberhasilan, dan tantangan yang dihadapi selama lima tahun pelaksanaan.

Melalui pendekatan evaluatif ini, dapat dirumuskan pembelajaran penting yang menjadi dasar perbaikan strategi dan arah kebijakan pada

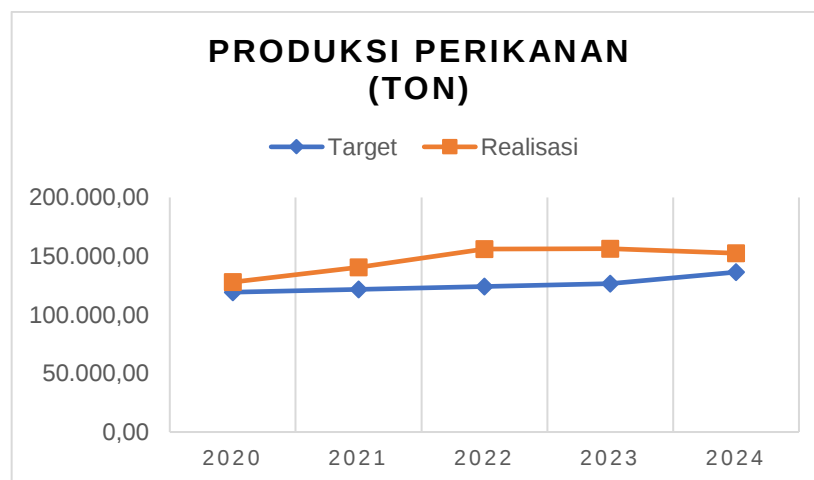
periode perencanaan berikutnya, khususnya dalam penyusunan Renstra 2025–2029. Setiap indikator dianalisis berdasarkan kesesuaian antara target dan realisasi, konsistensi capaian, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, baik internal maupun eksternal.

a. Produksi Perikanan

Target produksi perikanan Provinsi Bali menunjukkan tren meningkat dari 119.231 ton pada tahun 2020 menjadi 136.341 ton pada tahun 2024. Realisasi produksi justru melampaui target, dengan capaian tertinggi 156.333 ton pada tahun 2023 sebelum sedikit menurun menjadi 152.546 ton pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan kinerja positif meskipun terdapat fluktuasi, dan tetap mengindikasikan potensi besar sektor perikanan dalam menopang ekonomi daerah.

Berikut Grafik/Tren dalam Produksi Perikanan di Provinsi Bali pada Tahun 2020-2024:

Gambar 2. 6
Produksi Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020-2024



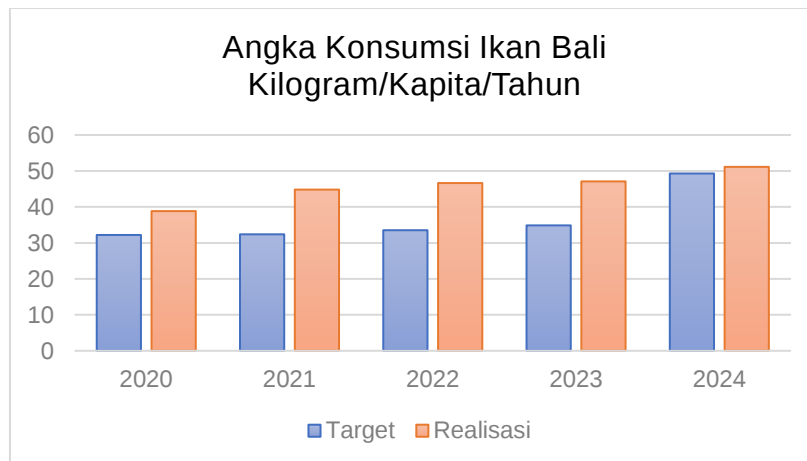
Sumber: Satu Data KKP, 2025

b. Konsumsi Ikan

Target konsumsi ikan masyarakat Bali ditetapkan naik bertahap dari 32,2 kg/kapita/tahun pada 2020 menjadi 49,29 kg/kapita/tahun pada 2024. Realisasi menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target, dengan peningkatan signifikan hingga 51,13 kg/kapita/tahun di tahun 2024. Hal ini menandakan meningkatnya kesadaran gizi masyarakat serta membaiknya

akses terhadap produk perikanan. Grafik/Tren dalam Konsumsi Ikan di Provinsi Bali pada Tahun 2020-2024:

Gambar 2. 7
Angka Konsumsi Ikan Provinsi Bali



Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

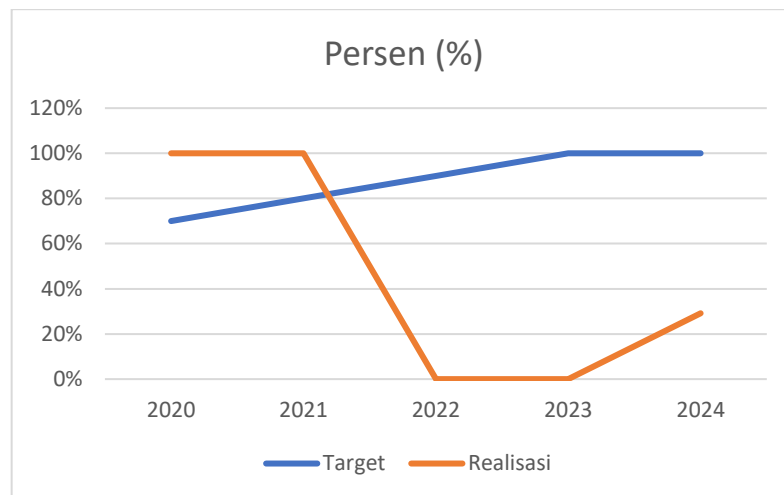
c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Indikator ini menggambarkan seberapa besar persentase kelompok nelayan yang mendapatkan layanan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam kurun waktu tahun 2020–2024. Capaian menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian mencapai 100%, bahkan melampaui target yang masing-masing ditetapkan sebesar 70% dan 80%. Ini menandakan pembinaan berjalan maksimal dan menyeluruh pada dua tahun awal periode Renstra.

Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terjadi kekosongan kegiatan pembinaan, yang mengakibatkan realisasi sebesar 0%. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan *refocusing* anggaran, transisi program, dan pandemi covid-19. Di tahun 2024, meskipun target tetap ditetapkan sebesar 100%, realisasi baru mencapai 29,19%, mengindikasikan upaya pemulihan telah dimulai namun belum optimal.

Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi dalam pendampingan kelompok nelayan akan sangat memengaruhi keterlibatan pelaku utama dalam pembangunan sektor perikanan.

Gambar 2. 8
Cakupan Bina Kelompok Nelayan

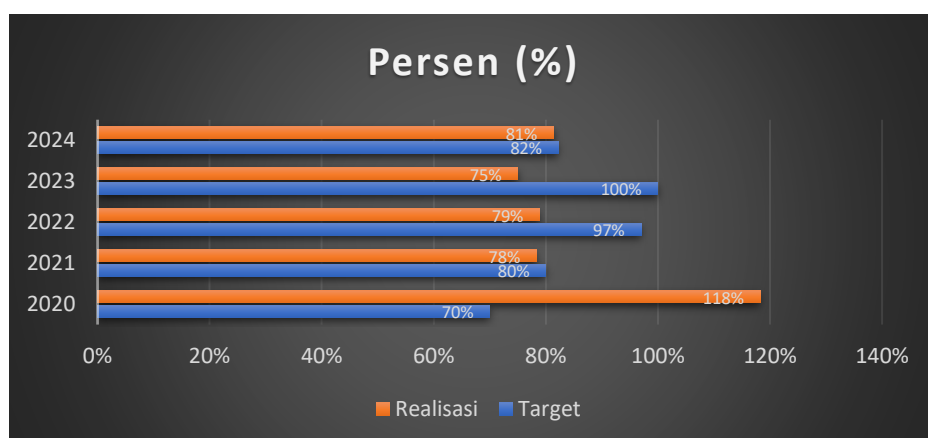


Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator ini mengukur seberapa besar kontribusi produksi kelompok nelayan terhadap total target produksi yang direncanakan. Capaian produksi oleh kelompok nelayan sangat baik di awal periode, namun mengalami penurunan tajam dan stagnasi di pertengahan masa Renstra. Rendahnya capaian 2021–2023 menunjukkan terbatasnya dukungan teknis dan permodalan, serta akibat pandemi covid-19. Pemulihan di tahun 2024 mencerminkan bahwa intervensi program kelompok sudah mulai berjalan kembali, meskipun belum maksimal.

Gambar 2. 9
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan



Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

e. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Indikator ini menunjukkan seberapa besar volume tangkapan ikan yang masih berada dalam ambang batas pemanfaatan yang lestari sesuai prinsip pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan perikanan tangkap di Provinsi Bali berada pada jalur yang cukup aman dan sesuai prinsip konservasi, dengan mengedepankan aspek tata kelola berbasis ilmiah dan kehati-hatian terhadap potensi eksploitasi berlebih (*overfishing*).

Capaian indikator ini relatif stabil dan mendekati target setiap tahun, bahkan melampaui target pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini mencerminkan adanya pemantauan stok ikan yang baik, serta peran pengawasan dan sistem data tangkapan yang mendukung.

Gambar 2. 10
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman



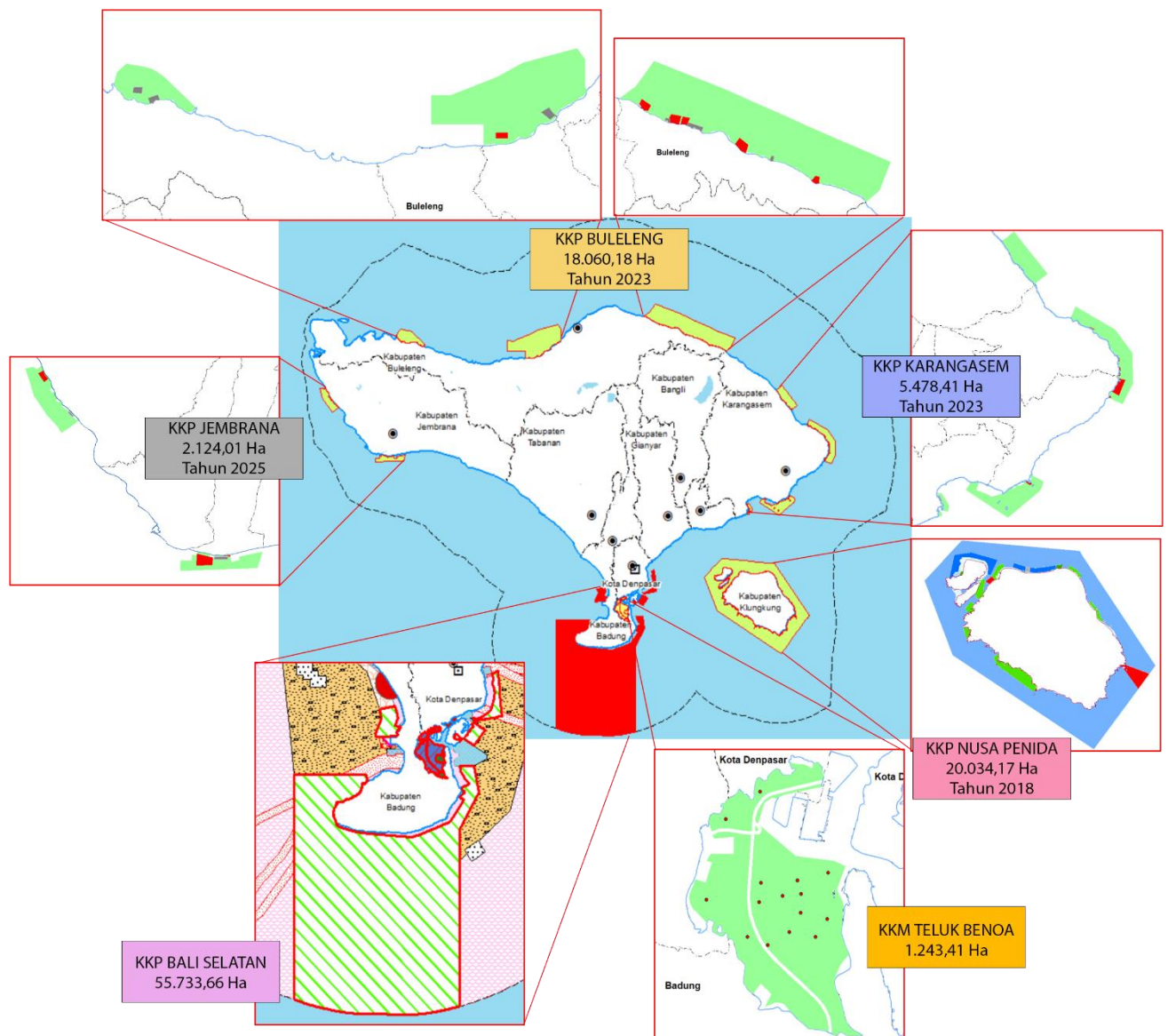
Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

f. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Rasio ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung target kawasan konservasi laut sesuai rencana zonasi dan arah

pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi rasio kawasan lindung perairan tetap di angka 2,32%, mencerminkan belum ada perluasan kawasan konservasi baru. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi lonjakan signifikan menjadi 4,90%, menunjukkan perluasan atau penetapan kawasan lindung baru yang berdampak positif bagi pelestarian ekosistem laut.

Gambar 2. 11
Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial



Sumber: Diskelkan Bali Tahun 2025

g. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan mencerminkan keseimbangan antara pendapatan yang diterima dari hasil usaha nelayan dengan biaya produksi dan konsumsi. NTN yang berada di atas 100 menunjukkan bahwa nelayan memiliki surplus usaha.

Tahun 2020–2023, nilai NTN stabil dengan rata-rata di atas 100, dengan puncaknya pada 2023 sebesar 100,52%, menunjukkan situasi ekonomi yang cukup menguntungkan bagi nelayan. Namun pada tahun 2024, nilai NTN turun drastis menjadi 91,65%, yang berarti nelayan mengalami tekanan ekonomi, hal ini terjadi akibat naiknya harga input produksi, hasil tangkapan menurun, dan harga jual yang tidak kompetitif.

Gambar 2. 12
Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Bali



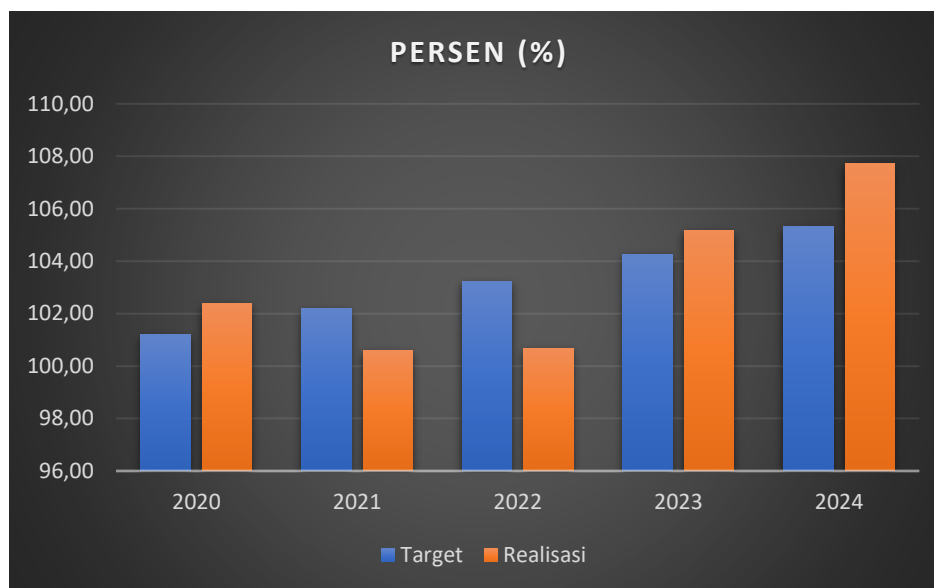
Sumber: Satu Data KKP, 2025

h. Nilai Tukar Pembudidaya

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan menggambarkan keseimbangan antara pendapatan yang diterima dari hasil usaha budidaya dengan biaya produksi serta konsumsi rumah tangga. NTPi yang berada di atas 100 menandakan bahwa pembudidaya ikan memperoleh surplus usaha. Pada periode 2020–2022, nilai NTPi cenderung fluktuatif namun masih berada sedikit di atas 100, menunjukkan kondisi usaha yang relatif stabil meskipun belum optimal. Mulai tahun 2023, nilai NTPi meningkat signifikan dan

mencapai 107,72% pada 2024, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pembudidaya ikan semakin menguntungkan, didukung oleh efisiensi produksi, membaiknya harga jual komoditas budidaya, serta meningkatnya permintaan pasar.

Gambar 2. 13
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bali



Satu Data KKP, 2025

Capaian indikator kinerja daerah (IKD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi dan mencerminkan kombinasi antara keberhasilan, tantangan implementatif, dan potensi perbaikan ke depan. Beberapa indikator mencatat tren capaian yang positif dan konsisten, sementara indikator lainnya mengalami fluktuasi atau bahkan stagnasi pada periode tertentu.

Secara keseluruhan berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, capaian indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali periode 2020–2024 menunjukkan keberhasilan pada aspek peningkatan konsumsi ikan, pemanfaatan ruang laut, dan produksi budidaya. Namun, tantangan masih terlihat pada kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta penurunan Nilai Tukar Nelayan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi

yang lebih terarah dalam meningkatkan nilai tambah, memperkuat pembinaan kelompok nelayan, serta memperluas akses pasar dan sertifikasi produk perikanan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan memiliki mandat untuk memberikan layanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Kelompok sasaran layanan mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan perangkat daerah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun ekologi.

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam periode Rencana Strategis Tahun meliputi:

1. Nelayan

Kelompok ini mencakup nelayan kecil dan tradisional yang menjadi ujung tombak perikanan tangkap di wilayah pesisir Bali. Mereka menjadi prioritas dalam hal pemberdayaan, fasilitasi alat tangkap ramah lingkungan, perlindungan sosial, peningkatan nilai tukar, dan jaminan keselamatan saat melaut.

2. Pembudidaya Ikan

Kelompok ini terdiri dari individu maupun kelompok yang bergerak di sektor budidaya perikanan air laut maupun air payau. Dukungan diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, kualitas benih, teknologi budidaya, pengendalian penyakit ikan, dan akses terhadap pasar.

3. Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UMKM Kelautan dan Perikanan)

Kelompok ini mencakup unit usaha rumah tangga, koperasi, dan industri kecil yang mengelola produk olahan hasil perikanan. Layanan diarahkan pada penguatan hilirisasi, peningkatan mutu, sertifikasi, promosi, serta pengembangan *e-commerce* dan logistik rantai dingin.

4. Petambak Garam dan Pelaku Usaha Kelautan Tradisional

Termasuk di dalamnya pengrajin garam tradisional, pelaut perikanan, dan kelompok usaha kelautan lainnya. Fokus layanan mencakup penguatan kelembagaan, revitalisasi tambak, serta dukungan terhadap kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya laut.

5. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kelompok strategis dalam program konservasi, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan wilayah berbasis kearifan lokal. Program-program edukasi, partisipasi dalam pengawasan sumber daya laut, dan pelibatan dalam pengelolaan kawasan konservasi menjadi fokus pelayanan.

6. Kelompok Perempuan dan Pemuda Bahari

Sebagai upaya mendorong kesetaraan dan regenerasi pelaku utama, kelompok perempuan dan pemuda di sektor kelautan dan perikanan juga menjadi sasaran layanan strategis. Pelibatan mereka diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas, dan fasilitasi akses terhadap teknologi serta pembiayaan usaha.

Sebagaimana terlampir pada perumusan Kertas Kerja Kelompok Kerja Sasaran Penerima Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. **(Lampiran I)**

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan Dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemetaan terhadap berbagai mitra strategis yang terdiri dari komunitas, organisasi masyarakat, lembaga riset, instansi vertikal, perguruan tinggi, hingga dunia usaha.

Pada kelompok komunitas, terdapat *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia yang berperan dalam pengawasan praktik perikanan berkelanjutan. Untuk kategori organisasi masyarakat, organisasi sosial,

keagamaan, dan forum, tercatat beberapa mitra penting, antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali, Kesatuan Pelaut dan Pekerja Perikanan Indonesia (KP3I), serta Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sementara itu, dari unsur instansi perangkat daerah maupun instansi vertikal, tercatat berbagai lembaga teknis yang memiliki peran signifikan, seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa, serta berbagai balai riset dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lainnya. Kehadiran instansi ini mendukung upaya riset, pengawasan, produksi, serta penyuluhan bagi masyarakat perikanan di Bali.

Dari unsur perguruan tinggi, akademisi, dan praktisi, beberapa institusi pendidikan turut menjadi mitra, antara lain Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana, Universitas Warmadewa, Universitas Pendidikan Ganesha, serta *MERO Foundation* yang bergerak dalam riset dan edukasi kelautan. Keterlibatan dunia akademis menjadi penting dalam penyediaan data ilmiah, pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun dari unsur dunia usaha, terdapat Gabungan Pengusaha Wisata Tirta (Gahawisri) Provinsi Bali serta Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Benoa. Kedua mitra ini berperan dalam mendukung kegiatan usaha perikanan dan wisata bahari secara berkelanjutan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan. **(Lampiran II Kertas Kerja Pemetaan Mitra Pembangunan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali).**

Dengan adanya pemetaan mitra pembangunan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan di Bali.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbab ini mengidentifikasi dan merumuskan berbagai permasalahan serta isu strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Permasalahan yang disajikan merupakan hasil analisis terhadap capaian pelayanan 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024), kondisi eksisting sektor kelautan dan perikanan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penjangkaran aspirasi masyarakat pesisir.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, Hindia dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumber daya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumber daya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumber daya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumber daya tidak dapat pulih di antaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumber daya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir, dalam perumusan permasalahan dapat di bagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu 1. Masalah Pokok, 2. Masalah, dan 3. Akar Masalah seperti yang terlihat pada Tabel 2.10 di bawah:

Tabel 2. 10
KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3		4	
1	Belum terwujudnya kesehatan lingkungan, ketahanan pangan, serta produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang optimal.	1.1	Lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi degradasi ekosistem, pencemaran, dan pemanfaatan yang kurang berkelanjutan	1.1.1	Pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem dan konservasi untuk keberlanjutan belum optimal
				1.1.2	Aktualisasi tradisi, budaya bahari, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal semakin luntur
				1.1.3	Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan dari hulu sampai hilir belum berkembang secara optimal, sehingga pengelolaan ruang pesisir tidak terintegrasi
				1.1.4	Pengawasan terhadap pencemaran laut dan alih fungsi kawasan pesisir belum efektif
		1.2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB provinsi masih rendah karena produktivitas dan nilai tambah belum optimal	1.2.1	Produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan
				1.2.2	Eksplorasi dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dimaksimalkan
				1.2.3	Pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan
				1.2.4	Tingkat konsumsi ikan masyarakat belum optimal
				1.2.5	Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan dari hulu ke hilir belum sepenuhnya terintegrasi sehingga kontribusi ekonomi belum maksimal
		1.3	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya berdaulat dan masih lemah dalam aspek tata kelola, perlindungan nelayan, serta penegakan aturan	1.3.1	Pembangunan kelautan dan perikanan belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola yang efektif, terutama pada aspek kebijakan dan regulasi
				1.3.2	Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pengrajin garam masih belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3		4	
				1.3.3	Pelaku utama kelautan dan perikanan cenderung menurun seiring meningkatnya peluang di sektor pariwisata
				1.3.4	Penegakan hukum dan sistem pengawasan belum efektif
		1.4	Daya saing produk olahan hasil perikanan masih rendah akibat hilirisasi, teknologi, jaringan pemasaran, dan kualitas SDM yang belum optimal	1.4.1	Hilirisasi produk perikanan, jaringan, dan outlet pemasaran belum berkembang secara optimal sehingga nilai tambah belum maksimal
				1.4.2	Akses masyarakat terhadap pembiayaan dan permodalan usaha masih menghadapi keterbatasan
				1.4.3	Penerapan teknologi dan modernisasi perikanan belum merata
				1.4.4	Kapasitas dan kualitas SDM, terutama di bidang pengolahan, manajemen, dan pemasaran, masih perlu ditingkatkan
				1.4.5	Inovasi dalam pengembangan produk olahan berbasis riset dan teknologi masih terbatas
				1.4.6	Ketersediaan infrastruktur rantai dingin dan distribusi masih belum memadai sehingga daya simpan dan kualitas produk belum terjaga optimal

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi

dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas/mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diperlukan sebagai sumber bahan perencanaan yang bersifat *top down* tetapi juga bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. Sifat holistik dari perencanaan pembangunan hendaknya juga memperhatikan aktivitas daerah lain baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antar daerah. Dalam menentukan Isu Strategis digunakan kertas kerja yang disimpulkan dari :

- a. Permasalahan Perangkat Daerah;
- b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional)
- c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2. 11
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan dengan Konsep Tri Hita Karana	1. Pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem dan konservasi untuk keberlanjutan belum optimal 2. Aktualisasi tradisi, budaya bahari, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal semakin luntur 3. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan dari hulu sampai hilir belum berkembang secara optimal, sehingga pengelolaan ruang pesisir tidak terintegrasi 4. Pengawasan terhadap pencemaran laut dan alih fungsi kawasan pesisir belum efektif	Pengarusutamaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati belum optimal	Perubahan iklim, pencemaran laut, hilangnya keanekaragaman hayati laut	Fragmentasi zonasi laut nasional, perubahan kebijakan konservasi	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Penguatan tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekosistem dan wilayah pesisir terpadu
	1. Pembangunan kelautan dan perikanan belum sepenuhnya didukung oleh tata kelola yang efektif, terutama pada aspek kebijakan dan regulasi 2. Penegakan hukum dan sistem pengawasan belum efektif	Pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim belum optimal	Perubahan pola cuaca laut global dan pemanasan laut	Kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim sektor kelautan	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Adaptasi sektor perikanan terhadap perubahan iklim dan ketahanan ekosistem
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan 2. Eksplorasi dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dimaksimalkan 3. Pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan 4. Tingkat konsumsi ikan masyarakat belum optimal 5. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan dari hulu ke hilir belum sepenuhnya terintegrasi sehingga kontribusi ekonomi belum maksimal	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal	Fluktuasi harga global dan tekanan pasar ekspor	Kebutuhan modernisasi teknologi perikanan nasional	Rendahnya kapasitas teknologi lokal	Transformasi ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Penerapan teknologi dan modernisasi perikanan belum merata 2. Inovasi dalam pengembangan produk olahan berbasis riset dan teknologi masih terbatas 3. Ketersediaan infrastruktur rantai dingin dan distribusi masih belum memadai sehingga daya simpan dan kualitas produk belum terjaga optimal	Prasarana dan sarana wilayah kurang memadai	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Penguatan kebijakan satu data kelautan nasional	Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur	Digitalisasi layanan, data spasial, dan sistem informasi kelautan yang terintegrasi
Pengembangan ekonomi kreatif	1. Hilirisasi produk perikanan, jaringan, dan outlet pemasaran belum berkembang secara optimal sehingga nilai tambah belum maksimal 2. Akses masyarakat terhadap pembiayaan dan permodalan usaha masih menghadapi keterbatasan	Perekonomian daerah masih rendah	Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan dengan pendekatan hilirisasi
	1. Pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan masih perlu ditingkatkan	Perekonomian daerah masih rendah	Persaingan nilai ekspor perikanan dan ekonomi biru	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Ketahanan Perekonomian Bali	Peningkatan kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
SDM Bali yang berkualitas dan cakap teknologi	1. Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pengrajin garam masih belum optimal 2. Pelaku utama kelautan dan perikanan cenderung menurun seiring meningkatnya peluang di sektor pariwisata 3. Kapasitas dan kualitas SDM, terutama di bidang pengolahan, manajemen, dan pemasaran, masih perlu ditingkatkan	Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial belum optimal	Demografi Global dan Bonus Demografi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Ketimpangan kapasitas antarwilayah kabupaten/kota	Penguatan kelembagaan pelaku utama dan literasi wirausaha kelautan
Kearifan lokal budaya bahari Bali (Segara Kerthi)	1. Aktualisasi tradisi, budaya bahari, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal semakin luntur	Pembangunan hukum dan tata kelola belum optimal	Globalisasi nilai budaya dan wisata massal	Belum terintegrasinya budaya lokal dalam kebijakan	Komersialisasi budaya pesisir dan modernisasi	Reaktualisasi nilai budaya bahari Bali dalam pengelolaan sumber daya laut

Berdasarkan tabel 2.4 adapun isu-isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekosistem dan wilayah pesisir terpadu;

2. Adaptasi sektor perikanan terhadap perubahan iklim dan ketahanan ekosistem;
3. Transformasi ekonomi biru melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi;
4. Digitalisasi layanan, data spasial, dan sistem informasi kelautan yang terintegrasi;
5. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan dengan pendekatan hilirisasi;
6. Peningkatan kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
7. Penguatan kelembagaan pelaku utama dan literasi wirausaha kelautan;
8. Reaktualisasi nilai budaya bahari Bali dalam pengelolaan sumber daya laut.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tujuan dan sasaran strategis Renstra berdasarkan visi dan misi daerah, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 2025–2029.



BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan dan sasaran untuk pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, yaitu:

Visi : *“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”*

Misi Terkait : Misi ke 12 yaitu Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.

Berdasarkan tahapan dan cara penyusunan tujuan dan sasaran, maka ditetapkan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029 sebagai berikut :

Tujuan : “Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merumuskan sejumlah Sasaran Strategis yang akan dicapai selama periode perencanaan 2025–2029. Sasaran ini berfungsi sebagai jembatan antara tujuan umum yang bersifat makro dengan kebijakan operasional dan program yang akan dilaksanakan.

Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	25,47	27,5	29,7	32,08	34,65	37,42	Dashboard IBEI Provinsi Bali
		Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	4,9%	5,13%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/ Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%
		Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi	Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)	4,44%	4,62%	4,80%	5,00%	5,20%	5,40%	Data Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB) dari BPS
		Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha	5,28%	18,96%	19,60%	20,05%	20,54%	20,86%	$X_{kp} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) / 4$
		Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali	27,07%	27,61%	28,16%	28,73%	29,30%	29,89%	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*

Berdasarkan Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif;
2. Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
3. Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi;
4. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan.

Sasaran Strategis untuk menunjang kegiatan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik.

Secara detail terkait Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat dilihat pada **Lampiran III Tabel 3.1** Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada subbab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu

Tabel 3. 2
Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI		
Tujuan	:	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan			
Indikator Tujuan	:	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)			
Sasaran	1	Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif	1.1	Penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis ekosistem	
			1.2	Adaptasi iklim dan rehabilitasi ekosistem	
			1.3	Revitalisasi budaya bahari dalam perlindungan wilayah pesisir	
	2	Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	2.1	Pengelolaan stok ikan berbasis ekosistem	
			2.2	Penguatan kapasitas nelayan dalam adaptasi iklim	
			2.3	Penyediaan infrastruktur dan sarana adaptif	
	3	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi	3.1	Transformasi ekonomi biru	
			3.2	Pengembangan kawasan komoditas unggulan	

TUJUAN/SASARAN			STRATEGI	
			3.3	Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan
	4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	4.1	Penguatan pengawasan, data spasial, dan kelembagaan
			4.2	Digitalisasi sistem pemantauan dan pengelolaan
			4.3	Kedaulatan sumber daya berbasis wilayah dan budaya lokal
	5	Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan	5.1	Penguatan hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan
			5.2	Inovasi produk, promosi, dan kemitraan usaha
			5.3	Digitalisasi pemasaran dan logistik rantai dingin

Penahapan pembangunan merupakan bentuk prioritas tahunan yang disusun secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Penahapan ini menjadi dasar dalam pengaturan urutan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun selama periode Rencana Strategis. Adapun penahapan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3
Penahapan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Input	Proses	Standar Layanan	Mutu Layanan	Kepuasan Layanan
Tema: Penguatan Landasan Transformasi	Tema: Penguatan Tata Kelola	Tema: Penguatan Kualitas Layanan Publik di Sektor- Sektor Prioritas	Tema: Penguatan Layanan Publik yang Inklusif di Sektor-Sektor Prioritas	Tema: Perwujudan Layanan Prima di Sektor-Sektor Prioritas
Penguatan Regulasi untuk Ekosistem dan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Penyusunan regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada kualitas kesehatan ekosistem perikanan	Tersedianya regulasi yang menjamin kelestarian dan kesehatan ekosistem perikanan	Regulasi yang konsisten, aplikatif, dan mendukung keberlanjutan ekosistem	Masyarakat dan pelaku usaha merasakan ekosistem perikanan yang lebih sehat dan lestari
	Penyusunan regulasi terkait ketahanan pangan di sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya regulasi yang mendukung ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan	Regulasi yang mampu menjaga stabilitas pangan berbasis hasil laut	Ketersediaan pangan hasil laut meningkat dan mudah diakses masyarakat

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Input	Proses	Standar Layanan	Mutu Layanan	Kepuasan Layanan
	Penyusunan regulasi terkait peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya regulasi yang mendorong peningkatan produktivitas sektor kelautan	Regulasi yang efektif meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor	Pelaku usaha merasakan peningkatan produktivitas dan keuntungan yang lebih stabil
Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Sinkron dan Terintegrasi	Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya dokumen perencanaan yang sinkron dan selaras antar level pemerintahan	Perencanaan yang terintegrasi, realistis, dan adaptif terhadap kebutuhan sektor	Program pembangunan lebih tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Penguatan Kelembagaan untuk Meningkatkan Tata Kelola Layanan Publik di Sektor Kelautan dan Perikanan	Penyusunan peta proses bisnis kelembagaan	Tersedianya peta proses bisnis yang menjadi acuan tata kelola kelembagaan	Proses bisnis yang efisien, jelas, dan memudahkan koordinasi antar unit	Pelayanan lebih cepat, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh masyarakat
	Penetapan dan penerapan standar pelayanan dinas	Tersedianya standar pelayanan dinas yang terukur dan dapat diakses publik	Layanan dinas yang konsisten, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan	Masyarakat merasa dilayani dengan adil, terbuka, dan sesuai prosedur
	Penyusunan SOP pemerintah sesuai ketentuan Permenpan RB	Tersedianya SOP pemerintah yang sesuai dengan regulasi Permenpan RB	SOP yang jelas, mudah diimplementasikan, dan meningkatkan akuntabilitas layanan	Pengguna layanan merasa prosedur lebih jelas, sederhana, dan tidak membingungkan
Penguatan Kapasitas SDM Aparatur melalui Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pelaksana	Fasilitasi uji kompetensi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana	Tersedianya mekanisme uji kompetensi yang transparan dan akuntabel	Kompetensi SDM yang terverifikasi, profesional, dan sesuai standar jabatan	Masyarakat puas dengan layanan yang diberikan aparatur yang kompeten dan profesional
Penguatan Pendanaan melalui Perluasan dan Penguatan Kemitraan Strategis dengan Berbagai Pemangku Kepentingan	Perluasan dan penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan	Tersedianya skema kemitraan yang memperkuat pendanaan sektor kelautan dan perikanan	Pendanaan yang beragam, berkelanjutan, dan mendukung prioritas sektor	Layanan publik semakin berdaya karena dukungan pendanaan yang berkesinambungan

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Input	Proses	Standar Layanan	Mutu Layanan	Kepuasan Layanan
Standarisasi dan Modernisasi Sarana Prasarana Layanan Publik di Sektor Kelautan dan Perikanan	Standarisasi dan modernisasi sarana prasarana sesuai standar nasional/internasional	Tersedianya sarpras modern yang memenuhi standar nasional/internasional	Sarpras yang andal, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas layanan publik	Masyarakat merasakan layanan lebih cepat, nyaman, dan sesuai standar terbaik

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian	Optimalisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya berbasis efisiensi Dukungan peralatan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan	Selaras dengan strategi transformasi ekonomi biru & hilirisasi
2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan	Melindungi dan memberdayakan wilayah kelautan dan perikanan	Penyusunan dan implementasi RZWP3K secara partisipatif Peningkatan luasan dan efektivitas kawasan konservasi Rehabilitasi ekosistem pesisir: mangrove, lamun, terumbu karang Edukasi budaya bahari dan pelibatan masyarakat adat	Strategi penguatan tata kelola berbasis ekosistem & Budaya Bahari

			Pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan partisipatif	
3	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Mempercepat hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan perikanan	Pengembangan kawasan ekonomi pesisir terpadu Sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan akses pembiayaan UMKM Promosi produk unggulan berbasis budaya lokal Penguatan jaringan distribusi, e-commerce, dan logistik dingin	Strategi pengembangan kawasan hilirisasi dan peningkatan daya saing
4	Kepmen KKP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatkan ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Penerapan EAFM untuk menjaga keberlanjutan stok ikan Penetapan kuota tangkap adaptif terhadap perubahan iklim Penguatan kawasan konservasi perairan sebagai penyangga stok ikan Perluasan jangkauan asuransi nelayan Penguatan kelembagaan nelayan berbasis komunitas dan kearifan lokal Penyediaan early warning system (peringatan dini) untuk cuaca ekstrem dan bencana Peningkatan kapasitas cold storage hemat energi dan rantai pasok perikanan resilien Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring iklim & bencana	Selaras dengan strategi adaptasi iklim & resiliensi perikanan
5	PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Menjamin kedaulatan dan pengelolaan sumber daya kelautan	Penataan izin usaha berbasis zonasi dan daya dukung Penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum Peningkatan sistem informasi pengawasan berbasis wilayah	Sesuai strategi pengawasan, penguatan data spasial, dan kelembagaan

Berdasarkan Tabel 3.4 dan sebagai turunan dari Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dapat di simpulkan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Sasaran 1: Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif			
1.1	Penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis ekosistem	1.1.1	Penyusunan dan implementasi RZWP3K secara partisipatif
1.2	Adaptasi iklim dan rehabilitasi ekosistem	1.2.1	Peningkatan luasan dan efektivitas kawasan konservasi
		1.2.2	Rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang
1.3	Revitalisasi budaya bahari dalam perlindungan wilayah pesisir	1.3.1	Edukasi budaya bahari dan pelibatan masyarakat adat
Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim			
2.1	Pengelolaan stok ikan berbasis ekosistem	2.1.1	Penerapan <i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i> (EAFM) untuk menjaga keberlanjutan stok ikan
		2.1.2	Penetapan kuota tangkap adaptif terhadap perubahan iklim
		2.1.3	Penguatan kawasan konservasi perairan sebagai penyangga stok ikan
2.2	Penguatan kapasitas nelayan dalam adaptasi iklim	2.2.1	Perluasan jangkauan asuransi nelayan
		2.2.2	Penguatan kelembagaan nelayan berbasis komunitas dan kearifan lokal
2.3	Penyediaan infrastruktur dan sarana adaptif	2.3.1	Penyediaan early warning system (peringatan dini) untuk cuaca ekstrem dan bencana
		2.3.2	Peningkatan kapasitas cold storage hemat energi dan rantai pasok perikanan resilien
		2.3.3	Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring iklim dan bencana di sektor perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi			
3.1	Transformasi ekonomi biru	3.1.1	Optimalisasi produksi tangkap dan budidaya berbasis efisiensi
3.2	Pengembangan kawasan komoditas unggulan	3.2.1	Pengembangan kawasan ekonomi pesisir terpadu
3.3	Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan	3.3.1	Penguatan PAD melalui pengelolaan aset dan zona pesisir
		3.3.2	Penguatan konektivitas sektor kelautan dengan pariwisata

Sasaran 4: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan			
4.1	Penguatan pengawasan, data spasial, dan kelembagaan	4.1.1	Penataan izin usaha berbasis zonasi dan daya dukung
		4.1.2	Penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum
4.2	Digitalisasi sistem pemantauan dan pengelolaan	4.2.1	Peningkatan sistem informasi pengawasan berbasis wilayah
4.3	Kedaulatan sumber daya berbasis wilayah dan budaya lokal	4.3.1	Pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan partisipatif
Sasaran 5: Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan			
5.1	Penguatan hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan	5.1.1	Dukungan peralatan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan
5.2	Inovasi produk, promosi, dan kemitraan usaha	5.2.1	Sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan akses pembiayaan UMKM
		5.2.2	Promosi produk unggulan berbasis budaya lokal
5.3	Digitalisasi pemasaran dan logistik rantai dingin	5.3.1	Penguatan jaringan distribusi, e-commerce, dan logistik dingin

Pada Tabel 3.5 tersebut merangkum arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama periode 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah, isu strategis sektoral, serta arah kebijakan nasional dan RPJMD Semesta Berencana. Arah kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah secara lebih operasional. Secara detail terkait Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada **Lampiran IV** Tabel 3.2 Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, rincian program dan kegiatan berdasarkan arah kebijakan tersebut akan diuraikan secara lebih terstruktur pada BAB IV – Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, termasuk indikator kinerja, target capaian, dan estimasi pagu indikatif tahunan. Disertai dengan daftar program/kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

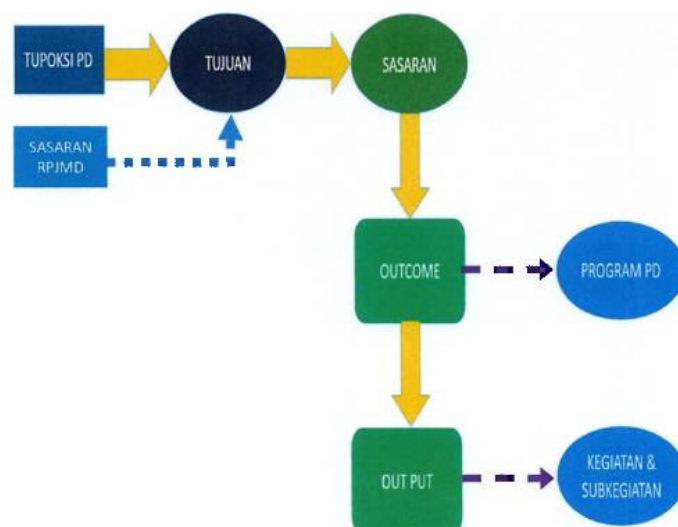
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program pembangunan sektor kelautan dan perikanan disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai serta Strategi dan Arah Kebijakan yang dilakukan, tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Serta melihat berbagai permasalahan serta isu strategis yang disajikan terhadap capaian pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 5 (lima) tahun terakhir (2020–2024), kondisi eksisting sektor kelautan dan perikanan, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penjangkaran aspirasi masyarakat pesisir.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output, serta mengacu pada nomenklatur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Adapun kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

4.2 Uraian Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029, diperlukan pelaksanaan kegiatan yang terencana, terarah, dan terukur. Kegiatan dimaksud merupakan penjabaran operasional dari program Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan gambar 4.1 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara detail yang akan di laksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada **Lampiran V tabel 4.1** Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Terlampir)

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Indikator, Target, dan Pagu

Indikatif

Sub kegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan dan penganggaran yang menjadi dasar pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah. Penyusunan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun secara sistematis berdasarkan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta dikaitkan langsung dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran (pagu indikatif) selama periode 2025–2029.

Indikator dan target sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah secara terukur, terarah, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pagu indikatif disusun sebagai estimasi pembiayaan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan skala prioritas, kapasitas fiskal daerah, dan efisiensi anggaran. Seluruh informasi tersebut disajikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penganggaran perangkat daerah.

Secara detail Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya di sajikan pada **Lampiran VI Tabel 4.2** Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan beserta Indikator, Target dan Pagu Indikatif (Terlampir)

Program/Kegiatan/SubKegiatan yang telah di susun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan bentuk konkrit dukungan terhadap pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029. Program Prioritas ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap sasaran strategis perangkat daerah, urgensi isu sektoral, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku utama kelautan dan perikanan.

Penyusunan program prioritas ini mempertimbangkan keselarasan dengan arah kebijakan nasional, kemampuan anggaran, serta potensi daerah, dan bertujuan untuk mendorong capaian kinerja pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Adapun daftar Program/Kegiatan/Subkegiatan Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat di lihat pada Tabel 4.3 serta Pemetaan Program Prioritas Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 pada **Lampiran VII.a** dan Pemetaan Program *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Berdasarkan Bidang Prioritas Dalam Nomenklatur Program Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran VII.b**.

Tabel 4. 3
Daftar Program Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	Menunjang Capaian Indeks Ekonomi Biru (IBEI)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	
			Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
			Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Menunjang Capaian Indeks Ekonomi Biru (IBEI)
			Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Menunjang Capaian Indeks Ekonomi Biru (IBEI)
			Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	
			Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan alat ukur utama yang bersifat strategis, relevan, terukur, dan mencerminkan kinerja nyata dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Penetapan IKU dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan keterkaitan langsung dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali. Target dari masing-masing IKU disusun secara tahunan untuk periode 2025–2029, dan menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kinerja perangkat daerah. Daftar IKU tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Indeks	25,47	27,5	29,7	32,08	34,65	37,42	<i>Dashboard</i> Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provninsi Bali
2	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	4,9	5,13	11,22	11,22	11,22	11,22	Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%
3	Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas	Persen	70	75	80	85	90	95	Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang di intervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)	Persen	4,44	4,62	4,80	5,00	5,20	5,40	Data Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB) dari BPS
5	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha	Persen	5,28	18,96	19,60	20,5	20,54	20,86	$X_{kp} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) / 4$
6	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali	Persen	27,07	27,61	28,16	28,73	29,30	29,89	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS
PENUNJANG KESEKRETARIATAN									
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	83	84	85	86	87	Hasil Survei IKM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Secara detail terkait definisi, tujuan, sasaran, dan formulasi serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tertuang dalam **lampiran VIII Tabel 4.4** Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

4.5 Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan alat ukur kinerja pada level program dan kegiatan yang lebih teknis dan operasional, sehingga dapat mencerminkan output langsung dari pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. IKK menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian IKU.

Penetapan IKK dilakukan berdasarkan:

1. Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah,
2. Keterkaitan dengan indikator nasional maupun daerah, serta
3. Relevansi terhadap kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Bali.

Target IKK disusun secara tahunan selama periode 2025–2029 dan berfungsi sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja kegiatan. Daftar IKK ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	30,59	32,50	34,42	36,33	38,24	40,15	= (Jumlah Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki KKPR/L/ Jumlah Seluruh Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut) * 100% Data Dasar Pelaku Usaha 2025 = 523
		Persen	66,67	83,33	100	100	100	100	= Kawasan Konservasi yang dikelola / Total Kawasan Konservasi * 100%
2	Persentase peningkatan produksi produksi perikanan tangkap	Persen	2	2	2	2	2	2	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya) / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
3	Persentase peningkatan produksi produksi perikanan budidaya	Persen	2	2	2	2	2	2	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya) / Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)
4	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	5,28	18,96	19,60	20,05	20,54	20,86	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100%

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Persen	2	2	2	2	2	2	= ((Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya x 100%)
6	Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Persen	2	2	2	2	2	2	'= ((Jumlah uji Tahun n - Jumlah yang di uji Tahun - n)/Jumlah yang di uji tahun - n x 100%)
Penunjang Kesekretariatan									
7	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Angka	82	83	84	85	86	87	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Inspektorat

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. IKD berorientasi pada hasil (outcome) pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah.

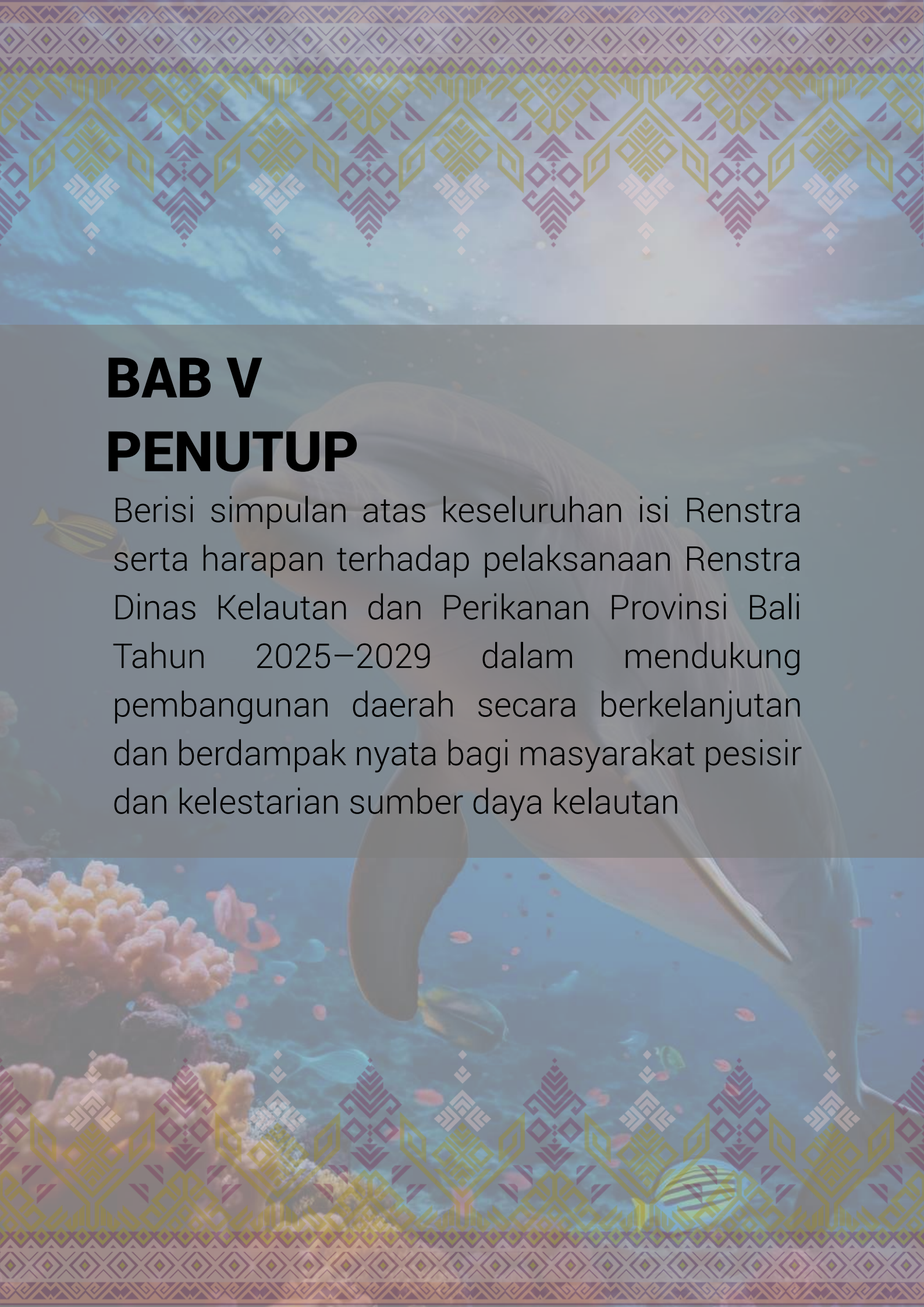
IKD bersifat lebih luas dibandingkan IKU dan IKK, karena mencerminkan capaian pembangunan daerah secara menyeluruh serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Target IKD disusun secara tahunan untuk periode 2025–2029 dan menjadi acuan dalam pertanggungjawaban kinerja urusan kelautan dan perikanan.

Target IKD disusun untuk setiap tahun selama periode Renstra 2025–2029 dan berfungsi sebagai acuan dalam pemantauan, evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah. Rincian target IKD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Produksi Perikanan	Ton	140.958,19	143.777,35	146.652,90	149.585,96	152.577,68	155.629,23	Data Produksi Perikanan
2	Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ tahun	51,20	51,5	52,66	53,2	54,73	55,27	Data Angka Konsumsi Ikan
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	40,96	52,73	64,50	76,27	88,04	99,81	Pembinaan Kelompok Nelayan Jumlah KUB = 1079 Tahun 2025 Yang Telah di Bina = 315 KUB
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	83	84	85	87	88	90	Produksi Tangkap Bali di kurang Produksi Benoa * 100%
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	107.515,02	109.665,32	111.858,62	114.095,80	116.377,71	118.705,27	Target Produksi Perikanan Tangkap
6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	4,9	5,13	11,22	11,22	11,22	11,22	Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen	100,25	100,28	100,31	100,34	100,37	100,40	Data Nilai Tukar Nelayan
8	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen	109,13	110,56	112,01	113,47	114,96	116,46	Data Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD), diharapkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat terukur secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel. IKD ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan selama periode 2025–2029.



BAB V

PENUTUP

Berisi simpulan atas keseluruhan isi Renstra serta harapan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat pesisir dan kelestarian sumber daya kelautan

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta memperhatikan sinkronisasi dengan dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025–2045, dan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Seluruh tahapan penyusunan Renstra ini telah melalui proses identifikasi permasalahan, analisis isu strategis, penetapan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja utama dan kunci yang terukur dan akuntabel. Rencana ini juga disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (THIS), dengan prinsip inklusif, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada hasil.

Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan strategis sektor kelautan dan perikanan di Bali, antara lain: penguatan tata kelola berbasis ekosistem, transformasi ekonomi biru, digitalisasi layanan, pelibatan pelaku utama yang lebih aktif, serta peningkatan kontribusi sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mencapai visi besar pembangunan Bali, yaitu **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”**.

Pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya komitmen kuat dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pencapaian target kinerja.

Akhirnya, dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang visioner, adaptif, dan operasional dalam mendukung terwujudnya sektor kelautan dan perikanan Bali yang sehat, produktif, mandiri, dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelestarian alam laut Bali.

Bali, 22 September 2025
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali**



IRPUTU SUMARDIANA, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003

The image is a full-page background photograph of an underwater coral reef. The top half shows the water surface with sunlight filtering down in rays. The bottom half shows a dense, colorful coral reef with various species of coral in shades of orange, pink, and brown. The word "LAMPIRAN" is centered in the middle of the image.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA
KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2024

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Kontak			Keterangan
					Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha	Email	Telepon	Alamat	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Lampiran I.a)				
								Pengujian mutu pada produk perikanan segar/olahan yang diambil dari pasar tradisional dengan tujuan untuk mengetahui mutu produk dengan parameter uji histamin, dan formalin. Penerima layanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Badung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Denpasar	Layanan Pengujian Mutu yang dilakukan oleh akademisi untuk menunjang penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir (Skripsi). Penerima layanan adalah Universitas Warmadewa		Layanan Pengujian Mutu yang dilaksanakan oleh Unit Pengolah Ikan, dengan tujuan untuk melengkapi dokumen ekspor terhadap produk perikanan yang dihasilkan. Penerima Layanan (Lampiran I.b)				
				1.1.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing						Pelaksanaan sertifikasi SNI pada produk perikanan sehingga menghasilkan produk perikanan yang aman untuk dikonsumsi dan berdaya saing. Klien untuk SNI wajib adalah pengalangan ikan di Pengembangan, Negara (PT. Bali Maya Permai, PT. Sarana Tani Pratama, PT. Indohamafish, PT. Indo Bali, PT. Indocitra Jaya Samudra, PT. Central Pertiwi Bahari, CV. Bali Omega). Untuk SNI Sukarela : UD. Putra Susila (Lokasi di Denpasar)				
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.1	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	2.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Memberikan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Bali (Lampiran I.f)				Memberikan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kepada Kelompok Nelayan di Provinsi Bali (Lampiran I.f)				

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Kontak			Keterangan
					Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha	Email	Telepon	Alamat	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2.2	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	2.2.1 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		I Made Gita Adnyana							081237884365	Kedonganan	Komunitas Nelayan Putra Bali
									Tri Joko Wibowo, S.TP, M.Si.			rb.trijowibowo@apps.ipb.ac.id	081328359654	Jl. Raya Darmaga Kampus IPB, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680	Melakukan Penelitian Rantai Pasok Yellowfin Tuna
									Oktafina Darmayanti			oktafina2023@gmail.com	081936316750	Jl Ciliwung No 87 Taman Kota Madiun	Melakukan Penelitian Aktivitas Biologis Ikan
									Alren Sherdyna Fitri Irianto			asherdyna25@gmail.com	085856635982	Jl. Katjopeng Permadi No. 1 RT 1 RW 6 Junrejo, Kota Batu	Melakukan Penelitian Aktivitas Biologis Ikan
									Putu Deny Ary Pratama			putudenyarypratama18@gmail.com	081945966747	Desa Peladung, Lingkungan Banjar Buda Paing, Karangasem, Bali	Melakukan Penelitian Aktivitas Biologis Ikan
						Pak Pulir (I Nyoman Pulir)							081353661958	Kedonganan	Komunitas Nelayan Saman Jaya
						I Nyoman Nuada							081337737578	Kedonganan	Komunitas Nelayan Tanjung Sari
						Lenju (I Ketut Suardinata)							085739366808 / 081	Kedonganan	Komunitas Nelayan Kerta Bali
						Bu Mami (I Wayan Darmini)							081353060077	Kedonganan	Komunitas Nelayan Lelang Mina
											I Wayan Nasib		087860394499	Kedonganan	Pengambek
											I Wayan Suerta		081337886500	Kedonganan	Pengambek
											I Wayan Aris Satrya Wibawa		08585757580	Kedonganan	Pengambek
											I Ketut Utama		0811398720	Kedonganan	Pengambek
											I Nyoman Sudana		081933028051	Kedonganan	Pengambek
											Made Adi Wiraniaya		081339186320	Kedonganan	Pengambek
											Ni Ketut Lodek		081338711108	Kedonganan	Pengambek
											Nyoman Arianta		08123624264	Kedonganan	Pengambek
											I Made Yudarsana	Kadekkedonganan7@gmail.com	082147565487	Kedonganan	Pengambek
											I Wayan Astika Putra	astikaputra976@gmail.com	081338579739	Tanjung Benoa	Pengambek
											Agil Bagus Wibowo	Agilbajok@gmail.com	085173338388	Tanjung Benoa	Pengambek
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.1.1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil							Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut di lakukan pengawasan Perizinan berusahaan verifikasi terkait Dokumen Perizinan yang dimiliki serta kesesuaian Zonasi Pemanfaatan dalam kegiatan usaha yang dilakukan sesuai Kawasan Pemerintahan Provinsi				
				3.1.2 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Mendapatkan pembinaan dalam rangka penumbuhkembangan untuk meningkatkan keikutsertaan Pokmaswas dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Lampiran 1.e)								

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran Penerima Layanan							Kontak			Keterangan
					Kelompok Rentan	Komunitas	Ormas / LSM / Forum	Perangkat Daerah	Akademisi / Praktisi	Media Massa	Dunia Usaha	Email	Telepon	Alamat	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			memberikan bantuan sarana budidaya ikan berupa Bibit Ikan Kerapu kepada pembudidaya Ikan (Lampiran I.g)			memberikan bantuan sarana budidaya ikan berupa Bibit Ikan Kerapu kepada pembudidaya Ikan (Lampiran I.g)				
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	4.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4.2.2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan benih ikan bagi komunitas bidang pembudidayaan ikan	Penyediaan benih ikan bagi kelompok masyarakat dalam rangka penebaran di perairan umum	1. Penjualan benih ikan dan induk ikan bagi UPTD yang membidangi Perikanan Budidaya di Kab/ Kota 2. Penyediaan benih ikan untuk penebaran di		Penyediaan induk ikan dan benih ikan untuk menunjang penelitian kegiatan penelitian di bidang perikanan budidaya			Pemberian layanan penjualan benih ikan dan induk ikan bagi pembudidaya di wilayah Provinsi Bali	
5	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	5.1	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.1.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa Geomembran (Lampiran I.c)							
				5.2	5.2.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
					5.2.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi sebagaimana (Lampiran I.d)	Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi sebagaimana (Lampiran I.d)		Pembinaan dan Sosialisasi Regulasi sebagaimana (Lampiran I.d)				

Lampiran I.a

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pembinaan Unit Pengolah Ikan (UPI)

No.	Nama UPI/ UMKM	Alamat	Jenis dan Skala UPI
1	PT. Bahari Lancar Abadi	Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung	Menengah Besar
2	PT. Sari Segar Laut Indonesia	Jl. Ikan Tuna Raya Timur I Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
3	PT. Intimas Surya	Jl. Ikan Tuna Raya, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
4	PT. Bintang Jaya Kota Mandiri	Jl. Ikan Tuna Raya IV No.16, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
5	PT. Soejasch Bali	Jl. Gunung Patas No.1, Kel. Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar	Menengah Besar
6	PT. Intimas Surya	Jl. Ikan Tuna Raya, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
7	PT. Damena Sumber Rejeki	Jl. Ikan Tuna Raya, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
8	CV. Satu Tuna Nusantara	Jl. Ikan Tuna Raya Barat Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
9	PT. Indocitra Jaya Samudera	Jl. Gatot Kaca No.88, Kel. Pengambangan, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana	Menengah Besar
10	PT. Iam Be U Mina Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai No.17 Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
11	PT. Satu Enam Delapan	Kompleks Pelabuhan Benoa, Jl. Ikan Tuna III, No 1B, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
12	PT. Prasetya Agung Chaya Utama	Jl. A. Yani I, Dusun Carik Padang, Kel. Nyambu, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan	Menengah Besar
13	PT. Bali Maya Permai Food Canning Indus	Jl. Raya Pengambangan, Kel. Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana	Menengah Besar
14	PT. Primo Indo Ikan	Jl. Ikan Tuna I No.1 Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
15	PT. Yushen Fishery Indonesia	Jl. Pemelisan No.168 Suwung Batan Kendal, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
16	PT. Industry Perikanan Terpadu Chiu Shih	Jl. Ikan Tuna Barat Raya II, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
17	PT. Lestari Primatama	Jl. Ikan Tuna Barat Raya II, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
18	PT. Hentry Jaya	Jl. Ikan Tuna Barat Raya II, Pelabuhan Benoa, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar	Menengah Besar
19	CV. Dus International Trading	Jalan By pass Ngurah Rai, Gang Mina Utama No.9, Denpasar Selatan-Bali	Menengah Besar
20	PT. Bali Tuna Segar	Jl. Ikan Tuna Raya. No. 17, Pelabuhan Benoa	Menengah Besar
21	PT. Jaya Bali Bersaudara	JL. IKAN TUNA RAYA IV NO.16, KELURAHAN PEDUNGAN, DENPASAR SELATAN,BALI-INDONESIA	Menengah Besar
22	PT. Hatindo Makmur	Kompleks Pelabuhan Benoa, Jl. Ikan Tuna III No. 2, Benoa, Denpasar, Bali	Menengah Besar
23	CV. Satu Tuna Nusantara	JL.IKAN TUNA BARAT PELABUHAN BENOA,DENPASAR BALI	Menengah Besar
24	PT. Perintis Jaya Internasional	JL.Ikan Tuna Raya Barat No.6 Pelabuhan Benoa,denpasar ,Bali	Menengah Besar
25	PT. Golden Tuna	Jl. Ikan Tuna Raya Barat II Pelabuhan Benoa Denpasar Bali	Menengah Besar
26	PT. Ganten Maha Nindya	Jl. Raya Munggu Kapal, Perumahan Grand Srikandi Mansion No 8, Cepaka Kediri, Kab. Tabanan – Bali	Menengah Besar
27	PT. Ameritindo Cerah Terpadu	Jalan Ikan Tuna Raya 17, Pelabuhan Benoa, Desa/Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Menengah Besar
28	PT. Awindo Internasional	Jl. Ikan Tuna 1 Benoa Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali	Menengah Besar
29	PT. Sanjaya Sukses Maritime	Jl. Ikan Tuna IV, No.18B, Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali	Menengah Besar
30	PT. Sari Nusa Sejati	Banjar Dinas Mawar Desa Tukad Sumaga Kecamatan Gerokgak Buleleng Bali	Menengah Besar
31	UD. Supradinasty	JL. TUNGUL AMETUNG G. V / 12 DPS. BR/LINK. DARMA SANTI, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar	Menengah Besar
32	PT. Bintang Samudra Bersinar	Jl. Ikan Tuna I Nomor 7, Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222	Menengah Besar
33	PT. Indo Bali	Jl. Raya Pengambangan, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Bali	Menengah Besar

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pembinaan UMKM

No	Kabupaten/Kota	UPI Yang Dibina/Didampingi	Jenis Produk
1	Gianyar	Poklahsar Tenggiri Wahana	Ikan Pindang
2	Karangasem	UD. Dharma Merta	Abon Ikan
3	Badung	PT. Sutar Pangan Sejahtera	Ikan Tuna Asap
4	Jembrana	Poklahsar Wijaya Fish	Bedet Crispy
5	Klungkung	Poklahsar Ulam Sari Segara	Abon Ikan
6	Tabanan	UD. Bali Mina Sejahtera	Krupuk Kulit Patin
7	Karangasem	Poklahsar Manis Segara Madu	Pemasaran Ikan Segar dan Beku
8	Karangasem	Poklahsar Merta Segara Putri	Ikan Pindang
9	Badung	Poklahsar Amertha Segara	Abon Ikan Tuna
10	Badung	Poklahsar Merta Nadi	Mie Rumput Laut
11	Jembrana	Poklahsar Setia Jaya	Pemasar Ikan Segar, Sate dan Pepes
12	Jembrana	Karya Sejati	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
13	Buleleng	Poklasar Maniking Beraban	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
14	Buleleng	Poklahsar Putri Baruna Segara	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
15	Badung	Kerupuk Kulit Ikan Tuna Dion	Kerupuk Kulit Ikan Tuna
16	Karangasem	Poklahsar Astiti Baruna Putri	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
17	Karangasem	Poklahsar Akshada Putri	Abon dan Ikan Tongkol Kering
18	Karangasem	Poklahsar Segara Ayu	Kripik Ikan dan Sambal Ikan Asap
19	Tabanan	Poklahsar Segara Wangi	Sate dan Pepes Ikan
20	Tabanan	Tresna Nadi Foods	Belut dan Teri Crispy
21	Buleleng	Poklahsar Sari Dewi	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
22	Buleleng	Poklahsar Mekar Sarin Segara	Pemasaran Ikan Segar dan Ikan Pindang
23	Klungkung	Poklahsar Dewi Kerupuk Lele	Kerupuk Lele
24	Klungkung	Pondok Mina Mesari	Lele Asap, Lele Bumbu Kuning, Krupuk Lele
25	Tabanan	Dana Tirta Ayu Sukses	Sate Ikan
26	Tabanan	Gangga Dewi	Pepes Ikan
27	Gianyar	Poklahsar Putra Samudra I	Ikan Pindang
28	Gianyar	Poklahsar Putra Samudra II	Ikan Pindang
29	Karangasem	Poklahsar Eka Bahari Putri	Kripik, Abon dan Rengginang Ikan

No	Kabupaten/Kota	UPI Yang Dibina/Didampingi	Jenis Produk
30	Karangasem	Warung Bu Anik	Kerupuk Kulit Ikan
31	Tabanan	Poklahsar Tuna Bali Merta	Sate,Pepes, dan Krupuk Kulit Ikan Tuna
32	Tabanan	Poklahsar Tuna Sari	Bakso, Sate dan Pepes Ikan
33	Buleleng	Poklahsar Sari Mekar I	Ikan Pindang
34	Buleleng	PT. Sari Nusa Sejati	Ikan Pelagis Beku
35	Badung	PT. Hasna Jaya Mandiri	Ikan Pelagis Beku
36	Badung	Poklahsar Tunjung Putih	Lele dan Nila Bumbu Kuning
37	Jembrana	UD. Hidup Jaya	Ikan Pelagis Beku
38	Tabanan	Poklahsar Putri Gangga	Kripik Belut

Lampiran I.b

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pengujian Mutu Hasil Perikanan

No	NAMA PELANGGAN	ALAMAT
1	PT. Jayabali Bersaudara	Jl. Ikan Tuna Raya IV No.16 Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan Bali-Indonesia
2	PT. Bali Mina Utama	Jl. Ikan Tuna Raya Timur, Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Indonesia
3	PT. Perintis Jaya Internasional	Jl. Ikan Tuna Raya Barat No. 6, Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Indonesia.
4	PT. Prasetya Agung Cahaya U	Jl. A. Yani I, Dusun Carik Padang, Tabanan
5	CV. Dus International Trading	JL. Tukad Pakerisan No.68
6	PT. Seafood Inspection Laboratory	Jalan Bedugul No. 37 B, Sida karya, Denpasar Selatan, Bali 80224
7	PT. Indotama Bahari	JL. IKAN TUNA III NO. 1B PELABUHAN BENOA
8	PT. Bali Maya Permai	Jalan Raya Pengambangan
9	PT. Bali Ocean Anugrah Linger Indonesia	JL. IKAN TUNA RAYA BARAT IV PELABUHAN BENOA, DENPASAR, BALI-INDONESIA
10	PT. Industri Perikanan Terpadu Chiu Shih	Jalan Ikan Tuna Raya Barat II, Pelabuhan Benoa
11	PT. Awindo International	: Jl. Ikan Tuna I No. 8 Pelabuhan Benoa, Bali
12	PT. Balinusa Windumas	Jl. Ikan Tuna II No.1 Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali - Indonesia 80222
13	PT. Yu Shen Fishery Indonesia	Jln.Pemelisan no.168
14	PT. Hatindo Makmur	Kompleks Pelabuhan Benoa Jl. Ikan Tuna III, No. 2, Benoa 80223 Denpasar, Bali
15	PT. Satu Enam Delapan Benoa	Kompleks Pelabuhan Benoa, Jl. Ikan Tuna III, No. 1B, Benoa, 80223
16	PT. DAMENA SUMBER REJEKI	JALAN BY PASS NGURAH RAI GANG MINA UTAMA NO.8
17	PT. Sari Nusa Sejati	Banjar Dinas Mawar
18	PT. Kampung Laut Indonesia	Jl. Taman Pancing Timur Gg. Lotus, Desa/Kelurahan Pemogan, Denpasar Selatan – Bali
19	Kementerian Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Jl. Pelabuhan No. 1 Pengambangan Kec. Negara, Kab. Jembrana - Bali
20	CV. Yanidilla Adilindo	Jl. Pulau Moyo Gang Telkom No. 39x Pedungan Denpasar - Bali
21	CV. Satu Tuna Nusantara	JL. IKAN TUNA RAYA BARAT, PENDUNGAN, DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, BALI
22	PT. Karya Double Delapan	jl. Bypass Ngurah Rai gg. Mina Utama no.10 Denpasar, Bali
23	PT. Bali Indah Samudera	Jl. Segara Madu no. 81 S, Lingk. Banjar Kubu Alit, Desa/Kel. Kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali
24	PT. Alam Walindo Jaya	Jl. Taman Baruna No.18 Lingk. Tegal, Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Badung - Bali
25	PT. Perikanan Indonesia Cabang Benoa	Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Pedungan Denpasar Selatan - Bali
26	CV. Sinar Timur Arafura	JL. IKAN TUNA RAYA BARAT NO. 6A, PELABUHAN BENOA, DENPASAR, BALI, INDONESIA.
27	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Jl. Mataram No. 1 Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung	Jl. Raya Takmung No. 1, Kec. Banjarangkan Kabupaten Klungkung - Bali

No	NAMA PELANGGAN	ALAMAT
29	PT. Harta Mutiara Samudera	Jl. Ikan Tuna Barat Komplek SSU Blok 2 No. 3 Pelabuhan Benoa, Bali
30	CV. Sumber Niaga	JL.RAYA CUPEL -PENGAMBENGAN BANJAR PUANA,DESA TEGALBADENG BARAT
31	PT. Sarana Tani Pratama	Jl. KUD Mina Karya, Dusun Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Jembrana, Bali
32	PT. Sumber Mina Samudera	Pelabuhan Benoa
33	PT. Neptune Fish Market	Jl. Pulau Moyo Pesanggaran – Denpasar
34	PT. Intimas Surya	JL. Ikan Tuna Raya, Pelabuhan Benoa, Bali
35	PT. Makmur Jaya Sejahtera	Jl. Ikan Tuna IV, Pelabuhan Benoa, Bali 80222
36	PT. Indocitra Jaya Samudera	Jln. Gatot kaca, no. 88, Desa Pengambengan
37	I Komang Budi Adnyana	
40	PT. Gilontas Indonesia	Jl. Ikan Tuna Barat No. 81 Pelabuhan Benoa, Lingk. Pesanggaran,
41	PT. Bandar Nelayan	Jl.Ikan Tuna IV No.8, Pelabuhan Benoa, Denpasar Selatan, Bali
43	PT. Sumber Nelayan Samudra	Jl. Ikan Tuna Raya Barat No.1, Pelabuhan Benoa
44	PT. Indohamafish	JL.GATOT KACA NO. 86 - NEGARA
45	PT. Iambeu Mina Utama	Jl. By Pass Ngurah Rai No. 17, Pesanggaran, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, Indonesia 80222
46	PT. Primo Indo Ikan	Jl Ikan Tuna I No I Pelabuhan Benoa
47	Duta Pangan	Jl. Gunung Catur II/77 Denpasar
48	PT. Indo Bali	Jalan Raya Pengambengan
49	PT. Grha Mina Wijaya	JL. Raya Kerta Dalem No.10, Kel. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali - Indonesia
50	PT. Sentral Ikan Bali	Jl. Raya Pelabuhan Benoa No. 76
51	PT. Sanjaya Sukses Maritime	Jl. Ikan Tuna IV, No.18B, Pelabuhan Benoa
52	PT. Sari Segar Laut Indonesia	Jln. Ikan Tuna Raya Timur 1, Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali
53	PT. Flores Komoditi Trading	Dinas Pondok Mekar, Desa Tangguntiti, Selemadeg Timur
54	PT. Nagama Samudra	
55	PT. Zanargo Artha	JL. By Pass Ngurah Rai - SB Kapaon BR. Rangkan Sari
56	PT. Golden Tuna	Jl. Ikan Tuna Raya Barat II, Pelabuhan Benoa
57	PT. Perindo Benoa	
58	PT. Hentry Jaya	Jalan Ikan Tuna Raya IV, No. 17
59	PT. Bintang Jayakota Mandiri	Jalan Ikan Tuna Raya IV No. 16. Kelurahan Pedungan
60	CV. Bali Mega Dewata	Jalan By Pass Ngurah Rai, Gang Arta Segara, Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Lampiran I.c

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petambak Garam

No	Nama Kelompok	Alamat	Pelayanan
1	Sarining Segara	Br Batur, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (6 roll).
2	Mertaning Segara	Br. Dinas Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (1 roll).
3	Segara Lestari II	Br. Dinas Yeh Malet Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).
4	Tasik Segara	Br. Dinas Baturinggih Kaja, Desa Baturinggih, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (2 roll).
5	Uyah Bali	Br. Dinas Baturinggih Kaja, Desa Baturinggih, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (2 roll).
6	Tunas Mekar II	Br. Dinas Kerta Buana, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).
7	Segara Nadi Pekurenan I	Br. Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (3 roll).
8	Segara Nadi Pekurenan II	Br. Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (3 roll).
9	Segara Nadi Pekurenan III	Br. Dinas Pekurenan, Desa Tianyar Barat, Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (2 roll).
10	Mina Karya I	Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar , Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).
11	Pandan Sari	Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar , Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).
12	KWP. Pandan Harum	Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar , Kec. Kubu, Kab. Karangasem	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (3 roll).
13	Sarining Pertiwi II	Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (3 roll).
14	Tasik Segara I	Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).
15	Tasik Segara II	Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng	Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 1 Paket Geomembran Lahan Garam (4 roll).

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
Nama Kegiatan	: Pembinaan tentang Pengelolaan dan Kelestarian Biota Laut di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida.	Nama Kegiatan	: Sosialisasi KEPMEN-KP Nomor 122 Tahun 2023 tentang Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal	: 12 Juni 2023	Tanggal	: 5 Maret 2024
LSM	: Yayasan Segitiga Karang Coral Triangle Centre (CTC)	Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
	: POKMASWAS Segara Mejineng (Desa Sakti)		: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
	: POKMASWAS Batununggul Lestari (Desa Batununggul)		: Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar – (Sebagai Narasumber)
	: POKMASWAS Baruna Jaya (Desa Suana)		: Kepala UPTD. Pelabuhan Perikanan Provinsi Bali
Dunia Usaha (Dive Operator)	: Rhonda Snorkeling Tour Nusa Penida		: Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Tejakula
	: Deep Roots Dive		: Camat Tejakula
	: Nusa Penida Divers		: Kepala Desa Tejakula
	: Temple Dive		: Kepala Desa Sambirenteng
	: Octopus Dive		: Kepala Desa Penuktukan
	: Nusa Penida Dive Center		: Kepala Desa Les
	: Dune Penida		: Kepala Desa Sembiran
	: Karma Dive		: Kepala Desa Julah
	: Bhainsnawa Snorkeling		: Kepala Desa Bondalem
	: Purple Dive		: Kepala Desa Pacung
	: Mambo Dive Resort	LSM	: POKMASWAS Kertha Winangun Desa Pacung
	: Scuba Junkie		: POKMASWAS Tejakula Lestari Desa Tejakula
	: DPM Dive		: POKMASWAS Jagra Bahari Desa Sambirenteng
	: Pure Dive Resort		: POKMASWAS Pantai Desa Bondalem
	: Bali Aqua		: POKMASWAS Taman Segara Desa Penuktukan
	: Freedive Nusa		: POKMASWAS Karya Samudra Desa Les
	: Blue Whales	Dunia Usaha (Dive Operator)	: Mavi Dive
	: Nusa Freedive		: Hollyway Dive Resort
	: Serot Snorkeling		: Bondalem Eco Dive
			: Teluk Karang Dive Resort
Tanggal	: 14 Juli 2023	Tanggal	: 4 April 2024
LSM	: Yayasan Segitiga Karang Coral Triangle Centre (CTC)	Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
Dunia Usaha (Dive Operator)	: Lembongan Dive Center		: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
	: Ceningan Divers		: Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar – (Sebagai Narasumber)
	: World Diving Lembongan		: Kepala UPTD. Pelabuhan Perikanan Provinsi Bali
	: French Kiss Divers		: Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Banjar
	: Aquaman		: Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Buleleng
	: Capt Purana		: Camat Banjar
	: Captain Nemo		: Camat Buleleng
	: Sidu Safari/Zet Sky		: Kepala Desa Den Carik
	: Island Time Bali		: Kepala Desa Temukus
	: Agus Snorkeling Trips		: Kepala Desa Kaliasem
	: Ocean Dream Lembongan Diving		: Kepala Desa Kalibukbuk
	: Royal Snorkeling		: Kepala Desa Anturan
	: Tanis		: Kepala Desa Tukad Mungga
	: Captain YinYang	LSM	: POKMASWAS Penimbangan Lestari Desa Baktiseraga
	: Ceningan Paradise		: POKMASWAS Banyumilir Desa Kalibukbuk
	: Blue Grmen		: POKMASWAS Desa Umeanyar
	: Lembongan Watersport		: POKMASWAS Macan Laut Desa Temukus
	: Ketua Kelompok Nelayan	Dunia Usaha (Dive Operator)	: Tirta Dive & Snorkeling Lovina
	: Para pemilik snorkeling di Lembongan		: Arrow Dive Center
			: Permai Scuba Dive
			: KUB. Sinar Bahari Desa Kaliasem
			: KUB. Bhakti Samudra Desa Temukus
			: KUB. Eka Karya Segara Desa Dencarik
		Tanggal	: 26 Juli 2024
		Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
			: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
			: Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar – (Sebagai Narasumber)
			: Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat
			: Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan 1 1 Gondol
			: Bidang Kelautan, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Bali
			: Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Gerokgak
			: Camat Gerokgak
			: Kepala Desa Pemuteran
			: Kepala Desa Banyupoh
			: Kepala Desa Penyambangan
			: Kepala Desa Sumber Klampok
			: Kepala Desa Sumberkima
		LSM	: Ketua POKMASWAS Wana Segara Lestari
			: Ketua POKMASWAS Satgas Lingkungan
			: Ketua POKMASWAS Teluk Sumberkima
			: Ketua Yayasan Pelestari Karang
Nama Kegiatan	: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida	Nama Kegiatan	: Sosialisasi KEPMEN-KP Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal	: 13 April 2023	Tanggal	: 28 Mei 2024
Perangkat Daerah	: Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar	Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
LSM	: Yayasan Segitiga Karang Coral Triangle Centre (CTC)		: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
	: POKMASWAS Segara Mejineng (Desa Sakti)/Kelompok Snorkeling		: Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar – (Sebagai Narasumber)
	: POKMASWAS Batununggul Lestari (Desa Batununggul)		: Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Kubu
	: POKMASWAS Baruna Jaya (Desa Suana)		: Camat Kubu
Dunia Usaha (Dive Operator)	: Rhonda Snorkeling Tour Nusa Penida		: Kepala Desa Tulamben
	: Deep Roots Dive		: Bandesa Adat Tulamben
	: Nusa Penida Divers	LSM	: Ketua Yayasan Mero Foundation
	: Temple Dive		: Ketua Organisasi Pemandu Selam Tulamben
	: Octopus Dive	Dunia Usaha (Dive Operator)	: Dive Concepts Tulamben
	: Nusa Penida Dive Center		: Tulamben Scuba Diving
	: Dune Penida		: Ocean View Dive Center
	: Karma Dive		: Aqua Dive Paradise
	: Bhainsnawa Snorkeling		: Liberty Dive Resort
	: Purple Dive		: Bali Coral Dive Center

TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	Reeflex Divers		Let's Dive Tulamben
	Nomads		Tulamben Scuba Dive & Snorkeling
	Bluecorner Dive Nusa Penida		Tulamben Wreck Divers
	Kardi Express		Ocean Sun Dive Resort Tulamben
	Mambo Dive Resort		Wonder Dive Bali
	Scuba Junkie		Bali Elite Scuba
	DPM Dive		Dive Into Bali
	Pure Dive Resort		Tulamben Dive
	Sactum Dive		Go Diving Tulamben
	Bali Aqua		Bali Diving Academy Tulamben
	Freedive Nusa		
	Blue Whales		
	Penida Dive		
	Serot Snorkeling		
Tanggal	: 8 Mei 2023	Tanggal	: 11 September 2024
LSM	: Yayasan Segitiga Karang Coral Triangle Centre (CTC)	Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
	Lembongan Marine Association (LMA)		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
	POKMASWAS Gili Bhuana		Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar – (Sebagai Narasumber)
Dunia Usaha (Dive Operator)	: Scuba Center Asia		Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Karangasem
	Bali Hai Dive		Camat Manggis
	Tamrind Dive		Kapolsek Manggis
	Siren Diving		Kapolsek Padangbai
	Twin Island Dive		Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Manggis
	Ceningan Diver		Penyuluh Perikanan Desa/Perbekel Padangbai
	Dive Concepts		Kepala Desa/Perbekel Padangbai
	Bali Dive Academy		Kepala Desa/Perbekel Sengkidu
	Lembongan Discoveri Diving		Kepala Desa/Perbekel Antiga
	Blue Corner Dive		Bendesa Adat Padangbai
	Lembongan Dive Center		Bintara Pembina Desa (BABINSA) Desa Padangbai
	Roctopus Dive		Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Padangbai (BABINKAMTIBMAS)
	Two Fish Diving	LSM	: Ketua POKMASWAS Tirta Segara
	World Diving Lembongan	Dunia Usaha (Dive Operator)	: Ikan Dive
	Lembongan Divers		OK Dive
	French Kiss Divers		Geko Dive
	Sober Diving		Absolute Scuba
	Big Fish Diving		Padangbai Bali Dive
	Lembongan Water Sport		Paradise Diving
	Legend Dive		Momo Dive
	Mola Mola Dive		Widana Dive Service
	Capten Coconat		Livingsti
	Capten Yurik		
	Aquaman Snorkeling Trip		
	Lembongan Snorkeling Trip		
	New Man		
	D&B Ocean Dream		
	Kelompok Surya Mandiri Mangrove		
	Nirvana		
	Capten Blang		
	Lembongan Surf Time		
	Bounty Cruises		
	Quick Silver		
Tanggal	: 13 Juli 2023	Tanggal	: 12 November 2024
Perangkat Daerah	: Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	Perangkat Daerah	: Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem
	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1 dan Perikanan Benoa		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
Dunia Usaha (Dive Operator)	: Caspla		Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar
	Purple Dive		Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Karangasem
	Blue Corner Dive		Camat Abang
	Octopus Dive		Kapolsek Abang
	Captain Dolphino Snorkeling		Koordinator Penyuluh Perikanan Kecamatan Abang
	Pure Dive Resort		Penyuluh Perikanan Desa/Perbekel Bunutan
	Temple Dive		Kepala Desa/Perbekel Bunutan
	Indo Ocean Project		Bendesa Adat Bunutan
	Deep Roots Dive		Bintara Pembina Desa (BABINSA) Desa Bunutan
	Scuba Junkie		Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Bunutan (BABINKAMTIBMAS)
			Whitesand
			Eurodive
			Bali Explorers Diver
			Bali Reef Divers
			Balidas
			Diversity
			Amed Jepun Divers
			Budha Dive
			Ketua Kelompok Nelayan Segara Tampa Tepi
			Ketua Kelompok Nelayan Cempaka Indah
			Ketua Kelompok Nelayan Segara Jaya Lipah
			Ketua Kelompok Nelayan Segara Bingin Tunggal Lipah
			Ketua Kelompok Nelayan Tani Segara Murti

Lampiran I.e

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

NO	Kab/Kota	Kecamatan/Kel/Desa	Nama Pokmaswas	Kecamatan/Kel/Desa	Kab/Kota	Nama, Ketua dan No.HP	Jumlah Anggota
1	2	3	4	3	2	5	6
1	Badung	Kuta/Tuban	SEGARA MADU	Kuta/Tuban	BADUNG	I Nyoman Sudiarta 082342278236	31
2	Badung	Kuta Selatan/Benoa	YASA SEGARA	Kuta Selatan/Benoa	BADUNG	I Wayan Sudarya 081338631043	32
3	Badung	Kuta Selatan/Benoa	MERTA SEGARA	Kuta Selatan/Benoa	BADUNG	Ketut Tama 081246078342	73
4	Bangli	Kintamani/Batur Tengah	MINA BINTANG SEGARA DANU	Kintamani/Batur Tengah	BANGLI	I Ketut Wania 0813377539744	31
5	Bangli	Tembuku/Tembuku	MINA GANGGA GIRI	Tembuku/Tembuku	BANGLI	I Wayan Sucita 0813388024662	29
6	Buleleng	Gerokgak/Sumberklompok	WANA SEGARA LESTARI	Gerokgak/Sumberklompok	BULELENG	Made Sudiartha 081238120464	11
7	Buleleng	Gerokgak/Sumberkima	TELUK SUMBERKIMA	Gerokgak/Sumberkima	BULELENG	I Pt Mangku Mariasa 08123833338	18
8	Buleleng	Gerokgak/Pejarakan	SATGAS LINGKUNGAN	Gerokgak/Pejarakan	BULELENG	Abdul Hariri 085238540281	25
9	Buleleng	Seririt/Umeanyar	UMEANYAR	Seririt/Umeanyar	BULELENG	I Gusti Bgs Cakra Wijaya 082235634468	19
10	Buleleng	Kubu Tambahan/Bukti	SATYA BAHARI	Kubu Tambahan/Bukti	BULELENG	I Putu Widiada 081805345332	27
11	Buleleng	Tejakula/Pacung	KERTHA WINANGUN	Tejakula/Pacung	BULELENG	I Kadek adi Diantara 085739213016	22
12	Buleleng	Tejakula/Tejakula	TEJAKULA LESTARI	Tejakula/Tejakula	BULELENG	Made Darmika 090085238402	31
13	Buleleng	Buleleng/Baktiseraga	PENIMBANGAN LESTARI	Buleleng/Baktiseraga	BULELENG	Gede Wiadnyana 081337233609	27
14	Buleleng	Tejakula/Sambirenteng	JAGRA BAHARI	Tejakula/Sambirenteng	BULELENG	I Gede Putu Alit 08123602011	19
15	Buleleng	Tejakula/Bondalem	PANTAI	Tejakula/Bondalem	BULELENG	I Nyoman Sugiarta 081290791784	27
16	Buleleng	Tejakula/Penuktukan	TAMAN SEGARA	Tejakula/Penuktukan	BULELENG	Made Alastapa 082340572124	15
17	Buleleng	Banjar/ Temukus	MACAN LAUT	Banjar/ Temukus	BULELENG	I Nyoman Widiassa 087762226989	39
18	Buleleng	Buleleng/Kalibukbuk	BANYUMILIR	Buleleng/Kalibukbuk	BULELENG	I Ketut Wiryadana 081808888211	15
19	Denpasar	Denpasar Selatan/ Pemogan	MINA WERDI BATU LUMBANG	Denpasar Selatan/ Pemogan	DENPASAR	I Made Wijaya 081337755320	56
20	Denpasar	Denpasar Selatan/Sanur	STITI BUANA	Denpasar Selatan/Sanur	DENPASAR	I Wayan Wiranata 081339913877	33
21	Denpasar	Denpasar Selatan/ Pemogan	PANREPTI SEGARA	Denpasar Selatan/ Pemogan	DENPASAR	I Nyoman Gede Wiryanata 081337010831	30
22	Denpasar	Denpasar Selatan/Serangan	KARYA SEGARA	Denpasar Selatan/Serangan	DENPASAR	I Wayan Loka 08133903136	17
23	Denpasar	Denpasar Selatan/Sanur Kaja	MATAHARI TERBIT	Denpasar Selatan/Sanur Kaja	DENPASAR	I Made Sukartika 081916676987	55
24	Denpasar	Denpasar Selatan/Sanur Kauh	BALA BENDEGA SEGARA MERTA SARI	Denpasar Selatan/Sanur Kauh	DENPASAR	I Kadek Sukanadi 089698555745	33
25	Denpasar	Kesiman/Kertalangu	SARI SEGARA KESIMAN	Kesiman/Kertalangu	DENPASAR	I Made Bagus Mahayana 081239412886	13
26	Gianyar	Gianyar/Lebih	PUTRA BARUNA	Gianyar/Lebih	GIANYAR	I Made Ana 08174777715	17
27	Gianyar	Belahbatuh/Medahan	MINA LESTARI	Belahbatuh/Medahan	GIANYAR	Dewa Putu Artawan 0882247035774	21
28	Gianyar	Sukawati/Ketewel	SUKA BARUNA	Sukawati/Ketewel	GIANYAR	I Made Artana 087863056716	20
29	Jembrana	Melaya/Candikusuma	BAYU SAMUDRA	Melaya/Candikusuma	JEMBRANA	Masruhin 081238126313	20
30	Jembrana	Pekutatan/Medewi	ELANG PERKASA	Pekutatan/Medewi	JEMBRANA	Misadi 081337018445	35
31	Jembrana	Negara/Banyubiru	PUTRA RAJAWALI	Negara/Banyubiru	JEMBRANA	Jumhari 081339913688	24
32	Karangasem	Karangasem/ Seraya	JAGRA WISNU SARA	Karangasem/ Seraya	KARANGASE M	I Nyoman Merta 085333008910	61
33	Karangasem	Kubu/Desa Sukadana	BAYU SEGARA	Kubu/Desa Sukadana	KARANGASE M	I Nyoman Mangku 085888044773	94

NO	Kab/Kota	Kecamatan/Kel/Desa	Nama Pokmaswas	Kecamatan/Kel/Desa	Kab/Kota	Nama, Ketua dan No.HP	Jumlah Anggota
34	Karangasem	Manggis/Antiga	TIRTA SEGARA	Manggis/Antiga	KARANGASEM	I Wyn Totong Widiarta 087860121991	51
35	Karangasem	Seraya Timur/Karangasem	JAGRA SEGARA SANTHI	Seraya Timur/Karangasem	KARANGASEM	I Wayan Juliantara Putra 081237138104	15
36	Karangasem	Abang/Purwa Kerti	PESISIR LESTARI	Abang/Purwa Kerti	KARANGASEM	I Ketut Sepel 081338520243	21
37	Karangasem	Tulamben/Kubu	SEGARA GUNUNG TULAMBEN				23
38	Klungkung	Nusa Penida/Lembongan	GILI BUANA	Nusa Penida/Lembongan	KLUNGKUNG	I Wayan Ujiana 081337196201	35
39	Klungkung	Nusa Penida/Suana	BARUNA JAYA	Nusa Penida/Suana	KLUNGKUNG	I Ketut Mudra Asmara 083114100901	16
40	Klungkung	Dawan/Kusamba	KERTA BARUNA JAYA	Dawan/Kusamba	KLUNGKUNG	I Wayan Suartika 081238126312	29
41	Klungkung	Nusa Penida/Batununggul	BATUNUNGGUL LESTARI	Nusa Penida/Batununggul	KLUNGKUNG	I Kadek Arsana 081237381474	16
42	Klungkung	Nusa Penida/Sakti	SEGARA MEJINENG	Nusa Penida/Sakti	KLUNGKUNG	I Made Arsa 082146555433	13
43	Tabanan	Tabanan/Sudimara	TIRTA GANGGA	Tabanan/Sudimara	TABANAN	I Ketut Pinda 081926591925	12
44	Tabanan	Tabanan/Sudimara	BARUNA GANGGA	Tabanan/Sudimara	TABANAN	I Wayan Sastrawan 087860155203	10
45	Tabanan	Selemadeg Barat/ Langlang Linggah	BALI TURTLE KONSERVASI FARM	Selemadeg Barat/ Langlang Linggah	TABANAN	Gede Sastra Kumala 081238120477	14

Lampiran I.f

KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Pembinaan Koperasi Nelayan dan Kelompok Nelayan

NO	KAB/KOTA	NAMA KUB	NAMA KOPERASI	ALAMAT	JUMLAH ANGGOTA
1	Karangasem	KUB. Mina Jaya	1. Koperasi Mina Jaya	Br. Dinas Lebah, Kubu Br. Dinas Tunas Sari, Ds. Tianyar, Kec. Kubu	90 org
2	Gianyar	KUB. Putra Samudra KUB. Putra Samudra I KUB. Putra Samudra II KUB. Putra Samudra III KUB. Putra Samudra IV KUB. Putra Samudra V	1. KSU. Mina Putra Samudra	Br. Lebih Beten Kelod, Desa Lebih, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar	202 org
3	Denpasar	Segara Guna Batu Lumbang	1. KSU. Mina Sedana Batu Lumbang	Jl. By Pass Ngurah Rai Pintu Air DAM Istuari, Kota Denpasar	39 org
4	Badung	KUB. Mina Segara	1. Koperasi Konsumen Koneli Samudra Jaya Kuta	Kelurahan Kuta	30 org
		KUB. Merta Segara Samuh	2. Koperasi Mertha Segara Samuh	Jl. Pratama Pantai Samuh, Link. Celuk Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan	63 org
		Yasa Segara Bengiat	3. Yasa Segara Bengiat	Jl. Pantai Mengiat, Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan	32 org
5	Buleleng	KUB. Karya Bersama Sejahtera	1. Karya Bersama Sejahtera	Br. Dinas Ngis Ds. Tembok, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	40 org
		KUB. Dharma Putra Braban	2. Koperasi Pemasaran Dharma Putra Braban	Br. Dinas Kubuanyar, Ds. Kubutambahan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	44 org
		KUB. Ketapang Sondoh	3. Koperasi Pemasaran Ketapang Sondoh Sejahtera	Br. Dinas Brongbong, Ds. Celukan Bawang, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	46 org
		KUB. Sumber Sari	4. KSU. Sumber Sari	Ds. Sumberkima, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng	
6	Jembrana	KUB. Bintang Segara	1. Bintang Segara	Banyubiru	20 orang
		Kelompok Nelayan Perancak	2. Danu Amerta Sejati	Perancak	120 orang

Lampiran I.g

**KELOMPOK SASARAN PENERIMA LAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
Pembinaan Kepada Kelompok Pembudidaya Ikan**

NAMA	ALAMAT
KABUPATEN JEMBRANA	
Pokdakan Air Mancur Jembrana	Desa Sangkaragung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Benih Kehidupan	Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Gumrih Ulam Sari	Desa Gumrih Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Manik Segara	Desa Candikusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Mina Buana	Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Mina Kembang	Desa Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Mina Sari Gilir	Desa melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Ulam Sari Guna	Desa Pengeragoan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Bali
Pokdakan Wana Sari	Desa Budeng Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Bali
Taman	Desa Tuwed Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana
Taman	Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali
KABUPATEN BULELENG	
PT. Bali Barra Mundi	Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
CV. Bali Vanname Sukses Abadi	Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
CV. Dwi Jaya	Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
CV. Multi Benih	Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
CV. Samudera Sejahtera	Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
PT. Horiko Abadi	Desa Banyupoh Kecamatan gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
PT. Pakarti Daksa Segara	Desa Penyabangan Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng Bali
Pokdakan Lebah Sari	Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Bali
Pokdakan Ulam Sari	Desa Temukus Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Bali
PT. Alam Merta Nusantara	Desa Banyupoh Kecamatan gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
PT. Nener Bina Hayati	Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
PT. Sea Six Energy Indonesia	Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali
KABUPATEN TABANAN	
Pokdakan Merta Nadi	Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Bali
Pokdakan Mina Arta Sesandan	Desa Megatai Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Bali
Pokdakan Mina Dharma Bakti	Desa Raing Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Bali
Pokdakan Mina Karya Abadi	Desa Pupuan Sawah Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Bali
Pokdakan Mina Pucak Sari	Tabanan Bali
Tanguntiti	Bali
Sentana	Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Bali
KABUPATEN BADUNG	
Pokdakan Mina Tani	Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali
Pokdakan Mitra Sejahtera	Desa Tangeb Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali
Pokdakan Sida Rahayu	Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung Bali
Wijaya	Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali
Pokdakan Tunjung Putih	Desa Kekeran Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali
KOTA DENPASAR	

NAMA	ALAMAT
Pokdakan Mina Mandiri	Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali
Pokdakan Mina Asri	Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali
Rahayu	Desa Kesiman Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali
Pokdakan Penatih Iestari	Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali
Pokdakan Tamiang Bali Mandiri	Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali
Pokdakan Tegal Belus	Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali
KABUPATEN GIANYAR	
Pokdakan Be D'teba	Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Mina Buana	Desa Buahman Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Bali
Demayu	Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Mina Gaga Mekar	Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Mina Sri Kumpul	Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Sukma Lestari	Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Tedung Mina Sari	Desa Abianbase Kecamatan Giuanyar Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Telaga Merta	Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali
Pokdakan Telaga Mesari	Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Bali
KABUPATEN BANGLI	
Pokdakan Daha Sentosa Jaya	Desa Demulih Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Bali
Pokdakan Danu Asri Sentosa	Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Bali
Pokdakan Jaya Abadi Apuan	Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Bali
Pokdakan Luluh Sejahtera	Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Bali
Pokdakan Mesari Baruna Jaya	Desa Songan Bawah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Bali
Pokdakan Telaga Ngembeng	Desa Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali
KABUPATEN KLUNGKUNG	
Pokdakan Manik Segara	Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Merta Segara I	Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Merta Segara II	Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Mina Asri	Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Mina Astri Lestari	Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Mina Uma	Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Mutiara Sani	Bali
Pokdakan Segara raksa	Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Tri Utama	Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Bali
Pokdakan Wah Gara	Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Bali
KABUPATEN KARANGASEM	
CV. Tri Mitra Makmur	Desa Sukadana Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Bali
Pokdakan Mina Karya Jaya	Bali
Pokdakan Mina Kerta Usaha	Bali
Pokdakan Mina Sari Murti	Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali
Pokdakan Mina Tani Yasa kerti	Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali
Pokdakan Mina Tirta Mekar	Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali
Pokdakan Tanjung Mekar	Bali
Pokdakan Werdhi Pala Kencana	Desa Duda Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Bali

Lampiran II

KERTAS KERJA
PEMETAAN MITRA PEMBANGUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2020 - 2024

No	Nama Organisasi Mitra Pembangunan		Kontak				Keterangan
			Nama Lengkap Pimpinan	Phone	Email	Alamat	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Komunitas						
	1	Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia	M. Abdi Suhufan	-	info@dfw.or.id	AD Premier Lt. 5 Suite 6, Jl. TB Simatupang No. 5, RT 005, RW 007, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550	dfw_indonesia
B	Ormas, Orsos, Org Keagamaan, Forum dll						
	1	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bali	Ir. I Nengah Manumudita, M.M	(0361) 9064680	-	Jl. Muding Indah No.3, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung Regency, Bali 80117	-
	2	Kesatuan Pelaut dan Pekerja Perikanan Indonesia (KP3I)	M. Sumardi	0217806874	Admin@kp3i.org	Jl. AUP, Komp. Politek AUP Gedung Tabularasa Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 – Indonesia	kp3i.union
	3	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)	Yasmine Simbolon	03613610078	-	Jl. Kembang Matahari I No.147, Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, 80235	mdpi_foundation
C	Instansi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal						
	1	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Laksana Tri Handoko	0811-1933-3639	ppid@brin.go.id	Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340	brin_indonesia
	2	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	Getreda Melsina Hehanussa	(0361) 4794821	bpspl.denpasar@kkp.go.id	Jalan Bypass Ida Bagus Mantra (sebelah pabrik semen Sarana Beton Perkasa), Blahbatu, Pering-Gianyar, Pering, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali	bpspldenpasar
	3	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa	Edi Purnomo, S.St.Pi., M.Si	(0361) 4480308	psdkp.benoa@kkp.go.id	Jalan Raya Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar, Bali 80223	pangkalanpsdkpbenoa
	4	Balai Produksi Induk Unggul dan Kekerangan Karangasem	Wendy Tri Prabowo	(0363) 2787803	bpiu2k@gmail.com	Jln. Raya Bugbug, Karangasem, Bali	bpiu2k
	5	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar	Ni Desak Nyoman Pradnyani	(0361) 4727390	bppmhkp.denpasar@gmail.com	Jl. Sunset Road No.77, Kec. Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali	bppmhkp_denpasar
	6	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol	Wawan Andriyanto, S.Pi., M.Sc	(0362) 92278	bbrblgondol@kkp.go.id	Jalan Singaraja-Gilimanuk, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Bali (81155)	Bppsdm Gondol
	7	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dr. Adi Wijaya, S.Pd., M.Si	(0365) 44269/44268	bpsdkp@kkp.go.id	Jl Seacorm KM 2 Jembrana, Bali - Indonesia	@BPISDKP
	8	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	Kartono, A.Pi, M.P	(0365) 42968 - 41542 - 43303	ppn.pengambangan@kkp.go.id	Jalan Pelabuhan No. 1 Pengambangan Kec. Negara, Kab. Jembrana - Bali Kode Pos 82251	@PPNPengambangan
	9	Loka Riset Perikanan Tuna, Benoa	Ni Nyoman Siti Mardiani Satria, S.Akt	0361-726201	lppt.benoa@gmail.com	Jalan Mertasari No. 140, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar 80224	bppsdm_lpptbenoa
	10	Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	Kapten Bakamla Kadek Lis Martiaveni, S.Pd., M.Ap	(0363)34301696	spkkl.bali@bakamla.go.id	Jl. Karangasem - Seraya, Seraya Bar., Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali 80811.	SPKKL BALI
D	Perguruan Tinggi / Akademisi / Praktisi / Ahli						
	1	Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T.,Ph.D	(0361) 701954, 704845	info@unud.ac.id	Jl. Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361	@UdayanaUniv
	2	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	I Ketut Sumandiarsa	(0365) 4503980	mail@pkpi.ac.id	Pengambangan, Negara, Jembrana Regency, Bali 82218	Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana
	3	Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa	Prof.Dr.Ir I Gde Suranaya Pandit, M.P	(0361) 223858	info@warmadewa.ac.id	Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali	universitaswarmadewa
	4	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pendidikan Ganesha	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd	(0362) 22570	humas@undiksha.ac.id	Jalan Udayana No.11 Singaraja - Bali 81116	akuakultur.undiksha
	5	Indonesian Marine Education & Research Organisation (MERO Foundation)	Dr. Rahmadi Prasetyo, ST., MT.	(+62) 812-3761-2211	contact@merofoundation.org	Banjar Dinas Muntig, Ds. Tulamben Kec. Kubu, Kab. Karangasem Bali 80853	merofoundationidn
E	Dunia Usaha						
	1	Gabungan Pengusaha Wisata Tirta (Gahawisri) Provinsi Bali	Ida Bagus Agung Partha Adnyana	-	info@gahawisribali.com	Jl. Prof Moh. Yamin No 17X, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali, Indonesia 80239	gahawisriimatabali
	2	Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Benoa	Dwi Agus Siswa Putra	(0361) 727399	info@atli.or.id	Jalan Ikan Tuna Raya Timur, Pelabuhan Benoa, Denpasar , Bali	-

LAMPIRAN III

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun							Keterangan
					Base Line 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Indeks	23,58	25,47	27,5	29,7	32,08	34,65	37,42	Dashboard IBEI Provinsi Bali
		Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	4,90	4,90	5,13	11,22	11,22	11,22	11,22	Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/ Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%
		Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas	Persen	68	70	75	80	85	90	95	Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%
		Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi	Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)	Persen	4,27	4,44	4,62	4,80	5,00	5,20	5,40	Data Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB) dari BPS*
		Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha	Persen	3,00	5,28	18,96	19,60	20,05	20,54	20,86	$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$
		Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali	Persen	26,54	27,07	27,61	28,16	28,73	29,30	29,89	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*
Penunjang Kesekretariatan												
		Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83	84	85	86	87	Survey IKM Dinas

LAMPIRAN IV

TABEL 3.2
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

Tujuan/Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
Tujuan	:	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan				
Sasaran	1	Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif	1.1	Penguatan tata kelola wilayah pesisir berbasis ekosistem	1.1.1	Penyusunan dan implementasi RZWP3K secara partisipatif
			1.2	Adaptasi iklim dan rehabilitasi ekosistem	1.2.1	Peningkatan luasan dan efektivitas kawasan konservasi
					1.2.2	Rehabilitasi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang
			1.3	Revitalisasi budaya bahari dalam perlindungan wilayah pesisir	1.3.1	Edukasi budaya bahari dan pelibatan masyarakat adat
	2	Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	2.1	Pengelolaan stok ikan berbasis ekosistem	2.1.1	Penerapan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) untuk menjaga keberlanjutan stok ikan
					2.1.2	Penetapan kuota tangkap adaptif terhadap perubahan iklim
					2.1.3	Penguatan kawasan konservasi perairan sebagai penyangga stok ikan
			2.2	Penguatan kapasitas nelayan dalam adaptasi iklim	2.2.1	Perluasan jangkauan asuransi nelayan
					2.2.2	Penguatan kelembagaan nelayan berbasis komunitas dan kearifan lokal
			2.3	Penyediaan infrastruktur dan sarana adaptif	2.3.1	Penyediaan early warning system (peringatan dini) untuk cuaca ekstrem dan bencana
2.3.2					Peningkatan kapasitas cold storage hemat energi dan rantai pasok perikanan resilien	

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan	
					2.3.3	Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring iklim dan bencana di sektor perikanan
	3	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi	3.1	Transformasi ekonomi biru	3.1.1	Optimalisasi produksi tangkap dan budidaya berbasis efisiensi
			3.2	Pengembangan kawasan komoditas unggulan	3.2.1	Pengembangan kawasan ekonomi pesisir terpadu
			3.3	Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan	3.3.1	Penguatan PAD melalui pengelolaan aset dan zona pesisir
					3.3.2	Penguatan konektivitas sektor kelautan dengan pariwisata
	4	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	4.1	Penguatan pengawasan, data spasial, dan kelembagaan	4.1.1	Penataan izin usaha berbasis zonasi dan daya dukung
					4.1.2	Penguatan koordinasi lintas sektor dan penegakan hukum
			4.2	Digitalisasi sistem pemantauan dan pengelolaan	4.2.1	Peningkatan sistem informasi pengawasan berbasis wilayah
			4.3	Kedaulatan sumber daya berbasis wilayah dan budaya lokal	4.3.1	Pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan partisipatif
	5	Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan	5.1	Penguatan hilirisasi dan pengolahan hasil perikanan	5.1.1	Dukungan peralatan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan
			5.2	Inovasi produk, promosi, dan kemitraan usaha	5.2.1	Sertifikasi mutu, keamanan pangan, dan akses pembiayaan UMKM
					5.2.2	Promosi produk unggulan berbasis budaya lokal
			5.3	Digitalisasi pemasaran dan logistik rantai dingin	5.3.1	Penguatan jaringan distribusi, e-commerce, dan logistik dingin

LAMPIRAN III

TABEL 4.1
RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Sasaran 1 RPJMD : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan				Indeks Ekonomi Biru (IEBI)		Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IEBI) Provinsi Bali
UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang PP Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan Kepmen KKP Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim		Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut		=Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100% Luas Perairan Bali = 915.302 ha
					Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	=(Jumlah Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki KKPR/L/Jumlah Seluruh Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut)*100% Data Dasar Pelaku Usaha 2025 = 523
				Meningkatnya Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	=(Kawasan Konservasi yang ditetapkan/Total Kawasan Konservasi)*100%
				Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Nusa Penida =20.034,17 (Ha) KKm= 1.243,41 Bling = 18.060,18 Karangasem = 5.478,41 Jmbrn = 2.124,01 bali selatan = 55.733,66
				Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	zona rehab KKP (Ha) buleleng = 66,14 karangasem = 11,97 jembrana = 51,99 Nusa Penida =105,74
				Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	
				Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Sub Kegiatan : Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	
				Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	
				Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Sub Kegiatan : Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	
				Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	
				Meningkatnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	Persentase masyarakat lokal dan tradisional yang terfasilitasi KKPRL	Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	=Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi/Jumlah kelompok masyarakat tradisional (pembudidaya ikan)*100% kelompok budidaya di laut = 79
				Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	=(Jumlah Kelompok Petani Garam yang di berdayakan/ Jumlah Kelompok Petani Garam)*100%
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	305 Orang Petani Garam
				Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	54 Kelompok
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	
				Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	
		Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap		Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas		Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%
					Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
				Meningkatnya produksi perikanan tangkap di wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	= Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	= Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di 2 UPTD Pelabuhan serta 1 data dan informasi Surat Keterangan Asal BBL.
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpun	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun yang diterbitkan	Sub Kegiatan : Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpun (SIPR)	= Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun di wilayah Buleleng dan Karangasem
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	=Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	= Dokumen produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan
				Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang berizin	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	=jumlah kapal perikanan yang sudah memiliki buku kapal/jumlah kapal perikanan di pengembangan*100% (Jumlah kapal di pengembangan 73)
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	= Jumlah penerbitan Buku Kapal Perikanan
				Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan sampai dengan 10 GT	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang berizin	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	=jumlah kapal perikanan yang sudah memiliki izin/jumlah kapal perikanan dibawah 10 GT seluruh Bali*100% (Jumlah kapal sampai 10 GT =18.146)
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	= Jumlah Buku Kapal Nelayan Kecil yang diterbitkan
		Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi			Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)		Data Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB) dari BPS
			Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)
				Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	=Produksi Perikanan Budidaya
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	
				Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	
		Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan		Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha		$X_{kp} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) / 4$
					Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = $(KPU / JKPU) \times 100\%$
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	$= (\text{Jumlah Pelaku Usaha yang patuh di tahun berjalan} / \text{total jumlah pelaku usaha tahun dasar } 2025) \times 100\%$ Tahun Dasar 2025 = 419
				Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Sub Kegiatan : Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Pemberian sanksi administrasi di pindah kesini karena sub keg sebelumnya di khususkan untuk daerah papua
				Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Sub Kegiatan : Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
				Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Sub Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
				Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Sub Kegiatan : Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
				Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	
				Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Budidaya = 79
				Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Tangkap = 188
				Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha KKPRL = 152 Pengawasan KKP di pindah kesini karena kegiatan sebelumnya di khususkan untuk daerah Papua
				Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Pengawas (POKMASMAS) 44 kelompok
				Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	=(Jumlah Pelaku Usaha yang patuh di tahun berjalan/total jumlah pelaku usaha tahun dasar 2025)*100% Tahun Dasar 2025 = 315 Pelaku
				Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan = 315
		Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan			Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali		Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*
			Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan		Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	= ((Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya x 100%)
				Meningkatnya unit pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi izin usaha	Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	=Jumlah Unit Usaha yang sudah memiliki standar izin usaha sampai Tahun n/Jumlah Unit Usaha sampai Tahun n * 100% (Jumlah Unit Usaha Yang Aktif 62)
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Capaian Akhir Tahun
				Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Sub Kegiatan : Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	di pindah kesini karena sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk kegiatan ini hanya untuk kekhususan papua
				Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha pengolah dan pemasar yang dibina	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit usaha yang dibina (Mikro-Kecil Menengah-Besar)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	
				Tersedianya Data dan Informasi kebutuhan bahan baku industri Pengolahan Ikan bagi unit usaha	Jumlah unit usaha yang terdata kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
				Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	AKI di gabung kesini karena kegiatan sebelumnya di khususkan untuk papua
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA							
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya		Indeks Ekonomi Biru (IBEI)		Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provinsi Bali
					Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)		Data Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB) dari BPS
					Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)
				Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Perairan Darat	Jumlah Produksi Induk dan Benih yang Berkualitas	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi UPTD
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BBI Sangeh, BBUG Klungkung, Tambak Kombading
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BBI Sangeh, BBUG Klungkung, Tambak Kombading

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN							
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan				Indeks Ekonomi Biru (IBEI)		Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provinsi Bali
		Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan			Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali		Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*
		Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	= ((Jumlah uji Tahun n - Jumlah yang di uji Tahun -n)/Jumlah yang di uji tahun -n x 100%)
			Meningkatnya Produk Hasil Perikanan yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Terjamin Mutu dan Keamanannya	Jumlah Produk Hasil Perikanan yang bersertifikat SNI serta terjamin mutu dan keamanannya	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Penerapan Tahun 2024 =26 Pengujian Tahun 2024 = 60 di Gabung karena kegiatan pengujian hanya untuk daerah kekhususan Papua	
			Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
			Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI							
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan				Indeks Ekonomi Biru (IBEI)		Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provinsi Bali
		Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif			Persentase Pemanfaatan Ruang Laut		=Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan			Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Program : Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	=Kawasan Konservasi yang dikelola/Total Kawasan Konservasi*100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Yang di Kelola
				Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Nusa Penida =20.034,17 (Ha) KKm= 1.243,41 Bling = 18.060,18 Karangasem = 5.478,41 Jmbrn = 2.124,01 bali selatan = 55.733,66
				Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	zona rehab KKP (Ha) buleleng = 66,14 karangasem = 11,97 jembrana = 51,99 Nusa Penida =105,74
				Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	=jumlah kelompok yang di berdayakan/jumlah kelompok *100%
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	95 Pelaku Usaha Wisata Bahari
UPTD PELABUHAN PERIKANAN							
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap		Indeks Ekonomi Biru (IBEI)		Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provinsi Bali
					Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas		Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%
					Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
				Meningkatnya Produksi Perikanan yang di daratkan di pelabuhan perikanan	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Ikan yang di Daratkan di Pelabuhan dengan asumsi kenaikan 2% tiap Tahun
				Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Paket prasarana pendukung penangkapan ikan terukur
				Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah dokumen yang pendukung penangkapan ikan terukur
				Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Paket sarana pendukung penangkapan ikan terukur

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola dengan baik	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
				Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	layananan Fungsi Pemerintahan yang memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Perikanan

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI		
												2025		2026		2027		2028		2029				2030	
												TARGET	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
	3					Sasaran 1 RPJMD : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Angka	23,58	25,47	27,50		29,70		32,08		34,65		37,42		37,42		
	3	25				Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Angka	23,58	25,47	27,5	Rp 40.622.087.272	29,7	Rp 44.522.935.477	32,08	Rp 49.482.482.220	34,65	Rp 52.926.181.604	37,42	Rp 54.725.879.799	37,42	Dashboard Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Provinsi Bali	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN															Rp 32.118.813.528		Rp 34.749.192.305		Rp 39.061.280.374		Rp 41.670.547.275		Rp 43.113.953.082		
						Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83		84		85		86		87		87	Survey IKM Dinas	
	3	25	01			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	83	Rp 28.120.206.345	84	Rp 29.258.742.285	85	Rp 29.368.979.679	86	Rp 30.839.043.727	87	Rp 31.908.050.944	87	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Inspektorat		
	3	25	01	1.01		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp 125.000.000	100	Rp 130.000.000	100	Rp 131.650.000	100	Rp 134.482.500	100	Rp 137.456.625	100			
	3	25	01	1.01	0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	Rp 50.000.000	4	Rp 55.000.000	4	Rp 56.650.000	4	Rp 59.482.500	4	Rp 62.456.625	20	Pohon Kinerja, Renja, Renstra, Peta Resiko		
	3	25	01	1.01	0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	5	RKA Induk		
	3	25	01	1.01	0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	5	RKA Perubahan		
	3	25	01	1.01	0004	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	5	DPA Induk		
	3	25	01	1.01	0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	5	DPA Perubahan		
	3	25	01	1.01	0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	Rp 40.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 40.000.000	4	Rp 40.000.000	20	Sidalev, LKJP, LPDP, Fisik Keuangan		
	3	25	01	1.01	0009	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2	2	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	2	Rp 15.000.000	10	Berita Acara Bilateral Meeting, Berita Acara Forum PD		
	3	25	01	1.02		Tersusunnya Administrasi Keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Dokumen	60	60	60	Rp 24.745.206.345	60	Rp 25.716.242.285	60	Rp 25.763.454.679	60	Rp 27.052.992.477	60	Rp 27.936.447.127	300			
	3	25	01	1.02	0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1610	1610	2016	Rp 24.685.806.345	2016	Rp 25.656.842.285	2016	Rp 25.704.054.679	2016	Rp 26.993.592.477	2016	Rp 27.877.047.127	10080	Jumlah Kebutuhan Pegawai = 144 Orang * 14 Bulan		
	3	25	01	1.02	0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	Rp 59.400.000	12	Rp 59.400.000	12	Rp 59.400.000	12	Rp 59.400.000	12	Rp 59.400.000	60			
	3	25	01	1.06		Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp 835.000.000	100	Rp 876.750.000	100	Rp 893.052.500	100	Rp 939.705.125	100	Rp 986.690.383	100			
	3	25	01	1.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	Rp 10.000.000	3	Rp 10.500.000	3	Rp 10.815.000	3	Rp 11.355.750	3	Rp 11.923.538	3	3 Bangunan Kantor		
	3	25	01	1.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	3	Rp 500.000.000	3	Rp 525.000.000	3	Rp 530.750.000	3	Rp 557.287.500	3	Rp 585.151.875	3	3 Bangunan Kantor		
	3	25	01	1.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5	Rp 150.000.000	5	Rp 157.500.000	5	Rp 162.225.000	5	Rp 170.336.250	5	Rp 178.853.063	25	ATK, Kertas, Bakom, Banten, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor		
	3	25	01	1.06	0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	2	Rp 25.000.000	2	Rp 26.250.000	2	Rp 27.037.500	2	Rp 28.389.375	2	Rp 29.808.844	10	Copy dan Cetak		
	3	25	01	1.06	0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	Rp 150.000.000	12	Rp 157.500.000	12	Rp 162.225.000	12	Rp 172.336.250	12	Rp 180.953.063	12			
	3	25	01	1.07		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp 350.000.000	100	Rp 367.500.000	100	Rp 374.525.000	100	Rp 393.251.250	100	Rp 412.913.813	100	3 Bangunan Kantor		
	3	25	01	1.07	0005	Tersedianya Mebel	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2	Rp 100.000.000	2			

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI								
												2025		2026		2027		2028		2029		2030											
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU										
	3	25	01	1.07	0010		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	Rp	250.000.000	3	Rp	267.500.000	3	Rp	274.525.000	3	Rp	293.251.250	3	Rp	312.913.813	3					
	3	25	01	1.08			Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	836.126.964	100	Rp	843.876.964	100	Rp	846.759.464	100	Rp	855.041.089	100	Rp	863.736.796	100					
	3	25	01	1.08	0001		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	Rp	5.000.000	12	Rp	5.250.000	12	Rp	5.407.500	12	Rp	5.677.875	12	Rp	5.961.769	60					
	3	25	01	1.08	0002		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp	150.000.000	12	Rp	157.500.000	12	Rp	160.225.000	12	Rp	168.236.250	12	Rp	176.648.063	60					
	3	25	01	1.08	0004		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	17	17	Rp	681.126.964	17	Rp	681.126.964	17	Rp	681.126.964	17	Rp	681.126.964	17	Rp	681.126.964	17					
	3	25	01	1.09			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	1.228.873.036	100	Rp	1.324.373.036	100	Rp	1.359.538.036	100	Rp	1.463.571.286	100	Rp	1.570.806.200	100					
	3	25	01	1.09	0001		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	10	10	Rp	329.469.664	10	Rp	361.969.664	10	Rp	380.444.664	10	Rp	417.493.414	10	Rp	454.394.602	10					10 Kendaraan Dinas
	3	25	01	1.09	0006		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	Rp	50.000.000	10	Rp	60.000.000	10	Rp	70.000.000	10	Rp	80.000.000	10	Rp	90.000.000	50					
	3	25	01	1.09	0009		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	Rp	739.403.372	3	Rp	786.903.372	3	Rp	791.128.372	3	Rp	842.214.622	3	Rp	896.355.185	3					3 Bangunan Kantor honor BMD
	3	25	01	1.09	0010		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10	Rp	110.000.000	10	Rp	115.500.000	10	Rp	117.965.000	10	Rp	123.863.250	10	Rp	130.056.413	50					PC, Printer, Laptop, Tv, Jaringan Internet, Jaringan Telephone, Aquarium, CCTV, Mebelkr, AC
							Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	4,90	4,90	5,13			11,22			11,22			11,22			11,22			11,22					=(Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100% Luas Perairan Bali = 915.302 ha
	3	25	02				Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Persen	28,49	30,59	32,50	Rp	1.619.339.250	34,42	Rp	1.948.524.649	36,33	Rp	2.052.438.871	38,24	Rp	2.445.602.505	40,15	Rp	2.634.983.017	40,15					=(Jumlah Pelaku Usaha yang Sudah Memiliki KKPR/LJumlah Seluruh Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut)*100% Data Dasar Pelaku Usaha 2025 = 523
	3	25	02	1.01			Meningkatnya Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi	Persen	66,67	83,33	83,33	Rp	764.100.000	100	Rp	917.220.000	100	Rp	970.081.000	100	Rp	1.155.780.000	100	Rp	1.247.242.400	100					=(Kawasan Konservasi yang ditetapkan/Total Kawasan Konservasi)*100%
	3	25	02	1.01	0002		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	44.816,17	46.940,18	46.940,18	Rp	120.000.000	102.673,84	Rp	144.000.000	102.673,84	Rp	152.200.000	102.673,84	Rp	182.500.000	102.673,84	Rp	195.100.000	102.673,84					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0003		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	0,19	0,19	0,20	Rp	210.000.000	0,30	Rp	252.000.000	0,40	Rp	265.600.000	0,50	Rp	312.720.000	0,60	Rp	338.737.600	2					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0006		Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan penwujudkan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	0	0	1	Rp	100.000.000	1	Rp	120.000.000	1	Rp	126.000.000	1	Rp	150.200.000	1	Rp	162.216.000	5					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0008		Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Sub Kegiatan : Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha	15	30	30	Rp	80.000.000	30	Rp	96.000.000	30	Rp	100.800.000	30	Rp	120.960.000	30	Rp	130.636.800	150					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0009		Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	0	0	1	Rp	75.000.000	1	Rp	90.000.000	1	Rp	95.500.000	1	Rp	114.600.000	1	Rp	123.768.000	5					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0011		Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Sub Kegiatan : Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	1	3	3	Rp	70.000.000	3	Rp	84.000.000	3	Rp	88.200.000	3	Rp	105.800.000	3	Rp	114.264.000	15					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0012		Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton	7.363	7.200	7.400	Rp	54.000.000	7.450	Rp	64.800.000	7.500	Rp	70.040.000	7.550	Rp	84.000.000	7.600	Rp	90.720.000	37.500,00					Data/Formula
	3	25	02	1.01	0015		Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	1	1	1	Rp	55.100.000	1	Rp	66.420.000	1	Rp	71.741.000	1	Rp	85.000.000	1	Rp	91.800.000	5					Data/Formula
	3	25	02	1.02			Meningkatnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)	Kegiatan : Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentase masyarakat lokal dan tradisional yang terfasilitasi KKPRL	Persen	0,00	0,00	1,27	Rp	80.000.000	1,27	Rp	96.000.000	1,27	Rp	100.800.000	1,27	Rp	120.960.000	1,27	Rp	130.636.800	6,33					=(Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi/Jumlah kelompok masyarakat tradisional (pembudidaya ikan)*100% kelompok budidaya di laut = 79
	3	25	02	1.02	007		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0	1	Rp	80.000.000	1	Rp	96.000.000	1	Rp	100.800.000	1	Rp	120.960.000	1	Rp	130.636.800	5					Data/Formula

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI							
	3	25	02	1.03								2025		2026		2027		2028		2029		2030										
												TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU										
							Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di bdayakan	Persen	7,41	14,81	18,52	Rp	775.239.250	37,04	Rp	935.304.649	55,56	Rp	981.557.871	77,78	Rp	1.168.862.505	100	Rp	1.257.103.817	100	=(Jumlah Kelompok Petani Garam yang di bdayakan/ Jumlah Kelompok Petani Garam)*100%			
							Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	15	15	15	Rp	150.239.250	15	Rp	185.304.649	15	Rp	194.057.871	15	Rp	232.862.505	15	Rp	252.223.817	75	305 Orang Petani Garam			
							Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikut Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	Kelompok	4	8	10	Rp	75.000.000	10	Rp	90.000.000	10	Rp	94.500.000	12	Rp	113.400.000	12	Rp	122.472.000	54	S4 Kelompok			
							Terpenuhiya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	1	1	2	Rp	100.000.000	2	Rp	120.000.000	2	Rp	126.000.000	2	Rp	151.200.000	2	Rp	163.296.000	10	Data/Formula			
							Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	1	1	7	Rp	150.000.000	7	Rp	180.000.000	7	Rp	189.000.000	7	Rp	220.800.000	7	Rp	238.464.000	35	Data/Formula			
							Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit	1	1	1	Rp	300.000.000	1	Rp	360.000.000	1	Rp	378.000.000	1	Rp	450.600.000	1	Rp	480.648.000	5	Data/Formula			
							Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim		Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas	Persen	68	70	75			80		85		90		95		95	Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%							
							Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	3,03	2	2	Rp	381.462.230	2	Rp	430.063.954	2	Rp	471.649.899	2	Rp	515.993.789	2	Rp	527.431.347	10	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)			
							Meningkatnya produksi perikanan tangkap di wilayah laut sampai dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Ton	104.280,76	106.366,38	108.493,71	Rp	325.000.000	110.663,58	Rp	367.945.000	112.876,85	Rp	403.319.899	115.134,39	Rp	441.893.789	117.437,08	Rp	451.849.347	564.605,60	= Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
							Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	1	1	Rp	20.000.000	1	Rp	22.000.000	1	Rp	24.200.000	1	Rp	25.620.000	1	Rp	26.132.400	5,00	= Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di 2 UPTD Pelabuhan serta 1 data dan informasi Surat Keterangan Asal BBL.			
							Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	10	4	4	Rp	150.000.000	5	Rp	175.445.000	5	Rp	192.569.899	6	Rp	211.618.789	6	Rp	215.968.847	26,00	Data/Formula			
							Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpun	Sub Kegiatan : Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpun (SIPR)	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun yang diterbitkan	Rekomendasi	0	2	2	Rp	5.000.000	2	Rp	5.500.000	2	Rp	6.050.000	2	Rp	6.655.000	2	Rp	6.788.100	10,00	= Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpun di wilayah Buleung dan Karangasem			
							Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	10	4	4	Rp	150.000.000	5	Rp	165.000.000	5	Rp	180.500.000	6	Rp	198.000.000	6	Rp	202.960.000	26,00	Data/Formula			
							Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat	Ton	1.126,12	1.148,64	1.171,61	Rp	13.862.230	1.195,04	Rp	15.258.954	1.218,95	Rp	16.784.000	1.243,32	Rp	18.000.000	1.268,19	Rp	18.360.000	6.097,12	=Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat			
							Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen	1	1	1	Rp	13.862.230	1	Rp	15.258.954	1	Rp	16.784.000	1	Rp	18.000.000	1	Rp	18.360.000	5,00	= Dokumen produksi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan			
							Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Kapal Perikanan Benukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang berizin	Persen	63,01	63,01	72,60	Rp	7.600.000	79,45	Rp	8.360.000	86,30	Rp	9.196.000	93,15	Rp	10.100.000	100	Rp	10.302.000	100	=jumlah kapal perikanan yang sudah memiliki buku kapal/jumlah kapal perikanan di pengembangan*100% (Jumlah kapal di pengembangan 73)			
							Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Rekomendasi	5	5	5	Rp	7.600.000	5	Rp	8.360.000	5	Rp	9.196.000	5	Rp	10.100.000	5	Rp	10.302.000	30,00	= Jumlah penerbitan Buku Kapal Perikanan			
							Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan sampai dengan 10 GT	Kegiatan : Pendaftaran Kapal Perikanan Benukuran sampai dengan 10 GT yang Berperizni di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kapal Perikanan Benukuran sampai dengan 10 GT yang berizin	Persen	1,16	1,22	1,38	Rp	35.000.000	1,55	Rp	38.500.000	1,71	Rp	42.350.000	1,88	Rp	46.000.000	2,04	Rp	46.920.000	2,04	=jumlah kapal perikanan yang sudah memiliki izin/jumlah kapal perikanan dibawah 10 GT seluruh Bali*100% (Jumlah kapal sampai 10 GT =18.146)			
							Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Sub Kegiatan : Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	10	30	Rp	35.000.000	30	Rp	38.500.000	30	Rp	42.350.000	30	Rp	46.000.000	30	Rp	46.920.000	160,00	= Jumlah Buku Kapal Nelayan Kecil yang diterbitkan			
							Meningkatnya Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi		Persentase Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi bali terhadap PORB provinsi bali (AOHB)	Persen	4,27	4,44	4,62			4,80		5,00		5,20		5,40		5,40	Data Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi bali terhadap PORB provinsi bali (AOHB) dari BPS							
							Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1,75	2	2	Rp	311.767.498	2	Rp	387.930.509	2	Rp	426.462.360	2	Rp	470.004.927	2	Rp	483.560.207	10	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)			
							Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Laut	Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32.787,42	33.443,17	34.112,04	Rp	311.767.498	34.794,28	Rp	387.930.509	35.490,16	Rp	426.462.360	36.199,97	Rp	470.004.927	36.923,96	Rp	483.560.207	177.520,40	=Produksi Perikanan Budidaya			
							Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	Rp	17.280.000	1	Rp	20.736.000	1	Rp	22.809.600	1	Rp	25.090.560	1	Rp	25.299.277	5,00	Data/Formula			
							Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	0	2	Rp	71.300.000	2	Rp	90.560.000	2	Rp	99.616.000	3	Rp	110.473.931	3	Rp	113.788.149	12,00	Data/Formula			
							Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	3	2	Rp	68.000.000	2	Rp	87.600.000	2	Rp	96.360.000	3	Rp	105.996.000	3	Rp	109.175.880	12,00	Data/Formula			

NO.	KODE REKENING						Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI														
													2025				2026				2027				2029				2030											
													TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU									
	3	25	04	1.05	0007			Terbarnya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pembinan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang	0	0	40	Rp	15.000.000	40	Rp	20.809.512	40	Rp	22.629.263	40	Rp	24.892.189	40	Rp	25.638.087	200,00	Data/Formula										
	3	25	04	1.05	0011			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	0	12	2	Rp	50.000.000	2	Rp	60.000.000	3	Rp	66.000.000	3	Rp	72.600.000	3	Rp	74.778.000	13,00	Data/Formula										
	3	25	04	1.05	0013			Teritorialnya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6	12	14	Rp	40.187.498	16	Rp	48.224.997	18	Rp	53.047.497	20	Rp	58.352.247	22	Rp	60.102.814	90,00	Data/Formula										
	3	25	04	1.05	0014			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Unit	0	0	2	Rp	50.000.000	2	Rp	60.000.000	3	Rp	66.000.000	3	Rp	72.600.000	3	Rp	74.778.000	13,00	Data/Formula										
								Terwujudnya keadulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan		Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha	Persen	3	5,28	18,96		19,60		20,05		20,54		20,86		100	Xkp=(X1+X2+X3+X4)/4															
	3	25	05					Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	3	5,28	18,96	Rp	770.457.361	19,60	Rp	1.657.669.734	20,05	Rp	5.574.193.709	20,54	Rp	6.118.365.656	20,86	Rp	6.250.677.258	100	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPJKPKPU) x 100%										
	3	25	05	1.01				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persen	3,00	7,16	18,62	Rp	670.457.361	19,09	Rp	1.547.669.734	19,57	Rp	5.453.193.709	20,05	Rp	5.985.265.656	20,29	Rp	6.113.584.258	97,61	=(Jumlah Pelaku Usaha yang patuh di tahun berjalan/total jumlah pelaku usaha tahun dasar 2025)*100% Tahun Dasar 2025 = 419										
	3	25	05	1.01	0008			Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Sub Kegiatan : Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	0	0	3	Rp	9.600.000	4	Rp	10.560.000	5	Rp	11.616.000	6	Rp	12.777.600	7	Rp	13.160.928	25	Pemberian sanksi administrasi di pindah kesini karena sub keg sebelumnya di khususkan untuk daerah papua										
	3	25	05	1.01	0009			Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Sub Kegiatan : Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang	0	0	5	Rp	100.592.000	6	Rp	110.651.200.00	7	Rp	121.716.320	8	Rp	133.887.954	9	Rp	136.904.592	35	Data/Formula										
	3	25	05	1.01	0010			Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Sub Kegiatan : Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	0	0	12	Rp	90.265.361	24	Rp	99.291.897	36	Rp	109.221.089	48	Rp	120.143.195	60	Rp	122.747.490	180	Data/Formula										
	3	25	05	1.01	0011			Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diawak	Sub Kegiatan : Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	0	0	1	Rp	20.000.000	1	Rp	22.000.000	2	Rp	24.200.000	3	Rp	26.620.000	6	Rp	27.418.600	6	Data/Formula										
	3	25	05	1.01	0012			Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit	0	0	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	3.750.757.000	2	Rp	4.112.585.277	3	Rp	4.186.723.470	6	Data/Formula										
	3	25	05	1.01	0013			Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	0	13	Rp	100.000.000	15	Rp	110.000.000	16	Rp	121.000.000	17	Rp	133.100.000	18	Rp	137.093.000	79	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Budidaya = 79										
	3	25	05	1.01	0014			Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	0	37	Rp	100.000.000	37	Rp	110.000.000	38	Rp	121.000.000	38	Rp	133.100.000	38	Rp	137.093.000	188	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Tangkap = 188										
	3	25	05	1.01	0015			Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	0	0	0	Rp	-	1	Rp	803.316.637	1	Rp	883.648.300	2	Rp	972.013.130	2	Rp	1.001.173.523	6	Data/Formula										
	3	25	05	1.01	0016			Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Sub Kegiatan : Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	30	30	28	Rp	100.000.000	28	Rp	110.000.000	28	Rp	121.000.000	29	Rp	133.100.000	29	Rp	137.093.000	142	Jumlah Pelaku Usaha KKPRL = 152 Pengawasan KKP di pindah kesini karena kegiatan sebelumnya di khususkan untuk daerah Papua										
	3	25	05	1.01	0017			Kelompok Masyarakat Pengawas (POMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Sub Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POMASWAS)	Jumlah POMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat	0	40	40	Rp	150.000.000	40	Rp	165.000.000	42	Rp	181.500.000	42	Rp	199.650.000	44	Rp	205.639.500	44	Jumlah Kelompok Pengawas (POMASMAS) 44 kelompok										
	3	25	05	1.01	0018			Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum	0	0	0	Rp	-	1	Rp	6.850.000	1	Rp	7.535.000	1	Rp	8.288.500	1	Rp	8.537.155	4	Data/Formula										
	3	25	05	1.02				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan : Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawe, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persen	0	0	20,00	Rp	100.000.000	20,00	Rp	110.000.000	20,00	Rp	121.000.000	20,00	Rp	133.100.000	20,00	Rp	137.093.000	100	=(Jumlah Pelaku Usaha yang patuh di tahun berjalan/total jumlah pelaku usaha tahun dasar 2025)*100% Tahun Dasar 2025 = 315 Pelaku										
	3	25	05	1.02	0004			Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha	0	0	63	Rp	100.000.000	63	Rp	110.000.000	63	Rp	121.000.000	63	Rp	133.100.000	63	Rp	137.093.000	315	Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan = 315										
								Meningkatnya Daya Saing Produt Olahan Hasil Perikanan		Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali	Persen	26,54	27,07	27,61		28,16		28,73		29,30		29,89		29,89		29,89		29,89	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*											
	3	25	06					Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan	Persen	2,22	2	2	Rp	915.580.844	2	Rp	1.066.261.174	2	Rp	1.167.555.856	2	Rp	1.281.536.671	2	Rp	1.309.250.309	10	=(Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya x 100%										
	3	25	06	1.01				Meningkatnya unit pengolah dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi izin usaha	Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Persen	25,81	29,03	33,87	Rp	172.400.000	41,94	Rp	199.983.999	50,00	Rp	215.982.398	58,06	Rp	237.580.638	66,13	Rp	240.975.596	66,13	=(Jumlah Unit Usaha yang sudah memiliki standar izin usaha sampai Tahun n/Jumlah Unit Usaha sampai Tahun n-1 * 100% (Jumlah Unit Usaha Yang Aktif 62)										

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSANI/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI																		
												2025				2026				2027				2028				2029				2030											
												TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU											
	3	25	06	1.01	0004		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	2	1	1	Rp	63.467.016	1	Rp	73.621.738	1	Rp	80.963.911	1	Rp	89.062.303	1	Rp	90.754.772	5	Capaian Akhir Tahun														
	3	25	06	1.01	0005		Tersedianya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Sub Kegiatan : Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi	39	30	15	Rp	108.932.984	20	Rp	126.362.261	25	Rp	134.998.487	30	Rp	148.498.335	35	Rp	150.220.824	125	di pindah kesini karena sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk kegiatan ini hanya untuk kekhususan papua														
	3	25	06	1.02			Meningkatnya kemampuan pemetaan dalam penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha pengolah dan pemasar yang dibina	Unit Usaha	38	30	24	Rp	405.294.672	24	Rp	474.329.216	24	Rp	521.762.137	24	Rp	573.938.350	24	Rp	590.156.500	120	Jumlah Unit usaha yang dibina (Mikro-Kecil Menengah-Besar)														
	3	25	06	1.02	0003		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	38	30	24	Rp	405.294.672	24	Rp	474.329.216	24	Rp	521.762.137	24	Rp	573.938.350	24	Rp	590.156.500	120	Data/Formula														
	3	25	06	1.03			Tersedianya Data dan Informasi kebutuhan bahan baku industri Pengolahan Ikan bagi unit usaha	Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha yang terdapat kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan	Unit Usaha	6	6	6	Rp	337.886.172	6	Rp	391.947.959	6	Rp	429.811.321	6	Rp	470.017.683	6	Rp	478.118.213	30	Unit Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan														
	3	25	06	1.03	0001		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sub Kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	Rp	337.886.172	1	Rp	391.947.959	1	Rp	429.811.321	1	Rp	470.017.683	1	Rp	478.118.213	5	AKI di gabung kesini karena kegiatan sebelumnya di khususan untuk papua														
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA															Rp	2.691.500.000		Rp	3.005.575.000		Rp	3.228.239.750		Rp	3.492.505.408		Rp	3.592.978.491															
							Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83					84		85			86			87		87															
	3	25	01				Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	83	Rp	896.500.000	84	Rp	941.325.000	85	Rp	969.564.750	86	Rp	1.018.042.988	87	Rp	1.068.945.141	87															
	3	25	01	1.06			Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp	179.433.708	100	Rp	190.408.708	100	Rp	197.322.958	100	Rp	209.192.421	100	Rp	221.655.358	100															
	3	25	01	1.06	0001		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	Rp	10.000.000	3	Rp	10.500.000	3	Rp	10.815.000	3	Rp	11.355.750	3	Rp	11.923.538	15	3	Bangunan Kantor													
	3	25	01	1.06	0002		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	Rp	10.000.000	3	Rp	10.500.000	3	Rp	10.815.000	3	Rp	11.355.750	3	Rp	11.923.538	15	3	Bangunan Kantor													
	3	25	01	1.06	0004		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	3	Rp	97.500.000	3	Rp	102.375.000	3	Rp	105.446.250	3	Rp	110.718.563	3	Rp	116.254.491	15															
	3	25	01	1.06	0005		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	Rp	2.000.000	2	Rp	2.100.000	2	Rp	2.163.000	2	Rp	2.271.150	2	Rp	2.384.708	10	Copy dan Cetak														
	3	25	01	1.06	0009		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	Rp	59.933.708	12	Rp	64.933.708	12	Rp	68.083.708	12	Rp	73.491.208	12	Rp	79.169.083	60															
	3	25	01	1.07			Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	50.000.000	100	Rp	52.500.000	100	Rp	54.075.000	100	Rp	56.778.750	100	Rp	59.617.688	100	3	Bangunan Kantor													
	3	25	01	1.07	0010		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	Rp	50.000.000	3	Rp	52.500.000	3	Rp	54.075.000	3	Rp	56.778.750	3	Rp	59.617.688	3															
	3	25	01	1.08			Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	392.397.752	100	Rp	399.997.752	100	Rp	404.785.752	100	Rp	413.005.152	100	Rp	421.635.523	100															
	3	25	01	1.08	0001		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	Rp	2.000.000	12	Rp	2.100.000	12	Rp	2.163.000	12	Rp	2.271.150	12	Rp	2.384.708	60															
	3	25	01	1.08	0002		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp	69.867.416	12	Rp	77.367.416	12	Rp	82.092.416	12	Rp	90.203.666	12	Rp	98.720.479	60															
	3	25	01	1.08	0004		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	8	8	Rp	320.530.336	8	Rp	320.530.336	8	Rp	320.530.336	8	Rp	320.530.336	8	Rp	320.530.336	8															
	3	25	01	1.09			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	274.668.540	100	Rp	298.418.540	100	Rp	313.381.040	100	Rp	339.066.665	100	Rp	366.036.572	100															

NO.	KODE REKENING				Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSANI / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI					
											2025		2026		2027		2028		2029		2030								
											TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU								
	3	25	01	1.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	Rp	94.867.418	5	Rp	103.617.416	5	Rp	109.129.916	5	Rp	118.593.041	5	Rp	128.529.322	5	5 Kendaraan Dinas
	3	25	01	1.09	0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	Rp	20.000.000	10	Rp	30.000.000	10	Rp	35.000.000	10	Rp	40.000.000	10	Rp	45.000.000	10	
	3	25	01	1.09	0009	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	Rp	129.801.124	3	Rp	133.301.124	3	Rp	136.806.124	3	Rp	146.406.374	3	Rp	156.736.637	3	3 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.09	0010	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	Rp	30.000.000	3	Rp	31.500.000	3	Rp	32.445.000	3	Rp	34.067.250	3	Rp	35.770.613	3	3 Bangunan Kantor
						Meningkatnya Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi			Persentase Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi bali terhadap PORB provinsi bali (ADHB)	Persen	4,27	4,44	4,62			4,80		5,00		5,20		5,40		5,40		5,40		Data Kontribusi PORB sektor perikanan provinsi bali terhadap PORB provinsi bali (ADHB) dari BPS	
	3	25	04			Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1,75	2	2	Rp	1.795.000.000	2	Rp	2.064.250.000	2	Rp	2.258.675.000	2	Rp	2.474.542.500	2	Rp	2.524.033.350	10	= (Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya x 100%)
	3	25	04	1.06		Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Perairan Darat		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Induk dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.250.000	1.300.000	1.326.000	Rp	1.795.000.000	1.352.520	Rp	2.064.250.000	1.379.570	Rp	2.258.675.000	1.407.162	Rp	2.474.542.500	1.435.305	Rp	2.524.033.350	6.900.557	Produksi UPTD
	3	25	04	1.06	0003	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3	3	Rp	845.000.000	3	Rp	971.750.000	3	Rp	1.056.925.000	3	Rp	1.162.617.500	3	Rp	1.185.869.850	3	BBi Sangheh, BBUG Klungkung, Tambak Kombading
	3	25	04	1.06	0004	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3	3	Rp	950.000.000	3	Rp	1.092.500.000	3	Rp	1.201.750.000	3	Rp	1.311.925.000	3	Rp	1.338.163.500	3	BBi Sangheh, BBUG Klungkung, Tambak Kombading
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN														Rp	2.496.334.454		Rp	2.794.424.606		Rp	2.980.736.730		Rp	3.220.617.302		Rp	3.321.584.317		
						Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83			84		85		86		87		87					
	3	25	01			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	83	Rp	984.000.000	84	Rp	1.033.200.000	85	Rp	1.052.196.000	86	Rp	1.103.805.799	87	Rp	1.158.996.092	87	
	3	25	01	1.06		Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp	118.000.000	100	Rp	123.900.000	100	Rp	126.617.000	100	Rp	129.947.849	100	Rp	136.445.243	100	
	3	25	01	1.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp	10.000.000	1	Rp	10.500.000	1	Rp	10.815.000	1	Rp	11.355.750	1	Rp	11.923.538	5	1 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Rp	12.000.000	3	Rp	12.600.000	3	Rp	12.978.000	3	Rp	13.626.900	3	Rp	14.308.245	15	1 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Rp	39.500.000	3	Rp	41.475.000	3	Rp	42.719.250	3	Rp	44.855.212	3	Rp	47.097.973	15	1 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.06	0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	Rp	6.500.000	2	Rp	6.825.000	2	Rp	7.029.750	2	Rp	7.381.237	2	Rp	7.750.299	10	COPY dan Cetak
	3	25	01	1.06	0009	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	Rp	50.000.000	12	Rp	52.500.000	12	Rp	53.075.000	12	Rp	52.728.750	12	Rp	55.365.188	60	
	3	25	01	1.07		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	100.000.000	100	Rp	105.000.000	100	Rp	106.150.000	100	Rp	111.457.500	100	Rp	117.030.375	100	1 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.07	0010	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	Rp	100.000.000	1	Rp	105.000.000	1	Rp	106.150.000	1	Rp	111.457.500	1	Rp	117.030.375	1	
	3	25	01	1.08		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	346.265.168	100	Rp	355.565.168	100	Rp	359.424.168	100	Rp	369.382.118	100	Rp	379.837.966	100	
	3	25	01	1.08	0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	Rp	66.000.000	12	Rp	69.300.000	12	Rp	70.379.000	12	Rp	73.897.950	12	Rp	77.592.848	60	
	3	25	01	1.08	0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp	120.000.000	12	Rp	126.000.000	12	Rp	128.780.000	12	Rp	135.219.000	12	Rp	141.979.950	60	
	3	25	01	1.08	0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	4	Rp	160.265.168	4	Rp	160.265.168	4	Rp	160.265.168	4	Rp	160.265.168	4	Rp	160.265.168	4	
	3	25	01	1.09		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	419.734.832	100	Rp	448.734.832	100	Rp	460.004.832	100	Rp	493.018.332	100	Rp	525.682.508	100	
	3	25	01	1.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	4	4	Rp	100.000.000	4	Rp	105.000.000	4	Rp	107.150.000	4	Rp	114.507.500	4	Rp	120.232.875	4	4 Kendaraan Dinas

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI					
												2025		2026		2027		2028		2029		2030								
												TARGET	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
	3	25	01	1.09	0006		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	Rp	20.000.000	10	Rp	35.000.000	10	Rp	40.000.000	10	Rp	45.000.000	10					
	3	25	01	1.09	0009		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Rp	269.734.832	1	Rp	282.234.832	1	Rp	285.409.832	1	Rp	304.443.582	1	Rp	324.679.020	1	1 Bangunan Kantor	
	3	25	01	1.09	0010		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	Rp	30.000.000	1	Rp	31.500.000	1	Rp	32.445.000	1	Rp	34.067.250	1	Rp	35.770.613	1	1 Bangunan Kantor	
							Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan			Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali	Persen	26,54	27,07	27,61		28,16		28,73		29,30		29,89		29,89		29,89	Ekspor Provinsi Bali Menurut Kelompok Komoditas Utama, BPS*			
	3	25	06				Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Persen	2	2	2	Rp	1.512.334.454	2	Rp	1.761.224.606	2	Rp	1.928.540.730	2	Rp	2.116.811.503	2	Rp	2.162.588.225	10	= ((Jumlah uji Tahun n - Jumlah yang di uji Tahun -n)/Jumlah yang di uji tahun -n x 100%)
	3	25	06	1.02			Meningkatnya Produk Hasil Perikanan yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Terjamin Mutu dan Keamanannya	Kegiatan : Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Produk Hasil Perikanan yang bersertifikat SNI serta terjamin mutu dan keamanannya	Dokumen	102	86	80	Rp	1.512.334.454	82	Rp	1.761.224.606	84	Rp	1.928.540.730	86	Rp	2.116.811.503	88	Rp	2.162.588.225	420	Penerapan Tahun 2024 =26 Pengujian Tahun 2024 = 60 di Gabung karena kegiatan pengujian hanya untuk daerah kekhususan Papua	
	3	25	06	1.02	0003		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	7	7	7	Rp	120.000.000	7	Rp	185.000.000	7	Rp	203.500.000	7	Rp	223.850.000	7	Rp	229.446.250	35	
	3	25	06	1.02	0004		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pembinaan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan	76	60	60	Rp	1.392.334.454	62	Rp	1.576.224.606	64	Rp	1.725.040.730	66	Rp	1.892.961.503	68	Rp	1.931.141.975	320	sampel Tahun 2024 = 4010
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI															Rp	2.393.389.290		Rp	2.656.091.066		Rp	2.819.273.291		Rp	3.040.051.361		Rp	3.142.472.920		
							Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83		84		85		86		87		87		87				
	3	25	01				Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	83	Rp	1.145.000.000	84	Rp	1.202.250.000	85	Rp	1.227.317.500	86	Rp	1.292.683.375	87	Rp	1.357.317.546	87	
	3	25	01	1.06			Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp	167.933.708	100	Rp	178.333.708	100	Rp	182.885.708	100	Rp	196.033.308	100	Rp	207.838.288	100	
	3	25	01	1.06	0001		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Rp	35.000.000	4	Rp	36.750.000	5	Rp	37.852.500	5	Rp	39.745.125	5	Rp	41.732.381	5	5 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.06	0002		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Rp	8.000.000	4	Rp	8.400.000	5	Rp	8.652.000	5	Rp	9.084.600	5	Rp	9.538.830	5	5 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.06	0004		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3	Rp	40.000.000	4	Rp	42.000.000	5	Rp	43.260.000	5	Rp	45.423.000	5	Rp	47.694.150	5	
	3	25	01	1.06	0005		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	2	Rp	25.000.000	2	Rp	26.250.000	2	Rp	27.037.500	2	Rp	28.389.375	2	Rp	29.808.844	10	Copy dan Cetak
	3	25	01	1.06	0009		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	Rp	59.933.708	12	Rp	64.933.708	12	Rp	66.083.708	12	Rp	73.391.208	12	Rp	79.064.083	12	
	3	25	01	1.07			Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	69.867.416	100	Rp	77.367.416	100	Rp	80.092.416	100	Rp	88.103.666	100	Rp	96.515.479	100	5 Bangunan Kantor
	3	25	01	1.07	0010		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	3	Rp	69.867.416	4	Rp	77.367.416	5	Rp	80.092.416	5	Rp	88.103.666	5	Rp	96.515.479	5	
	3	25	01	1.08			Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	452.662.920	100	Rp	455.262.920	100	Rp	455.900.920	100	Rp	458.662.820	100	Rp	461.562.816	100	
	3	25	01	1.08	0001		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	Rp	2.000.000	12	Rp	2.100.000	12	Rp	2.163.000	12	Rp	2.271.150	12	Rp	2.384.708	60	
	3	25	01	1.08	0002		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp	50.000.000	12	Rp	52.500.000	12	Rp	53.075.000	12	Rp	55.728.750	12	Rp	58.515.188	60	

NO.	KODE REKENING				Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSANI / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI									
											2025				2026				2027				2028												
											TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU										
	3	25	01	1.08	0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	10	10	10	Rp	400.662.920	10	Rp	400.662.920	10	Rp	400.662.920	10	Rp	400.662.920	10	Rp	400.662.920	10							
	3	25	01	1.09		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	454.535.956	100	Rp	491.295.956	100	Rp	508.438.456	100	Rp	549.883.581	100	Rp	591.400.963	100								
	3	25	01	1.09	0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	5	5	5	Rp	134.933.708	5	Rp	143.683.708	5	Rp	147.196.208	5	Rp	158.559.333	5	Rp	168.490.614	5	5 Kendaraan Dinas							
	3	25	01	1.09	0006	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	Rp	20.000.000	10	Rp	30.000.000	10	Rp	35.000.000	10	Rp	40.000.000	10	Rp	45.000.000	10								
	3	25	01	1.09	0009	Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	3	Rp	229.668.540	4	Rp	242.168.540	5	Rp	248.343.540	5	Rp	267.527.290	5	Rp	287.920.228	5	5 Bangunan Kantor							
	3	25	01	1.09	0010	Tertaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	3	Rp	69.933.708	4	Rp	75.433.708	5	Rp	77.898.708	5	Rp	83.796.958	5	Rp	89.990.121	5	5 Bangunan Kantor							
						Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif		Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	Persen	4,90	4,80	5,13			11,22		11,22			11,22		11,22		11,22		11,22		=Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Luas Total Perairan Provinsi Bali x 100%							
	3	25	02			Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	Program : Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persen	66,67	66,67	83,33	Rp	1.248.389.290	100	Rp	1.453.841.066	100	Rp	1.591.955.791	100	Rp	1.747.367.886	100	Rp	1.785.155.374	100%	=Kawasan Konservasi yang dikelola/Total Kawasan Konservasi*100%							
	3	25	02	1.01		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan : Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	4	5	5	Rp	1.098.389.290	6	Rp	1.279.841.066	6	Rp	1.400.555.791	6	Rp	1.536.827.986	6	Rp	1.570.404.574	6	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Yang di Kelola							
	3	25	02	1.01	0002	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	44.816,17	46.940,18	46.940,18	Rp	748.389.290	102.673,84	Rp	873.841.066	102.673,84	Rp	953.955.791	102.673,84	Rp	1.045.567.986	102.673,84	Rp	1.069.319.374	102.673,84	Nusa Perida =20.034,17 (Ha) KOR= 1.243,41 Blng = 18.060,18 Karangasem = 5.478,41 Jimbar = 2.124,01 ball selatan = 55.733,66							
	3	25	02	1.01	0003	Terhabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	0,19	0,19	0,20	Rp	350.000.000	0,30	Rp	406.000.000	0,40	Rp	446.600.000	0,50	Rp	491.260.000	0,60	Rp	501.085.200	2	zona rehab KKP (Ha) buleleng = 66,14 karangasem = 11,97 jembrana = 51,99 Nusa Perida =105,74							
	3	25	02	1.03		Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan	Persen	0	0	20	Rp	150.000.000	20	Rp	174.000.000	20	Rp	191.400.000	20	Rp	210.540.000	20	Rp	214.750.800	100	=jumlah kelompok yang di berdayakan/jumlah kelompok *100%							
	3	25	02	1.03	0001	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	20	Rp	150.000.000	20	Rp	174.000.000	20	Rp	191.400.000	20	Rp	210.540.000	20	Rp	214.750.800	100	95 Pelaku Usaha Wisata Bahari							
UPTD PELABUHAN PERIKANAN													Rp	922.050.000	Rp	1.317.652.500	Rp	1.392.962.075	Rp	1.502.380.178	Rp	1.554.890.989													
						Meningkatnya Akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	83		84		85		86		87		87		87											
	3	25	01			Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Ususan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81	82	83	Rp	632.050.000	84	Rp	663.652.500	85	Rp	677.562.075	86	Rp	715.440.178	87	Rp	751.212.189	87								
	3	25	01	1.06		Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	Rp	124.250.000	100	Rp	130.462.500	100	Rp	134.376.375	100	Rp	143.095.193	100	Rp	150.249.954	100								
	3	25	01	1.06	0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp	10.000.000	2	Rp	10.500.000	2	Rp	10.815.000	2	Rp	11.355.750	2	Rp	11.923.538	2	2 Bangunan Kantor							
	3	25	01	1.06	0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp	30.000.000	2	Rp	31.500.000	2	Rp	32.445.000	2	Rp	34.067.250	2	Rp	35.770.613	2	2 Bangunan Kantor							
	3	25	01	1.06	0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	Rp	32.500.000	2	Rp	34.125.000	2	Rp	35.148.750	2	Rp	36.906.187	2	Rp	38.751.496	2	2 Bangunan Kantor							
	3	25	01	1.06	0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	Rp	25.000.000	2	Rp	26.250.000	2	Rp	27.037.500	2	Rp	28.389.375	2	Rp	29.808.844	10	Copy dan Cetak							
	3	25	01	1.06	0009	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	Rp	26.750.000	12	Rp	28.087.500	12	Rp	28.930.125	12	Rp	32.376.631	12	Rp	33.995.463	12								
	3	25	01	1.07		Terwujudnya pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	40.000.000	100	Rp	42.000.000	100	Rp	43.260.000	100	Rp	45.423.000	100	Rp	47.694.150	100	2 Bangunan Kantor							
	3	25	01	1.07	0010	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	Rp	40.000.000	2	Rp	42.000.000	2	Rp	43.260.000	2	Rp	45.423.000	2	Rp	47.694.150	2								
	3	25	01	1.08		Tercapainya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	20.000.000	100	Rp	21.000.000	100	Rp	21.630.000	100	Rp	22.711.500	100	Rp	23.847.076	100								
	3	25	01	1.08	0001	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	Rp	2.000.000	12	Rp	2.100.000	12	Rp	2.163.000	12	Rp	2.271.150	12	Rp	2.384.708	60								

NO.	KODE REKENING					Tujuan	SASARAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KONDISI AKHIR PERIODE PERENCANAAN	DATA DUKUNG/FORMULASI		
												2025		2026		2027		2028		2029		2030							
												TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
	3	25	01	1.08	0002		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	Rp	18.000.000	12	Rp	18.900.000	12	Rp	19.467.000	12	Rp	20.440.350	12	Rp	21.462.368	60	
	3	25	01	1.09			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	100	100	Rp	447.800.000	100	Rp	470.190.000	100	Rp	478.295.700	100	Rp	504.210.485	100	Rp	529.421.009	100	
	3	25	01	1.09	0002		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	2	Rp	127.800.000	2	Rp	134.190.000	2	Rp	136.215.700	2	Rp	145.026.485	2	Rp	152.277.809	2	
	3	25	01	1.09	0006		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	10	Rp	20.000.000	10	Rp	30.000.000	10	Rp	35.000.000	10	Rp	40.000.000	10	Rp	45.000.000	10	
	3	25	01	1.09	0009		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	Rp	280.000.000	2	Rp	285.000.000	2	Rp	285.450.000	2	Rp	296.472.500	2	Rp	308.296.125	2	
	3	25	01	1.09	0010		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	Rp	20.000.000	4	Rp	21.000.000	4	Rp	21.630.000	4	Rp	22.711.500	4	Rp	23.847.075	4	
							Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim		Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas	Persen	68,00	70,00	75,00			80,00		85,00		90,00		95,00			95,00		Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi/Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis x 100%		
	3	25	03				Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	3,03	2	2	Rp	290.000.000	2	Rp	654.000.000	2	Rp	715.400.000	2	Rp	786.940.000	2	Rp	803.678.800	10	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
	3	25	03	1.01			Meningkatnya Produksi Perikanan yang di daratkan di pelabuhan perikanan	Kegiatan : Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	Ton	0	0	3.600,00	Rp	50.000.000	3.672,00	Rp	390.000.000	3.745,44	Rp	427.000.000	3.820,35	Rp	469.700.000	3.896,76	Rp	479.094.000	18.734,54	Produksi Ikan yang di Daratkan di Pelabuhan dengan asumsi kenaikan 2% tiap Tahun
	3	25	03	1.01	0005		Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	0	0	0	Rp	-	1	Rp	135.000.000	1	Rp	146.500.000	1	Rp	161.150.000	1	Rp	164.373.000	4	Paket prasarana pendukung penangkapan ikan terukur
	3	25	03	1.01	0006		Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Dokumen	0	0	3	Rp	50.000.000	3	Rp	55.000.000	3	Rp	60.500.000	3	Rp	66.550.000	3	Rp	67.881.000	15	Jumlah dokumen yang mendukung penangkapan ikan terukur
	3	25	03	1.01	0007		Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Sub Kegiatan : Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit	0	0	0	Rp	-	50	Rp	200.000.000	100	Rp	220.000.000	100	Rp	242.000.000	100	Rp	246.840.000	350	Paket sarana pendukung penangkapan ikan terukur
	3	25	03	1.06			Meningkatnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Mengadi Kewenangan Provinsi	Kegiatan : Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola dengan baik	Pelabuhan Perikanan	2	2	2	Rp	240.000.000	3	Rp	264.000.000	3	Rp	288.400.000	3	Rp	317.240.000	3	Rp	324.584.800	3	Jumlah Pelabuhan
	3	25	03	1.06	0002		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	0	2	Rp	140.000.000	3	Rp	154.000.000	3	Rp	167.400.000	3	Rp	184.140.000	3	Rp	187.822.800	3	Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
	3	25	03	1.06	0003		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	1	5	Rp	100.000.000	5	Rp	110.000.000	5	Rp	121.000.000	5	Rp	133.100.000	5	Rp	136.762.000	5	layanan Fungsi Pemerintahan yang memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Perikanan

LAMPIRAN VII.a

TABEL PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

Program Prioritas Nasional dalam RPJMN dan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029				PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH
Kode	Prioritas Nasional	Kode	Program Prioritas	Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029	
02	Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	02.06	Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Diskelkan
		02.10	Swasembada Pangan	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskelkan
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskelkan
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskelkan
		02.16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Diskelkan
		02.18	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir		Diskelkan
		02.19	Pembangunan Rendah Karbon	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Diskelkan
		02.22	Pembangunan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Diskelkan
				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskelkan
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskelkan
05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	05.01	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskelkan
		05.05	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskelkan
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diskelkan
08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	08.03	Pembangunan Berketahanan Iklim	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Diskelkan
				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Diskelkan
				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Diskelkan

TABEL PEMETAAN BIDANG / TEMA / AK VISI MISI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

PROGRAM NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata						
	Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan	Kedaulatan Pangan	1 Menuntaskan sistem pertanian organik	Program Bidang Kelautan dan Perikanan:			
			2 Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian	1 Mempercepat dan memantapkan pelaksanaan regulasi:			
			3 Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah	a	Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Distanpangan Satpol PP, Disperindag, Dispar, Diskanlaut
						Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Diskanlaut
			b	Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Diskanlaut	Diskop, Disperindag
					Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	
					Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Diskanlaut	
					Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Diskanlaut	
					Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Diskanlaut	
			2	Mempercepat pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali sektor Kelautan dan Perikanan.	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	Distanpangan, Diskop, Disperindag, Dispar
					Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	
					Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Diskanlaut	
					Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Diskanlaut	
					Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	
					Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Diskanlaut	
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskanlaut	
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
					Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Diskanlaut	

PROGRAM NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
					Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diskanlaut	
					Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Diskanlaut	
					Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Diskanlaut	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Diskanlaut	
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Diskanlaut	
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Diskanlaut	
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Diskanlaut	
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Diskanlaut	
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
					Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Diskanlaut	
					Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
					Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Diskanlaut	
					Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Diskanlaut	
					Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Diskanlaut	
					Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Diskanlaut	
					Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Diskanlaut	
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diskanlaut	
					Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Diskanlaut	

PROGRAM NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG	
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Diskanlaut		
					Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diskanlaut		
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Distanpangan		
					Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Distanpangan		
				3	Membudidayakan ikan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk ekspor melalui pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Budidaya sesuai potensi wilayah Kota/Kabupaten.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	Disperindag
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Diskanlaut	
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Diskanlaut	
						Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Diskanlaut	
						Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
						Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
						Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Diskanlaut	
						Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Diskanlaut	
				4	Mempercepat pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Garam Tradisional Lokal Bali di Buleleng, Karangasem, Klungkung, dan Jembrana.	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Diskanlaut	Bappeda, Inspektorat
						Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	
						Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Diskanlaut	
						Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Diskanlaut	
						Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Diskanlaut	
				5	Mempercepat pelaksanaan pembangunan Kelompok Bersama Satupintu (KBS) Perikanan Tangkap (Sentra Perikanan) dan memfasilitasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskanlaut	Bappeda, Inspektorat

PROGRAM NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG	
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut		
					Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Diskanlaut		
					Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut		
					Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskanlaut		
					Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diskanlaut		
					Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diskanlaut		
					Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Diskanlaut		
					Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Diskanlaut		
					Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Diskanlaut		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Diskanlaut		
					Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Diskanlaut		
				6	Memantapkan penggunaan produk lokal sebagai implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Distanpangan	Satpol PP, Disperindag, Dispar, Diskanlaut
				7	Meningkatkan pelaksanaan event festival dan pameran produk Kelautan dan Perikanan secara lebih masif.	Facilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Disperindag	Diskominfo, Distanpangan, Diskanlaut
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Distanpangan	
				8	Mempercepat penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi secara efektif, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	Diskanlaut, DKLH, DPMPSTP
						Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Diskanlaut	
				9	Mempercepat pembetukan Komunitas Bahari Swadaya (KBS) Nelayan Muda Milenial	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskanlaut	
						Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
						Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Diskanlaut	
						Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Diskanlaut	
				10	Melarang kawasan pengolahan garam tradisional Bali dimanfaatkan sebagai fasilitas pariwisata.	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Diskanlaut	Satpol PP dan Dispar
						Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	
						Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Diskanlaut	
						Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Diskanlaut	

PROGRAM NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI					PROGRAM SESUAI NOMENKLATUR DALAM PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH PENDUKUNG	
NO	BIDANG	TEMA	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	NOMENKLATUR PROGRAM SESUAI KEARIFAN LOKAL	SUB KEGIATAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
						Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Diskanlaut	
				11	Melindungi kawasan sempadan pantai dan laut sebagai tempat upacara keagamaan adat Bali serta akses menuju kawasan, dari ancaman pelarangan/pembatasan penggunaan kawasan sempadan pantai dan laut oleh pelaku usaha pariwisata.	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut	D.PMA, Disbud, Dispar, diskanlaut, Satpol PP
						Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut	
						Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Diskanlaut	
						Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Diskanlaut	
						Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Diskanlaut	
				12	Meningkatkan perolehan Sertifikat Indikasi Geografis Produk Kelautan dan Perikanan, antara lain: garam, rumput laut, dan ikan hias.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Brida	Diskanlaut
				13	Mempercepat peningkatan pendapatan yang bersumber dari retribusi konservasi kelautan	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Diskanlaut,	Bapenda, D.PUPR
						Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut,	
						Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Diskanlaut,	
						Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Diskanlaut,	
						Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Diskanlaut,	

LAMPIRAN VIII

TABEL 4.4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KODE IK	:	Indikator Kinerja Tujuan					
SASARAN	:	Meningkatkan kesehatan lingkungan, ketahanan pangan dan produktivitas sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan					
1	Nama Indikator	:	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)				
2	Definisi	:	Indeks Ekonomi Biru adalah ukuran komposit yang menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi berbasis sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, inklusif, dan produktif. Indeks ini mencakup dimensi pertumbuhan ekonomi kelautan, pengelolaan sumber daya laut secara lestari, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan perlindungan ekosistem laut.				
3	Formula Perhitungan	:	Dashboard IBEI Provinsi Bali				
4	Satuan	:	Indeks				
5	Tingkat Validitas IK	:	(X) Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome	
6	Sumber Data	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali				
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir		
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize		
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan	
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct			
11	Bukti Dukung	:	Hasil Perhitungan Indeks Ekonomi Biru Provinsi Bali pada Dashboard IBEI				
Penanggung Jawab							
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali							

KODE IK		:	Indikator Kinerja Utama			
SASARAN		:	Meningkatnya lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sehat, beragam dan produktif			
1	Nama Indikator	:	Persentase Pemanfaatan Ruang Laut			
2	Definisi	:	Jumlah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Luas Total Kawasan Konservasi yang Telah ditetapkan oleh pemerintah pusat}}{\text{Luas Total Perairan Provinsi Bali}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	(X) Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			
Penanggung Jawab						
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan			
1	Nama Indikator	:	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
2	Definisi	:	Pelaku Usaha yang sudah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki KKPRL}}{\text{Jumlah Seluruh Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			
Penanggung Jawab Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi			
1	Nama Indikator	:	Persentase Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang telah terfasilitasi			
2	Definisi	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Kawasan Konservasi yang ditetapkan}}{\text{Total Kawasan Konservasi}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			
Penanggung Jawab Unit Substansi Tata Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			
1	Nama Indikator	:	Persentase masyarakat lokal dan tradisional yang terfasilitasi KKPRL			
2	Definisi	:	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Terfasilitasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah kelompok masyarakat tradisional}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Jumlah Fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Pengendalian Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan			
2	Definisi	:	Kelompok Masyarakat Petani Garam yang di Berdayakan			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Kelompok Petani Garam yang di berdayakan}}{\text{Jumlah Kelompok Petani Garam}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Jumlah Kelompok Masyarakat Petani Garam yang diberdayakan			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan			
1	Nama Indikator	:	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			
2	Definisi	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Kawasan Konservasi yang dikelola}}{\text{Total Kawasan Konservasi}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah			
Penanggung Jawab Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan			
2	Definisi	:	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Yang di Kelola			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Yang di Kelola			
4	Satuan	:	Kawasan			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Jumlah Fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			
Penanggung Jawab Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan			
2	Definisi	:	Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan			
3	Formulasi Perhitungan	:	$= \frac{\text{jumlah kelompok yang di berdayakan}}{\text{jumlah kelompok}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Kelompok Masyarakat Pesisir yang di berdayakan			
Penanggung Jawab Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Utama			
SASARAN		:	Meningkatnya ketahanan sektor perikanan terhadap bencana dan perubahan iklim			
1	Nama Indikator	:	Persentase cakupan ketersediaan komoditas perikanan sensitif iklim yang aman, sehat dan berkualitas			
2	Definisi	:	Ukuran proporsi ketersediaan jenis-jenis komoditas perikanan yang rentan terhadap perubahan iklim, yang tetap dapat disediakan dalam kondisi memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, serta mutu yang sesuai ketentuan			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis yang diintervensi}}{\text{Total komoditas unggul Perikanan Tangkap di Kawasan strategis}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	(X) Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data PDRB sektor perikanan provinsi terhadap PDRB provinsi (ADHB)			
Penanggung Jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap			
1	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan tangkap yang dihasilkan dalam setahun, dalam perikanan tangkap termasuk perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD).			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{(Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ n - Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ Sebelumnya)}{Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ Sebelumnnya} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	() Maximize	() Minimize	(X) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Tangkap			
Penanggung Jawab						
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya produksi perikanan tangkap di wilayah laut sampai dengan 12 Mil			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil yang dihasilkan dalam setahun			
3	Formula Perhitungan	:	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
4	Satuan	:	Ton			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	() Maximize	() Minimize	(X) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan di Perairan Umum Darat (PUD) yang dihasilkan dalam setahun			
3	Formula Perhitungan	:	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat (PUD)			
4	Satuan	:	Ton			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	() Maximize	() Minimize	(X) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Darat (PUD)			
Penanggung Jawab Unit Substansi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang berizin			
2	Definisi	:	Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang memiliki buku kapal perikanan (BKP)			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{jumlah kapal perikanan yang sudah memiliki buku kapal}}{\text{jumlah kapal perikanan di pengambengan}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang sudah memiliki buku kapal perikanan (BKP)			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya kapal perikanan yang memiliki perizinan sub sektor penangkapan ikan sampai dengan 10 GT			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang berizin			
2	Definisi	:	Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki buku kapal perikanan (BKP)			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{jumlah kapal perikanan di bawah 10 GT yang sudah memiliki buku kapal}}{\text{jumlah kapal perikanan dibawah 10 GT seluruh Bali}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang sudah memiliki buku kapal perikanan (BKP)			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap			
1	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan tangkap yang dihasilkan dalam setahun, dalam perikanan tangkap termasuk perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum daratan (PUD).			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{(Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ n - Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ Sebelumnya)}{Produksi\ Perikanan\ Tangkap\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	() Maximize	() Minimize	(X) Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Tangkap			
Penanggung Jawab						
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Produksi Perikanan yang di daratkan di pelabuhan perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan			
2	Definisi	:	Produksi Ikan yang di Daratkan di Pelabuhan dengan asumsi kenaikan 2% tiap Tahun			
3	Formula Perhitungan	:	Volume Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan			
4	Satuan	:	Ton			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan			
Penanggung Jawab Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terkelola dengan baik			
2	Definisi	:	Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Pelabuhan Perikanan			
4	Satuan	:	Pelabuhan Perikanan			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
Penanggung Jawab Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPTD Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Utama			
SASARAN		:	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi bali terhadap PDRB provinsi bali (ADHB)			
2	Definisi	:	Kontribusi PDRB sektor perikanan provinsi terhadap PDRB provinsi (ADHB)			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{PDRB Sektor Perikanan Provinsi}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	(X) Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data PDRB sektor perikanan provinsi terhadap PDRB provinsi (ADHB)			
Penanggung Jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya			
1	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan budidaya pembesaran di provinsi dimaksud			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{(Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ n - Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ Sebelumnya)}{Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Budidaya			
Penanggung Jawab						
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Laut			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan budidaya pembesaran di provinsi dimaksud			
3	Formula Perhitungan	:	Volume Produksi Perikanan Budidaya			
4	Satuan	:	Ton			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Volume Produksi Perikanan Budidaya			
Penanggung Jawab Unit Substansi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya			
1	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan budidaya pembesaran di provinsi dimaksud			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{(Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ n - Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ Sebelumnya)}{Produksi\ Perikanan\ Budidaya\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	(X) Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Budidaya			
Penanggung Jawab						
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya di Perairan Darat			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produksi Induk dan Benih yang Berkualitas			
2	Definisi	:	Total produksi perikanan budidaya pembesaran di di UPTD Produksi Perikanan Budidaya			
3	Formula Perhitungan	:	Volume Produksi Perikanan Budidaya di UPTD Produksi Perikanan Budidaya			
4	Satuan	:	Ekor			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Volume Produksi Perikanan Budidaya di UPTD Produksi Perikanan Budidaya			
Penanggung Jawab Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut UPTD Produksi Perikanan Budidaya Penanggung Jawab Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar UPTD Produksi Perikanan Budidaya						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Utama			
SASARAN		:	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan			
1	Nama Indikator	:	Indeks Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha			
2	Definisi	:	Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang telah diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
3	Formula Perhitungan	:	$XKP = \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)}{4}$ Xkp : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha X1 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan X2 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan X3 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan X4 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	(X) Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan			
Penanggung Jawab						
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			
2	Definisi	:	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			
3	Formula Perhitungan	:	$PKPU (X...) = \frac{KPU (X \dots)}{JKPU (X \dots)} \times 100\%$ PKPU = Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KPU : Kepatuhan Pelaku Usaha (Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh X ...) JKPU : Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha (Jumlah Total Pelaku Usaha X ...) X1 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan X2 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan X3 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan X4 : Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemasaran Hasil Perikanan			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Perikanan Budidaya			
Penanggung Jawab						
Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
2	Definisi	:	Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pelaku Usaha Penangkapan Ikan, Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan)			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang patuh di tahun berjalan}}{\text{Total jumlah pelaku usaha tahun dasar 2025}} \times 100\%$ Tahun Dasar 2025 = 419 Jumlah Pelaku Usaha KKPRL = 152 Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Tangkap = 188 Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Perikanan Budidaya = 79			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pelaku Usaha Penangkapan Ikan, Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan)			
Penanggung Jawab Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Penanggung Jawab Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
2	Definisi	:	Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{Jumlah\ Pelaku\ Usaha\ yang\ patuh\ di\ tahun\ berjalan}{Total\ jumlah\ pelaku\ usaha\ tahun\ dasar\ 2025} \times 100\%$ Tahun Dasar 2025 = 315 Jumlah Pelaku Usaha Sub Sektor Pengolahan = 315			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Utama			
SASARAN		:	Meningkatnya Daya Saing Produk Olahan Hasil Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Nilai Ekspor Provinsi Bali			
2	Definisi	:	Nilai ekspor produk perikanan terhadap total nilai ekspor di provinsi dimaksud. Komoditas perikanan mencakup komoditas yang tercantum pada website KKP pada tabel Data Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Nilai Hasil Ekspor Perikanan Provinsi}}{\text{Total Nilai Hasil Ekspor Provinsi}} \times 100\%$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	(X) Outcome	() Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Ekspor Komoditas perikanan mencakup komoditas yang tercantum pada website KKP pada tabel Data Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas			
Penanggung Jawab Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase Peningkatan produksi olahan hasil perikanan			
2	Definisi	:	Total Produksi Olahan Hasil Perikanan			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{(\text{Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya})}{\text{Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya}} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Produksi Olahan Hasil Perikanan			
Penanggung Jawab Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya unit pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang memenuhi izin usaha			
1	Nama Indikator	:	Persentase Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha			
2	Definisi	:	Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha			
3	Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Jumlah Unit Usaha yang sudah memiliki standar izin usaha sampai Tahun } n}{\text{Jumlah Unit Usaha sampai Tahun } n} \times 100\%$ Jumlah Unit Usaha Yang Aktif = 62			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya kemampuan dan pemahaman dalam penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha pengolah dan pemasar yang dibina			
2	Definisi	:	Pembinaan Kepada Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan (Mikro-Kecil Menengah-Besar)			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Unit usaha yang dibina			
4	Satuan	:	Unit Usaha			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Pembinaan Kepada Unit Usaha Pengolahan dan Pemasar Hasil Perikanan (Mikro-Kecil Menengah-Besar)			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Tersedianya Data dan Informasi kebutuhan bahan baku industri Pengolahan Ikan bagi unit usaha			
1	Nama Indikator	:	Jumlah unit usaha yang terdata kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan			
2	Definisi	:	Unit Usaha yang terdata kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan			
3	Formula Perhitungan	:	Unit Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan			
4	Satuan	:	Unit Usaha			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	(X) Akumulasi	() Rata-Rata	() Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Jumlah unit usaha yang terdata kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan			
Penanggung Jawab						
Unit Substansi Usaha dan Investasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kunci			
SASARAN		:	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
1	Nama Indikator	:	Persentase peningkatan mutu dan keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
2	Definisi	:	Total Uji Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
3	Formula Perhitungan	:	$= \left(\frac{((Jumlah\ uji\ Tahun\ n - Jumlah\ yang\ di\ uji\ Tahun - n))}{Jumlah\ yang\ di\ uji\ Tahun - n} \times 100\% \right)$			
4	Satuan	:	%			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	(X) Intermediate Outcome	() Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Uji Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
Penanggung Jawab						
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali						

KODE IK		:	Indikator Kinerja Kegiatan			
SASARAN		:	Meningkatnya Produk Hasil Perikanan yang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Terjamin Mutu dan Keamanannya			
1	Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hasil Perikanan yang bersertifikat SNI serta terjamin mutu dan keamanannya			
2	Definisi	:	Jumlah Uji Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
3	Formula Perhitungan	:	Jumlah Uji Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Jumlah Pengujian Tahun 2024 = 60 Jumlah Penerapan Tahun 2024 = 26			
4	Satuan	:	Dokumen			
5	Tingkat Validitas IK	:	() Ultimate Outcome	() Outcome	() Intermediate Outcome	(X) Immediate Outcome
6	Sumber Data	:	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali			
7	Pola Perhitungan	:	() Akumulasi	() Rata-Rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
8	Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
9	Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulan	() Semesteran	() Tahunan
10	Metode Cascading	:	(X) Direct	() Non-Direct		
11	Bukti Dukung	:	Data Uji Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan			
Penanggung Jawab Penanggung Jawab						
Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan						



4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029;
10. Perda Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dengan susunan



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menghimpun materi-materi yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
 - mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - menyampaikan hasil dokumen Rencana Strategis kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 08 Mei 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan)
- Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar
- Inspektur Provinsi Bali di Denpasar
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

NOMOR 5055 TAHUN 2025 TANGGAL 8 MEI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI TAHUN 2025-2029

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 :

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Anggota :

1. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Provinsi Bali.

2. Kepala Bidang Perikanan Provinsi Bali.

3. Kepala Bidang Kelautan Provinsi Bali.

4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

5. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali.

6. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Bali

7. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali

8. Kepala UPTD Pelabuhan dan Perikanan Provinsi Bali

7. Ketua Tim Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

8. 3 (Tiga) Orang Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

1. Pande Gde Krishnadana,S.STP., M.AP

2. I Wayan Deni Koriawan, S.Tr.Pi

3. A.A. Ngurah Gede Surya Karuna

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 08 Mei 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

